



Laporan Kinerja



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si
Bupati Nias Periode 2021 - 2024

AROTA LASE, A.Md
Wakil Bupati Nias Periode 2021 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Tahun 2021



Laporan Kinerja



YAATULO GULO, S.E.,S.H.,M.Si
Bupati Nias Periode 2021 - 2024

AROTA LASE, A.Md
Wakil Bupati Nias Periode 2021 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS INSPEKTORAT DAERAH

JALAN PERTANIAN NO. 20 A DESA HILIWETO KECAMATAN GIDO
TELP.-/FAX.- KODE POS : 22871
Email : inspektorat@niaskab.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Nias. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NIAS,

ANDHIKA P. LAOLY, SSTP, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19830428 200112 1 001



VISI

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN NIAS
YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA ”**

MISI

- 1 **Membangun Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata dan Berwawasan Lingkungan.**
- 2 **Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Masyarakat.**
- 3 **Membangun Perekonomian Daerah yang berbasis pada Ekonomi Kerakyatan secara Merata dan Berkeadilan.**
- 4 **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Birokrasi yang Melayani dan Profesional.**
- 5 **Menata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya, Religius, dan Taat Hukum.**



Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak \pm 86 mil laut dari kota Sibolga.

- Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada $0^{\circ}53'1,5''$ - $1^{\circ}17'16,6''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}29'0,7''$ - $97^{\circ}58'29''$ Bujur Timur.
- Luas wilayah seluas 143.864,32 Ha
- Luas daratan 85.342,32 Ha.
- Laut seluas 58.522,00 Ha.
- Terdiri dari 10 Kecamatan: Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Gido, Ma'u, Somolo-molo, Hiliduho, Hiliserangkai, Hiliduho dan Sogaeadu
- Memiliki 170 Desa.



ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN NIAS

1. Garis Pinggir berwarna hitam melingkari lambang dengan dasar putih mempunyai arti persatuan dan kesatuan masyarakat Nias yang kokoh dan kuat.
2. Arōgosali dengan atap berwarna coklat mengandung arti tempat bermusyawarah untuk mufakat guna menetapkan hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Nias.
3. Faliera, Lauru, Afore, dengan warna hitam melambangkan jiwa keadilan dan bola nafo yang berwarna warni melambangkan sifat keramah-tamahan masyarakat Nias.
4. Pohon Beringin berwarna hijau melambangkan pengayoman Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gowe, Baluse, Toho, dan Gari, dengan warna hitam melambangkan kehidupan kultural serta patriotisme masyarakat Nias.
6. Tulisan Nias berwarna Putih adalah nama resmi Kabupaten Nias.
7. Tulisan Tanōniha, adalah sebutan daerah Nias dalam bahasa yang sudah lama tumbuh, hidup dan berkembang di kalangan masyarakat.
8. Tulisan DATA TUWU, dengan warna hitam yang terdapat dalam lambang daerah adalah motto atau slogan atau semboyan Pemerintah daerah sebagai pemersatu untuk lebih membangkitkan semangat dan penyatuan tekad dalam meningkatkan laju pembangunan daerah Nias.
9. Deretan Bukit Barisan yang kelihatan delapan buah berwarna hijau melambangkan keindahan alam Daerah Nias serta mengingatkan saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun 1945.
10. Mayang Padi dan butirnya yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah mengingatkan tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
11. Buah Kelapa sejumlah 17 (tujuh belas) buah dengan warna kuning coklat menunjukkan salah satu hasil bumi utama Daerah Nias dan mengingatkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
12. Bintang bersudut Lima dengan berwarna kuning mencerminkan kehidupan kerohanian masyarakat Nias yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

SEKILAS TENTANG KABUPATEN NIAS

Kabupaten Nias merupakan sebuah refleksi terhadap perjalanan sejarah Kabupaten Nias ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan adat, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca pemekaran Kabupaten Nias (pembentukan Daerah Otonom Baru). Para ahli sejarah dan budaya dari Nias meyakini bahwa leluhur pertama Ononiha (Suku Nias) berasal dari Negeri yang bernama Teteholi'ana'a (kira-kira dari Indocina-Vietnam sekarang) antara 2000 s.d. 1000 tahun sebelum masehi sebanyak 5 (lima) orang yang disebut Si Lima Börödänömö (Lima Induk Puak) yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Kelima orang tersebut berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang untuk pertama kalinya mendiami dan berkedudukan di Börönadu.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur telah berada di Nias jauh sebelum Belanda menjajah Kepulauan Nias. Menurut catatan sejarah, dinyatakan bahwa Davidson (Kepala Cabang VOC) telah tiba di Kepulauan Nias pada tahun 1665, dan kemudian pada tanggal 02 Juni 1669 VOC telah menandatangani surat kontrak dagang dengan Raja Laraga untuk penggunaan Pelabuhan Luaha Idanoi.

Penjajahan Belanda di Bumi Tanö Niha diawali pada tanggal 01 Januari 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan Kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda dari Inggris pada tahun 1821.

Pada tahun 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada Belanda, namun karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka Kepulauan Nias tidak disentuh atau dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, barulah pada tanggal 04 Desember 1870 wilayah Nias mulai diperhatikan oleh Belanda melalui pengangkatan J.F.A. de Rooij sebagai *Kontroleur* Pertama *Onder Afdeeling* Nias dengan *Luitenant der Chinezen* bernama So Ghie. Dengan demikian, *Onder Afdeeling* Nias terbentuk dan efektif bekerja mulai tanggal 04 Desember 1870 yang merupakan salah satu dari 6 (enam) *Onder Afdeeling* di bawah kekuasaan *Afdeeling* Sibolga Keresidenan Tapanuli. Atas dasar inilah yang menguatkan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nias jatuh pada tanggal 04 Desember 1870.

Selanjutnya, pada tahun 1919, *Onder Afdeeling* Nias ditingkatkan statusnya menjadi *Afdeeling* Nias yang merupakan salah satu dari 4 (empat) *Afdeeling* wilayah Residen Tapanuli. *Afdeeling* Nias dipimpin oleh Asisten Reseden, dengan wilayah administratif terbagi atas 2 (dua) *Onder Afdeeling*, yaitu : *Onder Afdeeling* Nias Selatan dengan ibu kota Teluk Dalam dan *Onder Afdeeling* Nias Utara dengan ibu kota Gunungsitoli, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Controleur*.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kecuali *Onder Afdeeling* dihilangkan, dan yang mengalami perubahan hanya istilah saja, yaitu :

- ✓ *Afdeeling* diganti dengan nama *Gunsu Sibul* yang dipimpin oleh seorang *Setyoty*.
- ✓ Dusun diganti dengan nama *Gun* yang dipimpin oleh seorang *Guntyo*.
- ✓ *Onder Distrik* diganti dengan nama *Fuku Gu* yang dipimpin oleh seorang *Fuku Guntyo*.

Pada tahun-tahun pertama masa kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan. Demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya, yakni :

- ✓ Nias Gunsu Sibul diganti dengan nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luhak.
- ✓ Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang).
- ✓ Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Pada awal masa kemerdekaan terdapat 9 (sembilan) kecamatan, dimana diantara kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Otonom dan secara resmi diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Daerah di Kabupaten Nias sejak awal Kemerdekaan pada Tahun 1945 sampai dengan hari ini yakni :

1.



D.Z MARUNDRURI , Kepala Luhak Nias dari Tahun 1945 sampai dengan Tahun 1946.

2.



P.R. TELAUMBANUA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1946 sampai dengan Tahun 1954.

3.



HUMALA FREDERIK SITUMORANG, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1954 sampai dengan Tahun 1956.

4.



HERMAN SIRAIT, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1956 sampai dengan Tahun 1958

5.



A.W. HAREFA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1958 sampai dengan Tahun 1960.

6.



ASANUDIN WARUWU, Bupati KDH TK. II Nias dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1966

7.



KENAN SARAGIH, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1967

8.



M. SANI ZEGA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1975

9.



DALIMEND, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1981

10.



HANATI NAZARA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1986

11.



S.M. MENDROFA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1991

12.



Drs. TAL LAROSA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996

13.



Drs. H. ZAKHARIA Y. LAFAU, Bupati Nias dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2001

14.



BINAHATI B. BAEHA, SH, Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011

15.



Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM, Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

16.



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si
BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si, Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

dan Wakil Bupati yakni :

1.



AGUS H. MENDROFA
WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2001 - 2006

AGUS H. MENDROFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006.

2.



TEMAZARO HAREFA
WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2006 - 2011

TEMAZARO HAREFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

3.



AROSOKHI WARUWU, SH, MH Wakil Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

4.



AROTA LASE, A.Md
WAKIL BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

AROTA LASE, A.Md, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

KATA PENGANTAR



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si
BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah dan penyertaanNya Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021 telah melaksanakan pembangunan dan pelayanan melalui program dan kegiatan strategis sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dukungan Legislatif Kabupaten Nias dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang telah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kewajiban penyusunan LAKIP bagi setiap instansi pemerintah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD. LAKIP merupakan potret nilai prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nias yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nias Tahun 2021 tidak terlepas dari munculnya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) khususnya pada pencapaian target-target kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini dipengaruhi oleh *refocussing* anggaran dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagai dampak penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias melakukan beberapa upaya pencegahan dan penyebaran *COVID-19* yang semakin meluas, antara lain :

1. Pembentukan SATGAS *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Nias;
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Nias h;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Nias h;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Nias.
2. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, hal serupa juga diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (Upacara, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan kegiatan sejenis);
3. Menerapkan Sistem Pembelajaran bagi Peserta Didik melalui *online* atau belajar dari rumah.
4. Pegawai Negeri Sipil diminta untuk :
 - a. Tidak melakukan perjalanan keluar wilayah tempat tinggalnya;
 - b. Menjaga pola hidup sehat dan bersih;
 - c. Terus melakukan pemantauan kesehatan sebagaimana dianjurkan;
 - d. Mengikuti petunjuk pencegahan *COVID-19* sebagaimana protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan baik pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima saran, masukan dan koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Nias yang Maju. Ya'ahowu...!

Gunungsitoli Selatan, 29 Maret 2022

**BUPATI NIAS,**
Yaatulo Gulo
YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si
BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 menyajikan/ menggambarkan sejauh mana capaian kinerja utama dan capaian kinerja persasaran strategis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias yang telah dicapai di Tahun Anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 disusun sebagai pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi Pemerintah serta dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Nias sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan melalui program-program strategis dan prioritas Kabupaten Nias Tahun 2021 yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Nias optimis meningkatkan Predikat dari tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021 meliputi bidang Pembangunan, Pemerintahan, Pelayanan Publik, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Ekonomi dan beberapa komponen lainnya sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

Berikut Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dari Tahun 2012 s.d Tahun 2021.

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2012	47.99	C
2.	2013	43.05	C
3.	2014	37.84	C
4.	2015	50.06	CC
5.	2016	53.02	CC
7.	2017	54.29	CC
8.	2018	56.28	CC
9.	2019	57,28	CC
10.	2020	58,09	CC
11.	2021 *)	N/A	N/A

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2021 telah didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021. Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021, seperti pada tabel berikut ini :

JUMLAH IKU	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL	BELUM ADA HASIL *)
27	18	2	2	2	3

Catatan :

*) Indikator Kinerja *Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* belum dapat ditampilkan hasil capaian berhubung karena belum keluarnya hasil penilaian dari Pemerintah Pusat (Kemenpan & RB RI dan BPK Provsu)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berikut persentase pencapaian Persentase kinerja masing-masing sasaran dan indikator seperti pada tabel sebagai berikut :

Persentase Keberhasilan Tiap Misi
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

MISI KEPALA DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2020	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2020
[1]	[2]	[3]
Membangun Infrastruktur Dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata Dan Berwawasan Lingkungan	116,20	Sangat Berhasil
Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Daya Saing Masyarakat	93,99	Sangat Berhasil
Membangun Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata Dan Berkeadilan	84,30	Berhasil
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	117,40	Sangat Berhasil
Menata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, Dan Taat Hukum	79,25	Sangat Berhasil
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021	98,25	SANGAT BERHASIL

Data diolah Tahun 2022

Program-program yang masih kurang dicapai secara maksimal di Tahun 2021 disebabkan oleh faktor :

- Adanya *refocussing* anggaran sebagai upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Pembangunan gedung perkantoran Perangkat Daerah tidak mencapai target karena tidak adanya ketersediaan lahan dan kekurangan anggaran;

- c. Faktor alam seperti curah hujan yang tidak menentu dan teknis lainnya;
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai;
- e. Belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi/Pusat.

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala pada tahun yang akan datang sebagai berikut :

- a. Penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19;
- b. Antisipasi terhadap bencana alam mengingat Kabupaten Nias masih tergolong daerah rawan bencana baik banjir dan longsor, khususnya di beberapa wilayah kecamatan yang justru menjadi sentral produksi pangan seperti Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato;
- c. Penajaman program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Membangun komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nias mulai dari staf sampai kepada pejabat struktural tentang pentingnya penerapan SAKIP sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- e. Kebijakan dalam meningkatkan akselerasi pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya meningkatkan akses terhadap pembiayaan dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan khususnya pelaksanaan program prioritas dan strategis Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Gunungsitoli Selatan, 29 Maret 2022

BUPATI NIAS,



Yaatulo Gulo

YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si

DAFTAR ISI

Sampul Halaman Luar
Sampul Halaman Dalam
Pernyataan telah di Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Nias
Visi Misi Bupati Nias
Peta Wilayah Kabupaten Nias
Arti Lambang Daerah Kabupaten Nias
Sekilas Tentang Kabupaten Nias

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	3
I. Fungsi Penunjang Pemerintahan	3
II. Dinas Daerah	4
III. Badan Daerah	5
2. Personil Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Keadaan Tahun 2020	5
3. Kondisi Geografis Daerah	6
4. Topografis	7
5. Geologi	11
6. Keadaan Iklim dan Cuaca	11
7. Penggunaan Lahan	12
8. Jumlah Penduduk	13
9. Ketenagakerjaan	14
10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	15
11. Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT)	16
12. Pertumbuhan Penduduk	16
13. Kawasan Peruntukan Industri	17
14. Kawasan Peruntukan Pariwisata	18
15. Wilayah Rawan Bencana Alam	18
16. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi Pembangunan Kabupaten Nias	31
2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Nias.....	31
2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	35
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	38

2.5 Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	40
---	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias	54
3.2 Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020	56
1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	56
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	57
3.3 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 20120	60
3.4 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	62
3.4.1 Analisis Capaian Misi – 1	76
3.4.2 Analisis Capaian Misi – 2	78
3.4.3 Analisis Capaian Misi – 3	82
3.4.4 Analisis Capaian Misi – 4	89
3.4.5 Analisis Capaian Misi – 5	92
3.5 Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	93
Realisasi Pendapatan	93
Realisasi Belanja	94
Realisasi Pembiayaan	95
3.6 Permasalahan dan Solusi	103
Permasalahan	103
Solusi	103
3.7 Cascading Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	104
A. Cascading Misi – 1	105
B. Cascading Misi – 2	106
C. Cascading Misi – 3	107
D. Cascading Misi – 4	108
E. Cascading Misi – 5	109
3.8 Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	110

BAB IV PENUTUP

Penutup	134
---------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran I Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias

Lampiran II Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel – 1	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Lingkup Pemerintah kabupaten Nias Per- 31 Desember 2020	6
Tabel – 2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Lingkup Kabupaten Nias Per-31 Desember 2020	6
Tabel - 3	Luas Wilayah Kabupaten Nias Menurut Kecamatan	7
Tabel – 4	Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias Menurut Panjang dan Klasifikasi	8
Tabel – 5	Keadaan Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Nias	11
Tabel – 6	Keadaan Suhu di Kabupaten Nias	12
Tabel – 7	Penggunaan Lahan Kabupaten Nias.....	13
Tabel – 8	Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2015 s.d 2020	13
Tabel – 9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Nias Tahun 2015 – 2020	14
Tabel – 10	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan utama 2019 dan 2020.....	15
Tabel – 11	Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Menurut Kecamatan Tahun 2020	17
Tabel – 12	Bencana gempa Bumi di Kabupaten Nias	19
Tabel – 13	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Nias	23
Tabel – 14	PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -20120 (Dalam Miliaran Rupiah).....	28
Tabel – 15	PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 (Dalam Miliar rupiah)	29
Tabel – 16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah).....	30
Tabel – 17	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Sasaran berdasarkan Visi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2016-2021.	34
Tabel – 18	Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Nias Tahun 2020	35
Tabel – 19	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	38
Tabel – 20	Keselarasn Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	40
Tabel – 21	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	58
Tabel – 22	Persentase Keberhasilan Tiap Misi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	60
Tabel – 23	Persentase Capaian Kinerja Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Startegis Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020	61
Tabel – 24	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020 Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nias	62
Tabel – 25	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020	94
Tabel – 26	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah kabupaten Nias Tahun 2020	94
Tabel – 27	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020	95
Tabel – 28	Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah kabupaten Nias Tahun 2020	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik – 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Nias	16
Grafik – 2	Produk Domestik Regional Bruto Nias	27
Grafik – 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020 ...	58
Grafik – 4	Persentase Keberhasilan Tiap Misi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020 .	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar – 1	Peta Administrasi Kabupaten Nias	10
Gambar – 2	Peta Posisi Geostrategis kabupaten Nias	10
Gambar – 3	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi	23
Gambar – 4	Peta Rawan Bencana Tsunami	26



BAB I PENDAHULUAN

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2021**

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu gerakan reformasi birokrasi pemerintah pada dewasa ini adalah membumikan konsep akuntabilitas kinerja. Hal ini mengharuskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pemangku kepentingan yakni dunia usaha dan masyarakat. Salah satu pilar dari gerakan reformasi adalah prinsip akuntabilitas yakni pertanggungjawaban atas penggunaan segala sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati sesuai amanah yang diemban.

Secara teknis substantif penyusunan Laporan Kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah perubahan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh *stakeholders* untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Peraturan yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan SPM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005 – 2025.
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021 - 2026;
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
27. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
28. Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor : 231 Seri : E);

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 adalah gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 serta cerminan akuntabilitas kinerja dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1 •Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Nias selama Tahun Anggaran 2021;
- 2 •Mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya;
- 3 •Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021;
- 4 •Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Nias di masa yang akan datang;
- 5 •Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Nias dengan menerapkan azas transparansi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara : 222/2016) dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

I. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yakni:

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati Nias, terdiri atas 3 (tiga), antara lain :
 - a. Staf Ahli Bupati Nias bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Nias bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bupati Nias bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Asisten terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c). Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perundang-Undangan;

- b). Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perekonomian, Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b). Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - c). Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b). Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Protokol;
 - b). Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b). Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c). Sub Bagian Keuangan;
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

- 2. SEKRETARIAT DPRD
- 3. INSPEKTORAT DAERAH

II. DINAS DAERAH

Dinas Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2018 merupakan Dinas Daerah Kabupaten Nias dengan susunan Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
- 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias
- 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nias
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias

6. Dinas Sosial Kabupaten Nias
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias
16. Dinas Pariwisata Kabupaten Nias
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias

III. BADAN DAERAH

Badan Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2018 merupakan Badan Daerah Kabupaten Nias dengan susunan Badan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias

2. PERSONIL/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Jumlah Personil Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 2.692 orang seperti terlihat pada tabel berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias berjumlah 2.692 orang, yang terdiri dari pejabat Struktural 1.026 orang, dan pejabat Fungsional 1.666 orang. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel – 1
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan
Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
Per-31 Desember 2021

URAIAN	GOL. I		GOL. II		GOL. III		GOL. IV		JUMLAH
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
I. STRUKTURAL	6	1	217	72	393	218	100	19	1026
JPT Pratama	0	0	0	0	0	0	23	1	24
Administrator	0	0	0	0	43	6	49	14	112
Pengawas	0	0	0	0	176	76	11	2	265
Pelaksana	6	1	217	72	174	136	17	2	625
II. FUNGSIONAL	1	0	112	219	537	681	68	48	1666
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	0	65	21	428	455	55	43	1068
Tenaga Kesehatan	0	0	30	179	80	204	7	4	504
Penyuluh Pertanian	0	0	17	19	9	6	2	0	53
Auditor	0	0	0	0	4	3	4	1	12
Fungsional Lainnya	0	0	0	0	16	13	0	0	29
JUMLAH (I + II)	7	1	329	291	930	899	168	67	2692

Sumber : BKPSDM Kabupaten Nias (data per 31 Desember 2021)

Tabel – 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Lingkup Kabupaten Nias

URAIAN	≤ SMA		Diploma		S-1		> S-1		JUMLAH
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
I. STRUKTURAL	263	73	94	91	293	135	66	11	1026
JPT Pratama	0	0	0	0	14	1	9	0	24
Administrator	4	1	6	3	55	14	27	2	112
Pengawas	24	8	35	16	110	48	18	6	265
Pelaksana	235	64	53	72	114	72	12	3	625
II. FUNGSIONAL	85	56	157	363	455	519	21	10	1666
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	68	39	61	27	413	453	7	0	1068
Tenaga Kesehatan	5	5	81	323	19	51	12	8	504
Penyuluh Pertanian	12	12	15	13	1	0	0	0	53
Auditor	0	0	0	0	7	2	1	2	12
Fungsional Lainnya	0	0	0	0	15	13	1	0	29
JUMLAH (I + II)	348	129	251	454	748	654	87	21	2692

Sumber : BKPSDM Kabupaten Nias (data per 31 Desember 2021)

3. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah seluas 143.864,32 Ha yang terdiri dari luas daratan 85.342,32 Ha dan laut seluas 58.522,00 Ha. Wilayah administrasi Kabupaten

Nias terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Gido, Ma'u, Somolo-molo, Hiliduho, Hiliserangkai, Hiliduho dan Sogaeadu dan 170 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan.
- Sebelah Timur : Kota Gunungsitoli dan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.

Tabel – 3
Luas Wilayah Kabupaten Nias Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	RASIO TERHADAP LUAS WILAYAH
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Idanogawo	13.865,55	9,64
2	Bawolato	20.445,80	14,21
3	Ulugawo	6.596,63	4,59
4	Gido	11.005,67	7,65
5	Ma'u	6.118,77	4,25
6	Somolo-molo	4.485,39	3,12
7	Hiliduho	6.507,63	4,52
8	Hili Serangkai	6.191,60	4,30
9	Botomuzoi	5.998,29	4,17
10	Sogae'adu	4.126,99	2,87
	Luas Daratan	85.342,32	59,32
	Luas Laut	58.522,00	40,68
	Jumlah/Total	143.864,32	100

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

4. TOPOGRAFIS

Kabupaten Nias berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak ± 86 mil laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada 0°53'1,5"-1°17'16,6" Lintang Utara dan 97°29'0,7"-97°58'29" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Nias memiliki posisi geostrategis yang diuntungkan mengingat posisinya yang terletak diantara jalur-jalur penghubung wilayah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat serta wilayah Kabupaten Nias Utara. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

Kondisi alam/topografi Kabupaten Nias berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan di mana tinggi dari permukaan laut bervariasi antara 0 – 800 m, terdiri dari dataran rendah sampai tanah bergelombang mencapai 24 persen, tanah bergelombang

sampai berbukit-bukit 28,8 persen dan berbukit sampai pegunungan 51,2 persen dari keseluruhan luas daratan. Mempunyai kemiringan lereng rata-rata 8 persen sampai 25 persen. Sedangkan daerah dataran dapat dijumpai sepanjang pantai timur dengan kemiringan 0-8 persen. Dengan kondisi alam Kabupaten Nias tersebut, maka terbentuklah 67 Daerah Aliran Sungai kecil, sedang atau besar yang ditemui hamper di seluruh kecamatan.

Tabel – 4
Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias Menurut Panjang dan Klasifikasi

No	Nama Sungai	Daerah Aliran Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sungai Muzoi	Kab. Nias dan Kab. Nias Utara	22.147,19	20,00	Lintas Kabupaten
2	Sungai Mau	Kota Gunungsitoli	8.837,53	28,00	Lintas Kabupaten
3	Sungai Idanomola	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan	4.259,61	17,00	Lintas Kabupaten
4	Sungai Nalawo	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan	12.801,79	13,70	Lintas Kabupaten
5	Sungai Sowu	Kota Gunungsitoli	4.958,07	3,70	Lintas Kabupaten
6	Sungai Kalimbungo	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	7.494,92	4,50	Lintas Kabupaten
7	Sungai Ma'ui	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	64,44	2,76	Lintas Kabupaten
8	Sungai Bozawa	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	1.077,46	3,65	Lintas Kabupaten
9	Sungai Idano Doa	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	6.919,10	17,90	Lintas Kabupaten
10	Sungai Idanoi	Kota Gunungsitoli	2.177,56	15,00	Lintas Kabupaten
11	Sungai Ma'u	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	8.759,98	7,50	Lintas Kabupaten
12	Sungai Moi	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	849,38	24,21	Lintas Kabupaten
13	Sungai Boga	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	3.728,48	4,10	Lintas Kabupaten
14	Sungai Dola	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	2.283,48	3,73	Lintas Kabupaten
15	Sungai Menaula	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	42.226,88	3,13	Lintas Kabupaten
16	Sungai Bowangi	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	2.626,98	8,00	Lintas Kabupaten
17	Sungai Delamau	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	3.172,20	6,50	Lintas Kabupaten
18	Sungai Hou	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan	26.692,95	5,50	Lintas Kabupaten
19	Sungai Gido Sebua	Kab. Nias dan Kab. Nias Barat	39.475,63	8,77	Lintas Kabupaten
20	Sungai Gido Si'ite	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	22.881,97	15,00	

No	Nama Sungai	Daerah Aliran Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
21	Sungai Idanogawo	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan	38.676,18	42,00	Lintas Kabupaten
22	Sungai Suani	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan	25.324,85	15,30	Lintas Kabupaten
23	Sungai Ya'a	Kec. Ma'u	6.081,36	5,00	Non Lintas
24	Sungai Dulu	Kec. Hiliduho dan Kec. Botomuzoi	6.349,51	6,31	Lintas Kabupaten
25	Sungai Kalimango	Kec. Hiliduho dan Kec. Hiliserangkai	9.642,53	1,75	Lintas Kabupaten
26	Sungai Idanowa	Kec. Ma'u dan Kec. Gido	2.801,07	15,50	Lintas Kabupaten
27	Sungai Yo'o	Kec. Gido dan Kec. Somolo-molo	6.081,62	6,20	Lintas Kabupaten
28	Sungai Moi	Kec. Somolo-molo dan Kec. Ulugawo	1.020,57	7,00	Lintas Kabupaten
29	Sungai Bogi	Kec. Hiliduho	1.636,39	4,50	Non Lintas
30	Sungai Manuzu	Kec. Hiliduho	487,09	1,03	Non Lintas
31	Sungai Nou	Kec. Hiliduho	176,83	14,00	Non Lintas
32	Sungai No'uo	Kec. Hiliduho	2.966,73	6,00	Non Lintas
33	Sungai Sinoto	Kec. Hiliduho	4.345,22	8,75	Non Lintas
34	Sungai Ndra	Kec. Botomuzoi	8.146,59	20,00	Non Lintas
35	Sungai Buakhe	Kec. Botomuzoi	2.083,30	5,80	Non Lintas
36	Sungai Noho	Kec. Botomuzoi	1.346,68	3,96	Non Lintas
37	Sungai To'oro	Kec. Botomuzoi	4.223,02	2,87	Non Lintas
38	Sungai Magiao	Kec. Botomuzoi	2.822,39	2,35	Non Lintas
39	Sungai Boloza	Kec. Hiliserangkai	2.226,91	2,70	Non Lintas
40	Sungai Lotu	Kec. Hiliserangkai	3.263,10	2,50	Non Lintas
41	Sungai Bohali	Kec. Hiliserangkai	1.763,18	1,50	Non Lintas
42	Sungai Neri	Kec. Gido	2.558,85	3,50	Non Lintas
43	Sungai Hetalu	Kec. Gido	3.600,41	3,00	Non Lintas
44	Sungai Mondrua	Kec. Gido	1.675,49	2,50	Non Lintas
45	Sungai Gido	Kec. Gido	848,26	17,05	Non Lintas
46	Sungai Fagato	Kec. Gido	1.902,01	3,56	Non Lintas
47	Sungai Lauri	Kec. Sogae'adu	17.295,79	8,00	Non Lintas
48	Sungai Sinizi	Kec. Sogae'adu	15.222,72	2,70	Non Lintas
49	Sungai Idanomate	Kec. Sogae'adu	2.078,73	7,10	Non Lintas
50	Sungai Mua	Kec. Sogae'adu	8.990,62	10,00	Non Lintas
51	Sungai Fagato	Kec. Ma'u	2.286,31	3,42	Non Lintas
52	Sungai Sobaewa	Kec. Idanogawo	18.593,72	2,00	Non Lintas
53	Sungai Mezawa	Kec. Idanogawo	3.771,60	6,00	Non Lintas
54	Sungai Moawu	Kec. Idanogawo	4.991,88	3,00	Non Lintas
55	Sungai Ma'u	Kec. Idanogawo	3.766,71	0,87	Non Lintas

No	Nama Sungai	Daerah Aliran Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
56	Sungai Nosi	Kec. Idanogawo	3.709,32	2,00	Non Lintas
57	Sungai Afia	Kec. Idanogawo	2.044,68	2,97	Non Lintas
58	Sungai Idanonadu	Kec. Idanogawo	4.576,22	1,77	Non Lintas
59	Sungai Idanombogi	Kec. Idanogawo	1.457,95	1,50	Non Lintas
60	Sungai Lolowora	Kec. Idanogawo	2.176,01	2,11	Non Lintas
61	Sungai Muene	Kec. Bawolato	1.290,22	2,10	Non Lintas
62	Sungai Sondri	Kec. Bawolato	4.511,76	4,50	Non Lintas
63	Sungai Zumuzu	Kec. Bawolato	4.278,47	3,70	Non Lintas
64	Sungai Ndrima	Kec. Bawolato	296,12	0,70	Non Lintas
65	Sungai Soguro	Kec. Bawolato	6.362,76	4,50	Non Lintas
66	Sungai Zohu	Kec. Bawolato	1.058,95	3,30	Non Lintas
67	Sungai Sohoya	Kec. Bawolato	13.287,4 2	7,80	Non Lintas

Sumber : BPS, Kabupaten Nias Dalam Angka 2019

Gambar – 1
Peta Administrasi Kabupaten Nias



Sumber : RTRW Kabupaten Nias

Gambar – 2
Peta Posisi Geostrategis Kabupaten Nias



Sumber : RTRW Kabupaten Nias

5. GEOLOGI

Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Nias tidak terlepas/dikontrol oleh aktivitas tektonik di Pulau Nias. Aktivitas tektonik awal pada Oligosen yang menaikkan/mengangkat batuan tektonik dari Kelompok Bancuh ke permukaan, selanjutnya pada Miosen Awal terjadi penurunan atau genang laut dan di atas batuan tektonik diendapkan batuan batuan sedimen Formasi Telematua dan Gomo sampai Pliosen Awal. Pada aktivitas berikutnya, yaitu pada Plio-Plistosen terjadi pengangkatan yang mengakibatkan terangkat/tersesar dan terlipatnya batuan sedimen dari Formasi Lölomatua dan Gomo. Pengangkatan dan pensesaran terus berlanjut hingga sekarang yang ditunjukkan oleh munculnya batu gamping terumbu dari Formasi Gunungsitoli dan terumbu koral yang masih tumbuh.

Secara umum struktur yang terdapat di Kabupaten Nias adalah struktur sesar, yaitu sesar sesar naik, normal dan struktur lipatan baik lipatan antiklin dan singklin. Struktur-struktur tersebut secara umum berarah Barat Laut – Tenggara atau sejajar dengan arah memanjangnya Pulau Nias, beberapa ada yang berarah Utara – Selatan (lihat peta geologi). Struktur aktif yang terdapat di Pulau Nias hanyalah struktur patahan di pantai Barat yang membentuk satu jalur dengan patahan Mentawai. Sedangkan di daratan (tidak dijumpai adanya struktur aktif sebagaimana yang ada di Pulau Sumatera (Sesar Semangko).

6. KEADAAN IKLIM DAN CUACA

Letak Kabupaten Nias dekat dengan garis khatulistiwa, maka curah hujan setiap tahun cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi setiap tahun mengakibatkan kondisi alam Kabupaten Nias sangat lembab dan basah dengan jumlah hari hujan tiap bulan mencapai 30 hari maksimal pada bulan Januari, serta 14 hari minimal pada Februari. Jumlah curah hujan tertinggi pada bulan September sebesar 382 mm. Sedangkan penyinaran matahari tertinggi pada bulan Februari sebesar 74 persen. Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sebesar 5,17 m/det. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Nias bisa mencapai 26,8°C dengan rata-rata minimum 22,4°C dan rata-rata maksimum 33,8°C. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan iklim, curah hujan dan suhu di Kabupaten Nias dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel – 5
Keadaan Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Nias

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	144	30	48
Februari	124	14	74

Maret	199	18	56
April	270	25	43
Mei	336	26	47
Juni	155	21	60
Juli	330	26	60
Agustus	334	24	67
September	382	18	43
Oktober	365	28	41
Nopember	309	29	40
Desember	278	27	40
Jumlah	3226,0	286,0	619,0
Rata-Rata per Bulan	268,83	23,83	51,58

Sumber : BPS, Kabupaten Nias Dalam Angka 2021

Tabel – 6
Keadaan Suhu di Kabupaten Nias

BULAN	SUHU (°C)		
	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
Januari	23,9	34,3	27,1
Februari	23,0	34,6	27,9
Maret	22,0	35,6	27,6
April	23,2	34,4	27,2
Mei	20,5	33,2	26,8
Juni	22,4	33,4	26,8
Juli	22,4	33,2	26,4
Agustus	22,0	33,8	26,7
September	22,0	33,2	26,2
Oktober	22,0	33,8	26,0
Nopember	22,8	33,0	26,3
Desember	22,5	33,2	26,1
Jumlah	268,7	405,7	321,1
Rata-Rata per Bulan	22,4	33,8	26,8

Sumber : - BPS, Kabupaten Nias Dalam Angka 2021

7. PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Nias sebagaimana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Tahun 2014-2034, hutan (lindung, produksi dan rakyat) merupakan penggunaan lahan yang paling dominan yakni seluas 40.190,88 Ha, diikuti oleh penggunaan lahan untuk pertanian (lahan kering, lahan basah dan hortikultura) seluas 23.290,37 Ha sementara penggunaan lahan paling kecil adalah penggunaan lahan

untuk kawasan pariwisata seluas 15,58 Ha. Hasil interpretasi citra satelit yang menghasilkan tutupan lahan wilayah Kabupaten Nias dapat dilihat pada berikut:

Tabel – 7
Penggunaan Lahan Kabupaten Nias

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
[1]	[2]	[3]
1	Hutan	40.190,88
2	Pertanian	23.290,37
3	Perkebunan	12.576,17
4	Gambut	3.967,53
5	Permukiman	2.986,26
6	Sungai	1.019,64
7	Pantai	544,92
8	Perikanan	529,45
9	Kawasan Pertambangan	419,84
10	Kawasan Industri	285,76
11	Mangrove	212,96
12	Kawasan Pariwisata	15,58
Jumlah		86.039,36

Sumber : RTRW Kabupaten Nias 2014-2034

8. JUMLAH PENDUDUK

Kabupaten Nias terdiri dari 10 Kecamatan dan 170 desa dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 154.584 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 75.983 dan perempuan sebanyak 78.601. Perkembangan penduduk Kabupaten Nias kurun waktu 2015 s.d. 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel – 8
Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2015 s.d 2020

Tahun	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki-laki	Perempuan		
2015	74.680	76.398	151.078	177,04
2016	74.662	77.352	152.014	178,14
2017	75.079	78.161	153.240	179,58
2018	75.479	78.417	153.896	180,34
2019	75.511	78.104	153.615	180,02

2020 75.983 78.601 154.584 181,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias data diolah)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk perempuan di Kabupaten Nias dari tahun 2015 s.d. 2020 lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, kondisi ini tergambar oleh nilai *sex ratio* sebagaimana tabel berikut :

Tabel – 9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Nias Tahun 2015 – 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2015	74.680	76.398	151.078	97,76
2016	74.662	77.352	152.014	96,53
2017	75.079	78.161	153.240	96,05
2018	75.479	78.471	153.896	96,18
2019	75.511	78.104	153.615	96,68
2020	75.983	78.601	154.584	96,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (data diolah)

9. KETENAGAKERJAAN

Pembangunan ketenagakerjaan dititik beratkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk 15 tahun keatas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah

mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Nias diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kabupaten Nias yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Tabel – 10
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan utama 2019 dan 2020

Kegiatan Utama	2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Angkatan Kerja	71.154	84,69	74.942	81,16
- Bekerja	70.376	98,91	72.329	96,51
- Pengangguran	778	1,09	2.613	3,49
Bukan Angkatan Kerja	12.865	15,31	17.397	18,84
Jumlah	84.019	100	92.339	100
T P A K (%)	84,79		81,16	
TPT (%)	1,09		3,49	

Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

10. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

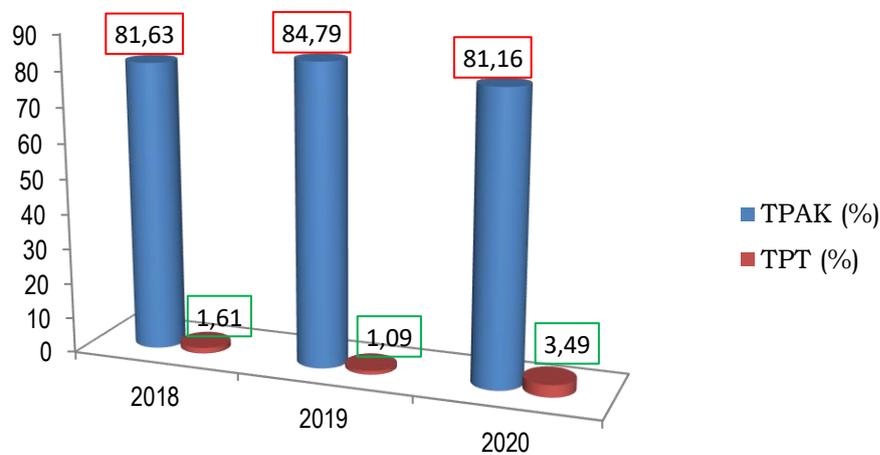
Berdasarkan data dalam buku Kabupaten Nias Dalam Angka 2021 (BPS Kabupaten Nias), jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nias adalah 92.339 orang yang terdiri dari 74,942 jiwa angkatan kerja dan sisanya sebanyak 17.397 jiwa termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja di dalam pasar kerja

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Nias tahun 2019 adalah sebesar 84,79 persen, meningkat pada tahun 2020 yakni sebesar 81,16 persen, yang artinya bahwa pada tahun 2020 sebanyak 81,16 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Nias siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/ mempersiapkan usaha, dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

11. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Selanjutnya indikator ketenagakerjaan lainnya yang sangat penting adalah tingkat pengangguran. Dimana pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Data menunjukkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias selalu mengalami Peningkatan. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 3,49 persen dari total angkatan kerja lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,09 persen.

Grafik – 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2018-2021 di Kabupate Nias



Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

12. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada Tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Nias sebesar 177,04 jiwa/Km² dan tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Nias mengalami peningkatan menjadi sebesar 181,15 jiwa/Km². Dengan wilayah Kabupaten Nias yang masih relatif luas serta terdapat daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, rawa, dan lainnya, mengakibatkan di beberapa daerah tertentu ada kepadatan penduduk dan di sebagian daerah lain merupakan daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah.

Tahun 2020 daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sogaeadu dengan kepadatan penduduknya sebesar 294,81 jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Bawolato merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 128,78 jiwa/Km².

Tabel – 11
Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (Jiwa)	Distribusi Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Idanogawo	28.223	138,65	203,56
2	Bawolato	26.329	204,45	128,78
3	Ulugawo	11.132	65,96	168,77
4	Gido	24.455	110,05	222,22
5	Mau	11.482	61,18	187,68
6	Somolo-molo	6.943	44,85	154,80
7	Hiliduhu	10.276	65,07	157,92
8	Hiliserangkai	13.359	61,91	215,78
9	Botomuzoi	10.221	59,98	170,41
10	Sogae'adu	12.164	41,26	294,81
Kabupaten Nias		154.584	853,34	181,15

Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

13. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Kawasan industri ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Nias adalah industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Idanogawo dengan luas kurang lebih 285,76 Ha.

Pengembangan kawasan perindustrian diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Arah pengelolaan kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut:

- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat.
- Pengembangan industri yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Peningkatan aksesibilitas dari dan ke sentra-sentra produksi dan pusat distribusi barang keluar.
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi.
- Pengembangan industri yang bersifat padat karya dengan mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat.

Selain itu, pengembangan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro dengan tujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias dikembangkan di seluruh kecamatan dengan seluas kurang lebih 60 Ha.

14. KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

Dilihat dari jumlah objek-objek wisata yang dimiliki daerah Kabupaten Nias sebenarnya potensi pembangunan kepariwisataan sangat dimungkinkan dan menguntungkan daerah/masyarakat. Akan tetapi, objek wisata pada umumnya belum dikelola dengan baik.

Potensi objek-objek wisata yang dimiliki Kabupaten Nias ada yang bersifat alam dan budaya/sejarah yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut ini kawasan-kawasan wisata alam yang berpotensi bagi peruntukan pariwisata :

1. Air panas berupa air panas Mbomboaukhu di Desa Oladano Kecamatan Idanogawo.
2. Danau berupa Danau Sowakholo di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato.
3. Pantai meliputi:
 - a. Pantai Nalawo di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato;
 - b. Pantai Onolimbu di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato;
 - c. Pantai Bozihona di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo;
 - d. Pantai Laira di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo; dan
 - e. Pantai Somi di Desa Somi Kecamatan Gido.
4. Air terjun meliputi:
 - a. Air Terjun Mo'ambolo di Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato;
 - b. Air Terjun Sifaoro'asi Ulu Hou di Desa Sifaoro'asi Ulu Hou Kecamatan Bawolato;
 - c. Air Terjun Banua Sibohou di Kecamatan Bawolato;
 - d. Air Terjun Baho di Desa Ladea Kecamatan Gido; dan
 - e. Air Terjun Belauna di Balodano Kecamatan Ma'u.
5. Pulau meliputi Pulau Onolimbu Sebua, Onolimbu Si'ideide, Pulau Soma Sebua, Soma Si'ideide dan Pulau Simambawa di Kecamatan Bawolato termasuk pemancingan dan kegiatan menyelam (*diving*) di sekitar perairan pulau tersebut.
6. Keunikan alam meliputi :
 - a. Kara Sohede di Desa Simanaere Kecamatan Botomuzoi;
 - b. Bawi Sigelo Galua di Desa Lasara Bot Kecamatan Botomuzoi;
 - c. Togi Zangao dan Togi Gurusi di Kecamatan Idanogawo; dan
 - d. Gowe Dua Mendrofa di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai;

Selain itu direncanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Wisata SOZIONA (Somi-Bozihona-Onolimbu-Nalawo) seluas 16 Ha.

15. WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM

Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim Kabupaten Nias termasuk rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).

Agar dapat meminimalisasi kerugian yang lebih besar dari bencana alam, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana alam yang melibatkan seluruh aparat terkait dan masyarakat. Pengertian mitigasi adalah mengurangi atau menghilangkan dampak bencana dimana tindakan yang perlu dilakukan adalah memantau bencana, melokalisasi daerah bencana, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penyebaran informasi daerah bencana serta upaya penanggulangannya. Di wilayah Kabupaten Nias mitigasi bencana alam yang harus menjadi perhatian adalah tanah longsor dan bencana banjir.

A. GEMPA TEKTONIK

Pulau Nias sebagaimana pulau-pulau lain di sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera merupakan bagian terdepan atau terdekat dengan zona subduksi antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Eurasia. Pergerakan lempeng Samudra Hindia dengan kecepatan rata-rata 60 mm per tahun telah menggerakkan Nias secara mendatar dengan kecepatan 2-3 cm per tahun serta pergerakan secara vertikal/naik 8 – 10 cm per tahun sampai saat ini. Tumbukan tersebut juga menyebabkan Pulau Nias bergerak ke arah Pulau Sumatera dengan kecepatan rata-rata 4 cm per tahun. Jarak jalur subduksi terhadap pantai barat Pulau Nias berkisar 80 Km dan jalur subduksi tersebut merupakan pusat-pusat terjadinya gempa bumi.

Dampak dari tumbukan antara dua lempeng tersebut juga membentuk patahan besar (megathrust) sepanjang pantai Barat yang menjalur dari Enggano – Mentawai – Nias – Simeuleu - Andaman/Nikobar (India) - Arakan Yoma (Myanmar) dan berlanjut ke jalur megathrust Himalaya. Jalur-jalur patahan tersebut menjadi tempat pelepasan-pelepasan energi dan selanjutnya juga menjadi tempat jalur gempa. Beberapa peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di sekitar Pulau Nias sejak Tahun 1843 sampai Tahun 2008 menurut Supartoyo & Suroño, 2008 dapat dilihat pada Tabel 2-5. Secara umum peristiwa gempa bumi tersebut diikuti oleh bencana tsunami.

Tabel – 12
Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Nias

No	Lokasi Gempa	Tanggal	Pusat Gempa	Kedalaman (KM)	MAG	Skala	Kerusakan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Gunungsitoli - Barus Tsunami	05/01/1843	-	-	-	VII - VIII	Tsunami menyebabkan beberapa kapal rusak. Getaran kuat terasa di Gunungsitoli dan Barus
2.	Tapanuli - Sibolga	16/2/1861		-	-	VIII - IX	50 org meninggal. Beberapa bangunan roboh. Tsunami di Singkil, P.Nias, P.Batu dan Tello.
3.	P. Batu (Tsunami)	28/12/1935	0,30LS - 97,90BT		8,1 Ms	VII - VIII	P.Bola dan Sigata terguncang hebat. Beberapa rumah roboh di Sibolga. Di Padang terjadi retakan dinding rumah penduduk

4.	Nangro Aceh Darusalam (Tsunami)	26/12/2004 07:58'53' WIB	3,3070LU - 95,9470 BT	30 USGS	9 Mw	VII	Tsunami melanda Kec. Afulu, Sirombu, Lahewa, Mandrehe, Hinako, Asu, Imana Bawa dan Bagi.
5.	Nias (Tsunami)	28/03/2005	2,070 LU - 97, 010 BT	30 USGS	8,7 Mw	VIII	Kerusakan melanda seluruh Kepulauan Nias, Daerah Singkil, Meulaboh, dan Sibolga. Lebih dari 1.000 jiwa meninggal. Terjadi retakan tanah, likuifaksi dan sekitar 65 % bangunan roboh di Gunungsitoli. Terjadi tsunami di Pantai Lagundri, Sirombu dan Lahewa run up + 170 cm
6.	Gunungsitoli	23/01/2008 00:14:56 WIB	1,160 LU - 97,420 BT	10 USGS	6,2 SR	VI	1 org meninggal, 5 org luka-luka dan beberapa bangunan rusak di Gunungsitoli

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias

Pulau Nias yang berhadapan langsung dengan jalur subduksi dan aktivitasnya terus berlangsung menyebabkan Nias berada pada posisi tektonik yang labil, dimana daratannya berpotensi besar untuk selalu bergoyang sekalipun sumber gempa tidak berada di wilayah Pulau Nias, seperti peristiwa gempa bumi pada 26 Desember 2004 yang juga dirasakan guncangannya di Nias sekalipun pusat gempa di wilayah Aceh. Hasil survey geofisika juga menunjukkan Nias berada pada jalur anomali negatif, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh perbedaan masa rapat batuan (berat jenis) antara Pulau Nias dengan Pulau Sumatera. Dimana berat jenis batuan di Pulau Nias jauh lebih kecil dibandingkan dengan berat jenis batuan di Pulau Sumatera. Untuk menyeimbangkan gaya berat bumi antara Pulau Nias dengan Pulau Sumatera, maka secara alamiah Pulau Nias akan mengangkat dirinya. Dalam proses pengangkatan tersebut akan menyebabkan guncangan-guncangan gempa dengan kekuatan getaran yang dapat atau tidak dirasakan oleh manusia.

Kecenderungan Pulau Nias yang terus bergerak naik akan diikuti adanya penurunan di sisi lainnya, yaitu di sisi timur Pulau Nias (Laut Indonesia) yang membentuk patahan graben (cekungan Nias) dan patahan-patahan di dasar laut tersebut dapat menimbulkan gempa saat terjadi pergerakan. Pada peta seismisitas terlihat adanya kejadian gempa yang bersumber dari laut di pantai timur Pulau Nias. Gempa bumi bersumber di darat, keterjadian di daratan bagian timur tidak sesering sebagaimana yang terjadi di daratan bagian barat, secara umum gempanya berkekuatan < 3,9 SR dengan kedalaman dangkal, namun pernah juga terjadi dengan kekuatan > 5 SR sebagaimana kejadian gempa 28 Maret 2008 di Pulau Nias.

Data kegempaan di empat wilayah Kabupaten/Kota Pulau Nias (Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk dan Kota Gunungsitoli) untuk kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Tahun 2005 s.d. 2010) memperlihatkan adanya aktivitas gempa yang cukup tinggi. Pusat-pusat gempa terutama terjadi di

sepanjang pantai (barat-utara-timur) dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya dangkal (< 60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0 – 3,9 SR, sebagian berkekuatan 4 – 4,9 dan hanya beberapa berkekuatan 5 – 9,9 SR. Skala Intensitas gempa umumnya berkisar VI – IX MMI (*Modified Mercalli Intensity*) untuk kekuatan gempa 6 – 9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh adanya guncangan tanah (*ground shaking*), geseran tanah (*ground faulting*) dan gelombang pasang (tsunami). Besarnya guncangan saat terjadi gempa bumi dikontrol oleh: magnitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Guncangan gempa pada daerah yang disusun oleh batuan yang bersifat tidak kompak/bersifat lepas dengan kedalaman gempa dangkal dapat dirasakan sangat kuat guncangannya sekalipun kekuatan gempa tidak tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penggandaan gelombang (*seismic amplification*) ketika gelombang melalui media yang tidak padu dan juga dapat menyebabkan terjadinya pembuburan/lumpur pasir (*liquefaction*) yang akan mengurangi kemampuan tanah/batuan menahan beban di atasnya, sehingga terjadi amblesan saat guncangan gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka gelombang yang melalui batuan yang padat (masa jenis besar) akan memberikan guncangan yang lebih rendah dibanding bersifat tidak kompak (densitas kecil). Bahaya lain yang dapat ditimbulkan oleh guncangan tanah akibat gempa adalah peretakan tanah dan tanah longsor (*landslide*). Intensitas guncangan juga dikontrol oleh intensitas struktur geologi, dimana struktur geologi baik berupa patahan atau rekangan yang dapat terbentuk akibat adanya gempa juga akan menjadi zona-zona lemah bagi perjalanan gelombang bahkan bisa menjadi tempat pelepasan energi atau zona-zona gempa yang baru.

Peristiwa gempa tanggal 28 Maret 2008 menyebabkan kehancuran yang signifikan di wilayah Kabupaten Nias. Kehancuran tersebut terutama disebabkan oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (*endapan aluvial, koral*) mengalami guncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dan dengan kondisi/kualitas bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana gempa di wilayah Kabupaten Nias tergolong tinggi.

B. KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabumi adalah sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan (tabel 2-5). Terdapat dua tingkat kerawanan bencana gempabumi, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tingkat kerawanan tinggi dan tingkat kerawanan sedang yang menyebar sedikit lebih dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi (lihat peta kawasan rawan bencana gempa. Data

kegempaan yang digunakan dalam menganalisa tingkat kerawanan bencana gempa adalah data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Tingkat kerawanan dominan dipengaruhi oleh faktor batuan terutama sifat fisik batuan yang berpotensi menggandakan guncangan saat terjadi gempa, yaitu batuan yang bersifat lepas dari endapan aluvial (Qa) dan batuan sedimen dari batugamping terumbu dari Formasi Gunungsitoli (QTg).

C. KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA TINGKAT KERAWANAN TINGGI

Kawasan ini dipengaruhi oleh dua sampai tiga faktor yang saling melemahkan, yaitu adanya intensitas gempa yang tergolong tinggi berada pada batuan yang bersifat tidak kompak dan di beberapa tempat berada pada potensi landaian tsunami yang dapat cukup merusak. Adanya batuan yang bersifat lebih lepas terutama dari endapan aluvial (Qa) dan terumbu karang dari Formasi Gunungsitoli (QTg) dapat mengakibatkan guncangan yang lebih kuat bila terjadi gempa dibanding di batuan yang sedikit lebih kompak (Formasi Gomo/Tmpg dan Formasi Lolomatua/Tml) sehingga tingkat bahaya yang berpotensi bencana juga lebih tinggi. Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato. Kawasan lainnya terutama di sepanjang jalur struktur patahan yang merupakan sumber terjadinya gempabumi, terutama pada kawasan dengan radius < 500 m dari jalur patahan. Jalur patahan tersebut terutama berada di kawasan rawan gempa sedang, dimana jalur tersebut merupakan bidang-bidang lemah yang sangat rentan terhadap guncangan bila terjadi gempabumi.

D. KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA TINGKAT KERAWANAN SEDANG

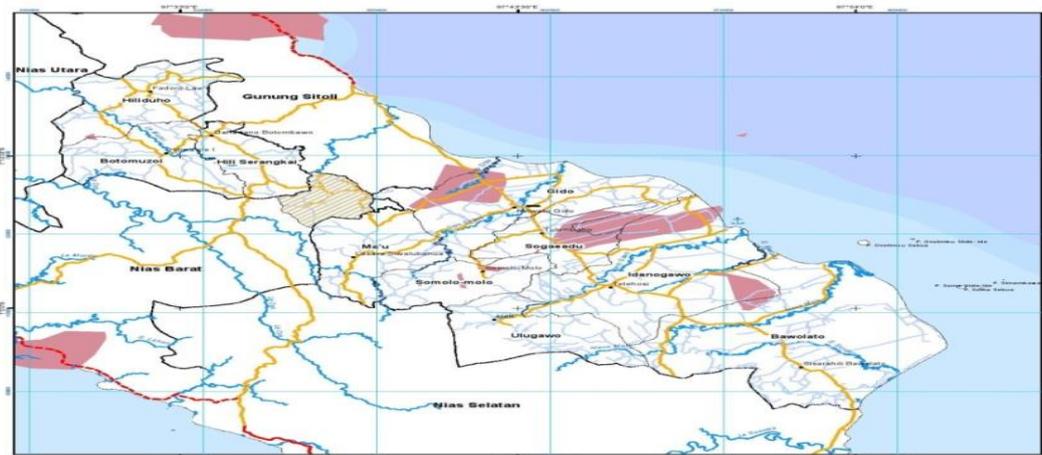
Tingkat kerentanan pada kawasan ini dipengaruhi oleh faktor intensitas gempa yang tergolong tinggi namun berada di batuan yang tingkat kekerasannya tergolong menengah sehingga tingkat guncangan saat terjadi gempabumi akan juga berkurang oleh sifat batuan yang sedemikian. Terutama menyebar pada kawasan yang disusun oleh batuan sedimen dari Formasi Gomo (Tmpg) dan Formasi Lolomatua (Tml). Kawasan ini juga termasuk kawasan dengan radius > 500 m dari jalur patahan yang berpotensi sebagai sumber gempa. Kawasan ini menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi, Hiliserangkai, Ulugawo, Somolomolo, Ma'u dan menyebar di sebagian barat Kecamatan Idanogawo, Gido dan Bawolato.

Data kegempaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat dan timur) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Karena selain dipengaruhi sifat fisik batuan, tingkat guncangan yang mengakibatkan kerusakan juga dikontrol oleh kekuatan gempa, jarak dari pusat atau sumber gempa serta kedalamannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa dengan tingkat kerawanan tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Kalaupun akan difungsikan sebagai kawasan budi daya, maka harus dilakukan analisa resiko bencana terlebih dahulu dan selanjutnya kegiatan

pembangunannya harus mengikuti prasyarat. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang difungsikan sebagai kawasan budi daya.

Gambar – 3
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



E. KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, keberadaan bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat kerawanan tinggi sampai sedang terutama pada batuan sedimen dari Formasi Lolomatua (Tml) dengan curah hujan tergolong tinggi untuk memicu terjadinya longsor. Sebaran dari kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah lebih luas dibandingkan yang lain, diikuti oleh yang kerawanannya sedang. Sedangkan yang memiliki kerawanan tinggi sangat terbatas. Artinya secara umum Kabupaten Nias memiliki potensi longsor yang tidak tergolong tinggi.

Tabel - 13
Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Nias

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan Lereng	1. Kemiringan 0 % – 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	3		15
	3. Kemiringan 25 % - 40%	4		20
	4. Kemiringan > 40 %	5		25
Batuan	1. Kode : Qa, QTg	1	4	4
	2. Kode : Tml, Tmpg	5		20
	3. Kode : Tomm	3		12
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	2	4	8
	2. 3000 - 3500 mm/thn	3		12

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	3. > 3500 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	12
	2. 100 - 500 m	3		9
	3. > 500 m	1		3

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias

KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN TINGGI

Secarah alamiah kawasan ini terutama dikontrol oleh batuan yang secara stratigrafi terjadi perselingan antara batulempung dengan batupasir dari Formasi Lolomatua (Tml) yang menyebar dengan kemiringan dominan antara 25 % - 40 % dan setempat dengan kemiringan > 40 %. Pada kawasan tersebut terdapat curah hujan yang tergolong tinggi (3000 – 3500 mm/thn) yang dapat mengakibatkan longsor. Kawasan dengan kerentanan tinggi ini sangat terbatas, terutama yang ada di Kecamatan Ulugawo khususnya yang berada dibarat daya mengarah ke utara, sebagian di Somolo-molo dan di Kecamatan Ma'u. Kawasan lainnya berada di sekitar jalur patahan yang merupakan bidang lemah, terutama di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi, Hiliserangkai dan kecamatan lainnya di Kabupaten Nias. Pada saat musim hujan batupasir yang berselingan dengan batulempung menyerap air namun tidak mampu diteruskan oleh batulempung yang bersifat impermeabel, sehingga beban atau volumenya semakin meningkat mengganggu keseimbangan lereng dan pada akhirnya terjadi longsor terutama di tebing-tebing jalan atau sungai. Curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan batuan menjadi tanah dengan ketebalan yang signifikan. Keberadaan tanah pada lereng yang miring dengan curah hujan yang tinggi juga memudahkan terjadi longsor.

KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN SEDANG

Seperti hanya kawasan kerawanan tinggi, kawasan ini juga masih dikontrol kondisi stratigrafi batuan sedimen dari Formasi Lolomatua (Tml), namun sebarannya membentuk kemiringan yang lebih rendah atau dominan kemiringan 15 % - 25 % sebagian kecil dengan kemiringan 25 % - 40 %. Curah hujan masih sebagai pemicu terjadinya longsor dengan jumlah 3000 – 3500 mm/thn. Sebaran dari kawasan dengan kerawanan sedang ini lebih luas dibanding dengan kawasan yang kerawanannya tinggi. Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan Ulugawo, Somolo-molo, Ma'u dan bagian barat dari Kecamatan Idanogawo, Gido dan Bawolato.

KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN RENDAH

Potensi longsor dikawasan ini lebih rendah, terutama dikarenakan curah hujan di kawasan ini tergolong sedang (2500-3000 mm/thn) sekalipun memiliki kemiringan lereng 15% - 25 %. Kawasan menyebar terbatas dan terutama menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi dan Hiliserangkai.

KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN SANGAT RENDAH

Potensi longsor di kawasan ini dapat dikatakan tidak terjadi. Karena secara alami wilayahnya memiliki kemiringan lereng $< 15\%$ sekalipun sebagian memiliki curah hujan 3000 – 3500 mm/thn dan sebagian 2000 – 2500 mm/thn. Kawasan ini menyebar luas dibandingkan tingkat kerawanan lainnya. Di Kecamatan Bawolato, Gido dan Idanogawo sekalipun curah hujan tergolong tinggi, namun tidak berpotensi longsor karena memiliki kemiringan lereng $< 8\%$. Sedangkan di Kecamatan Botomuzoi dan Hiliduhu memiliki kemiringan lereng antara $8\% - 15\%$ juga dengan curah hujan yang tergolong sedang untuk memicu terjadinya longsor.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung terbatas. Sedangkan kawasan dengan kerentanan sedang - sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat.

F. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

Kabupaten Nias yang terdiri dari DAS Muzoi, DAS Gido Si'ite, DAS Gido Sebua, DAS Idano Gawo, DAS Idano Mola, DAS Suani, DAS Nalawo dan DAS Hou dengan curah hujan sepanjang tahun sekitar 3000 mm/tahun mengakibatkan daerah-daerah hilir sungai tersebut menjadi langganan banjir. Adanya perubahan tataguna lahan pada kawasan hulu sungai mengakibatkan resiko rawan banjir di Kabupaten Nias sulit diatasi. Berdasarkan yang diperoleh dilapangan, adapun kawasan yang menjadi daerah rawan banjir adalah Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae'adu, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Botomuzoi. Terutama pada sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo, Sungai Gido Sebua dan Sungai Mola.

KAWASAN RAWAN GELOMBANG TSUNAMI

Selain kejadian bencana alam yang dominan di Kabupaten Nias, maka beberapa proses geologi yang dapat menimbulkan bencana di wilayah Kabupaten Nias, selain gempa bumi adalah gelombang tsunami. Oleh karena itu, agar dapat meminimalisasi kerugian yang lebih besar, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana geologi yang melibatkan seluruh aparat terkait dan masyarakat. Di wilayah Kabupaten Nias mitigasi bencana geologi yang harus menjadi perhatian adalah gempa bumi dan gelombang tsunami.

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah (lihat peta kawasan rawan bencana tsunami). Kawasan rawan tsunami hanya terjadi pada kawasan sekitar pantai, sehingga hanya tiga kecamatan yang berada pada kawasan rawan tsunami

dengan tingkat kerawanan tinggi sampai sedang, yaitu di kecamatan Gido, Sogae'adu, Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN TINGGI

Kawasan ini berada persis di sepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi resiko pada kawasan ini terutama akibat energi gelombang serta limpasan dari *run up* yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai saat terjadi tsunami.

KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN SEDANG

Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi *run up* mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.

KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN RENDAH

Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi *rup up* saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh sangat rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat.

Gambar – 4
Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : RTRW Kabupaten Nias

16. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya dan olahraga.

KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

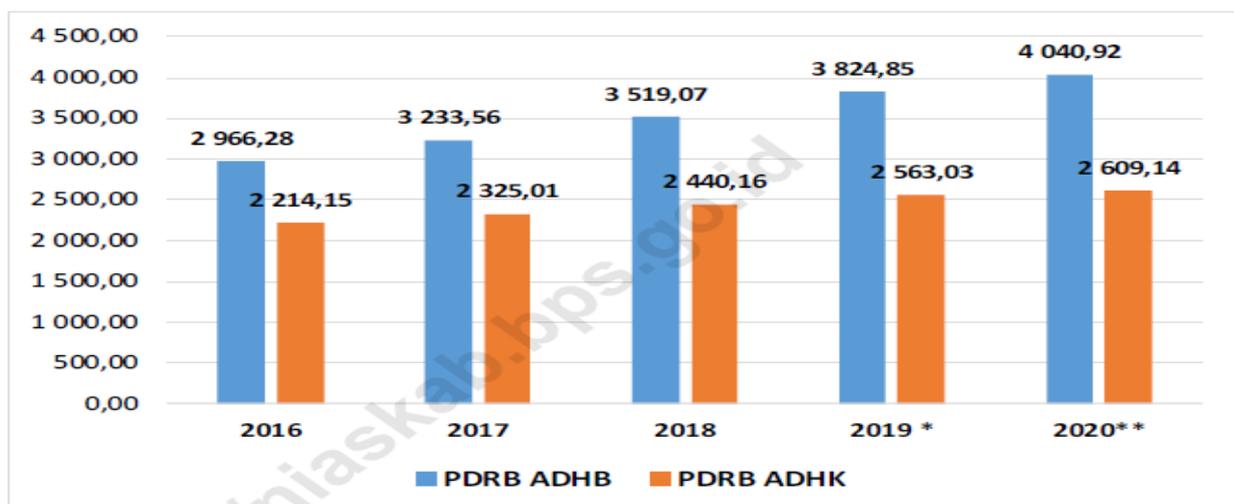
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan dan struktur ekonomi suatu daerah dalam suatu kurun waktu. Pada tahun 2020 PDRB dasar harga berlaku Kabupaten Nias mengalami peningkatan. pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.824,85 miliar rupiah meningkat menjadi Rp. 4.040,92 miliar rupiah. Begitu juga halnya dengan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.563,03 miliar rupiah meningkat menjadi Rp. 2.609,14 miliar rupiah.

Tiga sektor yang berkontribusi besar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Nias tahun 2020 adalah sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 1937,64 miliar rupiah, konstruksi sebesar Rp. 446,01 miliar rupiah serta pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 361,42 miliar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 1.317,16 miliar rupiah, Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 317,19 miliar rupiah serta Konstruksi sebesar Rp. 276,56 miliar rupiah

Grafik – 2

Produk Domestik Regional Bruto Nias (miliar rupiah), ADHB dan ADHK 2016-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

Perkembangan PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel – 14
PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -20120
(Dalam Miliaran Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 417,87	1 550,82	1 687,28	1 807,38	1 937,64
2	Pertambangan dan Penggalian	268,39	290,55	310,30	340,62	361,42
3	Industri Pengolahan	6,45	6,98	7,53	8,17	8,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	2,86	3,14	3,47	3,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	0,0
6	Konstruksi	370,90	395,08	417,51	454,01	446,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	248,42	274,17	302,46	336,33	365,82
8	Transportasi dan Pergudangan	48,89	53,15	57,12	61,74	65,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,36	58,20	63,37	68,92	74,81
10	Informasi dan Komunikasi	6,29	7,02	7,85	8,72	9,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	42,28	46,63	51,17	55,66	59,76
12	Real Estate	62,03	68,57	74,47	80,12	85,01
13	Jasa Perusahaan	2,19	2,49	2,83	3,15	3,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,03	402,09	452,47	507,79	524,07
15	Jasa Pendidikan	41,25	44,66	48,42	52,47	55,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,58	23,98	26,29	28,89	31,86
17	Jasa lainnya	5,78	6,32	6,88	7,43	7,78
Jumlah		2 966,28	3 233,56	3 519,07	3 824,85	4 040,92

Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

Selanjutnya PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel – 15
PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020
(Dalam Miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 105,19	1 161,75	1 219,13	1 272,87	1 317,16
2	Pertambangan dan Penggalian	194,99	206,00	216,16	228,37	233,62
3	Industri Pengolahan	4,73	4,95	5,15	5,39	5,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,13	2,24	2,35	2,48	2,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	0,00
6	Konstruksi	258,04	269,26	278,21	292,28	276,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	176,83	187,09	198,18	211,48	218,42
8	Transportasi dan Pergudangan	33,02	34,03	34,88	36,15	36,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,75	39,93	42,32	44,98	46,66
10	Informasi dan Komunikasi	5,41	5,69	6,13	6,58	7,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,33	30,66	32,22	33,88	35,51
12	Real Estate	43,65	45,01	46,61	48,21	49,41
13	Jasa Perusahaan	1,49	1,58	1,67	1,76	1,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269,70	282,59	300,52	319,40	317,19
15	Jasa Pendidikan	30,55	31,92	33,33	34,78	36,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,81	17,55	18,44	19,41	20,09
17	Jasa lainnya	4,53	4,74	4,86	5,03	5,12
Jumlah		2 214,15	2 325,01	2 440,16	2 563,03	2 609,14

Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang menyumbang pada pembentukan nilai tambah menurut lapangan usaha sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel – 16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 417,87	1 550,82	1 687,28	1 807,38	1 937,64
B	Pertambangan dan Penggalian	268,39	290,55	310,30	340,62	361,42
C	Industri Pengolahan	6,45	6,98	7,53	8,17	8,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	2,86	3,14	3,47	3,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	0,00
F	Konstruksi	370,90	395,08	417,51	454,01	446,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	248,42	274,17	302,46	336,33	365,82
H	Transportasi dan Pergudangan	48,89	53,15	57,12	61,74	65,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,36	58,20	63,37	68,92	74,81
J	Informasi dan Komunikasi	6,29	7,02	7,85	8,72	9,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42,28	46,63	51,17	55,66	59,76
L	Real Estat	62,03	68,57	74,47	80,12	85,01
M,N	Jasa Perusahaan	2,19	2,49	2,83	3,15	3,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,03	402,09	452,47	507,79	524,07
P	Jasa Pendidikan	41,25	44,66	48,42	52,47	55,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,58	23,98	26,29	28,89	31,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,78	6,32	6,88	7,43	7,78
Produk Domestik Regional Bruto		2 966,283	233,563	519,073	824,85	4 040,92

Sumber : BPS, Kabupaten Nias dalam Angka 2021



BAB II

PERENCANAAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2021**

2.1 VISI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap ke-tiga Kabupaten Nias Tahun 2005–2025. Pada tahap ini perlu adanya perhatian lebih dan tidak hanya menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*).

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis, serta visi dan misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2016 – 2021, yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN NIAS YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Rumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana sebagai berikut :



2.2 MISI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nias jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi

pembangunan. Untuk mewujudkan visi di atas yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kabupaten Nias dalam lima tahun terakhir, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Nias jangka menengah Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:



1. Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan.

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas merupakan kebutuhan prioritas dalam mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Misi ini juga dimaksudkan untuk membuka keterisolan wilayah, pengembangan kawasan strategis, penataan kawasan ibu kota, pembangunan kantor pemerintahan, pengembangan irigasi, penyediaan energi/listrik dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, rencana tata ruang wilayah serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana.

2. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.

Misi ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang sehat, cerdas dan profesional serta berkarakter mulia sehingga terwujud sumberdaya manusia yang berdaya saing sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Dalam misi ini memberikan perhatian pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.

3. Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli

masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Dalam misi ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan akan diberikan perhatian pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan potensi pariwisata, peningkatan permodalan bagi koperasi dan UMKM, pemberdayaan pengrajin dan industri kecil dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi

4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan professional.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Aparat birokrasi menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memiliki kompetensi di bidangnya (profesional). Untuk menjalankan misi ini diberi perhatian pada penataan organisasi perangkat daerah, perbaikan manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, penerapan sistem informasi berbasis IT, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Secara khusus dalam misi ini pada pemberdayaan dan penguatan desa, terutama peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengawalan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan Desa, dan peningkatan sumber – sumber pendapatan Desa.

5. Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, aman, tenteram, dan damai yang didukung oleh berkembangnya nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal) sebagai nilai-nilai baru yang positif dan produktif. Di samping itu dalam misi ini juga perlu dibangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, politik yang sehat, demokratis, dan penguatan peran masyarakat sipil serta, peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Tabel – 17

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Sasaran berdasarkan Visi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2016-2021.



VISI
**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NIAS YANG MAJU,
 MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
2	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
			Meningkatnya peran serta pemuda dan pembinaan pemasyarakatan olahraga
3	Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah
			Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah
			Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan
		Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah
4	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima
5	Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang demokratis dan religius Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional

Sumber : RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias untuk Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 yakni sebagai berikut :

Tabel – 18
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%
					2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
					3	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%
					4	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	%
					5	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	%
				6	Persentase Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup			

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
					7	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	
2	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	8	Rata-rata Lama Sekolah	%	
					9	Harapan Lama Sekolah	%	
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Angka Harapan Hidup	%	
					11	Angka Kematian Ibu	%	
					12	Angka Kematian Bayi	%	
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	
3	Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	
					Indeks Gini	15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah	%
			Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah			16	PDRB Sektor pariwisata (Juta Rupiah) Sebagai Bagian dari Sektor Jasa Lainnya	%
						17	Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	%
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan			18	Jumlah produksi perikanan (Ton)	%
			Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya		Angka Kemiskinan	Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	19	Tingkat Pertumbuhan Investasi

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		saing daerah		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten	20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%
4	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	21	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/ Predikat
				Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini
				Meningkatnya pelayanan publik yang prima	23	Indeks Kepuasan Masyarakat	%
5	Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Persentase penurunan konflik SARA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang demokratis dan religius	24	Persentase Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	%
				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	25	Persentase Penegakan Perda	%
					26	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	%
					27	Persentase Pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nias 2016-2021 adalah tekad dan janji untuk memberikan pelayanan dan pembangunan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas. Perjanjian kinerja juga merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut maka fokus dalam mengarahkan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terlaksana.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Tahun 2021 yang mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016–2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam matriks di bawah ini yang memuat sasaran strategis RPJMD, indikator kinerja yang berorientasi hasil dan target-target yang terukur sesuai format lampiran perjanjian kinerja Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel – 19

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN NIAS YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA FISIK WILAYAH SECARA MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah secara Merata dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson	1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	%	91
						2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	99,72
						3	Persentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik	%	100
						4	Persentase Rumah Tangga yang terakses Air Bersih	%	97,24

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
						5	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	%	71,5
				2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	6	Persentase Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	100
						7	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	100
2	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN DAYA SAING MASYARAKAT	Mewujudkan Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat yang Tinggi dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3	Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,50
						9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,50
				4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	10	Angka Harapan Hidup	Tahun	70
						11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	5
						12	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	12
				5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90
3	MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6	Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,25
						15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah	%	4,35
				7	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Kebudayaan Daerah	16	PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rupiah) Sebagai Bagian dari Sektor Jasa Lainnya	%	8783,7
						17	Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	%	80
				8	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	18	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1230
		Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing	Angka Kemiskinan	9	Meningkatnya Investasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	19	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	5

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		Daerah		10	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Profesional dan Kompeten	20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1
4	MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN BIROKRASI YANG MELAYANI DAN PROFESIONAL.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/ Predikat	B
				12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
				13	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	23	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80
5	MENATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, DAN TAAT HUKUM	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Taat Hukum.	Persentase Penanganan Potensi Konflik menjadi Konflik	13	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Demokratis dan Religius	24	Persentase Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	%	100
				15	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	25	Persentase Penegakan Perda	%	100
					26	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	%	5:10.000	
					27	Persentase Pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya	%	100	

Sumber data : Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Tahun 2021

2.5 KESELARASAN MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu faktor

penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk menunjang Visi dan Misi dimaksud. Keselarasan antara program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel – 20
Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Kesejahteraan Wilayah/Indeks Williamson	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Rasio Jalan yang dibangun	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Nias
								Rasio Jembatan yang dibangun	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias
								Persentase desa terisolir (yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda-4) yang ditangani	Peningkatan Persentase Desa yang dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Desa terisolir pada Kabupaten Nias
								Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias
					Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Rasio jalan yang ditingkatkan	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias
								Rasio Jembatan yang ditingkatkan	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias
					Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
								Rasio Jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias
					Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Sistem informasi/ database jalan dan jembatan	Meningkatkan Sistem informasi/ database jalan dan jembatan	Tersedianya Sistem informasi/ database jalan dan jembatan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	Peningkatan persediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
					Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Peningkatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan Baik di Kabupaten Nias	Meningkatnya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan Baik di Kabupaten Nias	Persentase panjang turap/ talud/ bronjong	Peningkatan pembangunan turap/ talud/ bronjong	Terlaksananya Pembangunan turap/ talud/ bronjong Jalan di Kabupaten Nias
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi	Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Nias
				Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan SDA	Meningkatkan drainase di wilayah pemukiman padat penduduk dan pengamanan infrastruktur publik	Meningkatnya Pembangunan Drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Kapasitas Tampung Air	Peningkatan Kapasitas Tampung Air	Tersedianya Tampung Air
				Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)	Meningkatkan persentase Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)	Tersedianya Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani	Peningkatan Persentase sarana dan prasarana yang ditangani	Tersedianya sarana dan prasarana yang ditangani
				Rasio Elektrifikasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatkan Penyediaan infrastruktur listrik di rumah tangga yang belum dialiri listrik	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik	Tingkat pencapaian pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Peningkatan Capaian pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Adanya pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Penuntasan pembangunan kantor pemerintah dan pendukung pemerintahan	Terselenggaranya pembangunan kantor pemerintah dan pendukung pemerintahan	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Presentase sarana dan prasarana kesamaan lalu lintas	Peningkatan sarana dan prasarana keamanan keselamatan lalu lintas	Tersedianya sarana dan prasarana keamanan keselamatan lalu lintas
					Program Peningkatan Kelelakan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Kelelakan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelelakan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan terminal	Peningkatan ketersediaan terminal	Tersedianya terminal
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Rasio trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik	Peningkatan Rasio trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik	Terselenggaranya trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik
					Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Presentase angkutan umum yang laik operasi di jalan raya	Peningkatan angkutan umum yang laik operasi di jalan raya	Tersedianya angkutan umum yang laik operasi di jalan raya
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatkan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Meningkatkan Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Adanya fasilitas keselamatan jalan
								Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Adanya partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
								Persentase penanganan Korban Bencana Alam	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana Alam	Adanya penanganan Korban Bencana Alam
								Protap Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan Protap Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya Protap Penanggulangan Bencana Daerah
								Rencana Aksi Pengurangan	Meningkatkan Rencana Aksi Pengurangan	Adanya Rencana Aksi Pengurangan Resiko

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
					Program Kedarifatan dan Logistik	Peningkatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya Kedarifatan dan Logistik Pasca Bencana	Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Peningkatan Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Terlaksananya Bantuan kepada Masyarakat
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Peningkatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya tempat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Peningkatan Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Terlaksananya Bantuan kepada Masyarakat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Meningkatnya fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Peningkatan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Terlaksananya bangunan ber-IMB per satuan bangunan
					Program Perencanaan Tata Ruang	Percepatan penyusunan dokumen rencana rinci pemanfaatan ruang	Adanya Percepatan penyusunan dokumen rencana rinci pemanfaatan ruang			
					Program Pengembangan Perumahan	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Tersedianya rumah layak huni untuk rakyat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan	Peningkatan Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan	Adanya bantuan rumah tidak layak huni yang diberikan
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah	Peningkatan Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah	Terlayannya Rumah Tangga dalam penanganan sampah
					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman di Kab. Nias	Meningkatnya Lingkungan Sehat Permukiman di Kab. Nias	Persentase jalan setapak dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase jalan setapak dalam kondisi baik	Tersedianya jalan setapak dalam kondisi baik
								Persentase drainase dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase drainase dalam kondisi baik	Tersedianya drainase dalam kondisi baik
								Persentase tembok penahan dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase tembok penahan dalam kondisi baik	Tersedianya tembok penahan dalam kondisi baik
				Persentase Luas Kawasan Kumuh	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Tersedianya usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
								Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Peningkatan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Adanya penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD di Wilayah Kabupaten Nias	Peningkatan jumlah anak yang mengikuti Pendidikan PAUD	APK PAUD	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	danya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
				Harapan Lama Sekolah	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP)	Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Paket B	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Paket B	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Angka Kelulusan SD/MI	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
								Angka Kelulusan SMP/MTS	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Cakupan sekolah yang melaksanakan KBM berbasis Literasi Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
					Meningkatkan sarana prasarana, mutu dan keunggulan pendidikan	Tersedianya sarana prasarana, mutu dan keunggulan pendidikan		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
								Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Mutu Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya persentase Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik/tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	Peningkatan tenaga pendidik/tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	Tersedianya tenaga pendidik/tenaga kependidikan bersertifikat pendidik
					Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui formasi PNSD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Adanya Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui formasi PNSD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Rasio guru terhadap murid SD	Rasio guru terhadap murid SD	Rasio guru terhadap murid SD
								Rasio guru terhadap murid SMP	Rasio guru terhadap murid SMP	Rasio guru terhadap murid SMP
								Persentase penyediaan kebutuhan Guru Bantu Daerah (GBD)	Persentase penyediaan kebutuhan Guru Bantu Daerah (GBD)	Tersedianya kebutuhan Guru Bantu Daerah (GBD)
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Mahasiswa/i dari Kabupaten Nias yang kuliah di PTN/ PTS Berakreditasi "A" dan PTS Swasta milik Pemkab Nias Berakreditasi "B"	Meningkatnya Rasio Mahasiswa/i dari Kabupaten Nias yang kuliah di PTN/ PTS Berakreditasi "A" dan PTS Swasta milik Pemkab Nias Berakreditasi "B" tiap tahunnya	Persentase penyediaan kebutuhan bagi penerima beasiswa berprestasi yang kuliah di PTN/PTS berakreditasi A	Peningkatan penyediaan kebutuhan bagi penerima beasiswa berprestasi yang kuliah di PTN/PTS berakreditasi A	Adanya kebutuhan bagi penerima beasiswa berprestasi yang kuliah di PTN/PTS berakreditasi A
								Persentase penyediaan kebutuhan bagi Penerima Beasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta Milik Pemkab Nias	Peningkatan penyediaan kebutuhan bagi Penerima Beasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta Milik Pemkab Nias	Adanya kebutuhan bagi Penerima Beasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta Milik Pemkab Nias
					Program Pendidikan Non Formal	Meningkatkan Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	Peningkatan angka melek huruf	Persentase angka melek huruf
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Tingkat capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Tingkat capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
								Tingkat capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Tingkat capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
								Tingkat capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Tingkat capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
								Tingkat capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Tingkat capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Tingkat capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup
								Tingkat capaian peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi	Tingkat capaian peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi	Tingkat capaian peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi
								Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
								Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi buruk
								Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah daerah	Peningkatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah daerah	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah daerah
								Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	Peningkatan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN				
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
									keluarga miskin			
								Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Peningkatan Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan		
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes	Meningkatkan kapasitas dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan kapasitas dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Tingkat capaian peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap	Peningkatan capaian peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap	Tingkat capaian peningkatan status Puskesmas Rawat Inap		
										Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Adanya Puskesmas yang terakreditasi
										Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio dokter per 100.000 penduduk		
										Rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio perawat per 100.000 penduduk
										Rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio bidan per 100.000 penduduk
										Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk	Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk	Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk
										Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk
										Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk
					Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	Persentase masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	Adanya masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah		
										Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan		
					Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Sehat	Meningkatkan pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		
										Tingkat pengawasan makanan dan minuman	Peningkatan pengawasan makanan dan minuman	Tingkat pengawasan makanan dan minuman
										Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	Peningkatan Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat
										Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif
										Persentase depot air minum yang diperiksa	Persentase depot air minum yang diperiksa	Persentase depot air minum yang diperiksa
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan		
										Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar	Peningkatan Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar	Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar
										Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD	Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD	Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD
										Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
								Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
								Cakupan kesembuhan TB paru	Cakupan kesembuhan TB paru	Cakupan kesembuhan TB paru
								Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk
								Cakupan penderita DBD yang ditangani	Peningkatan Cakupan penderita DBD yang ditangani	Cakupan penderita DBD yang ditangani
								Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk	Peningkatan Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk	Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk
								Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Biniu) Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Biniu) Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Biniu) Penyakit Tidak Menular
								Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Peningkatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
								Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Peningkatan penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
								Persentase penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Peningkatan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
								Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Menurunkan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
								Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menurunkan Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Peningkatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
								Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
					Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Bidang Kesehatan	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Bidang Kesehatan	Tingkat capaian Sistem Manajemen Kesehatan	Tingkat capaian Sistem Manajemen Kesehatan	Tingkat capaian Sistem Manajemen Kesehatan
					Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)
					Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatkan dan Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Adanya Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat capaian ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adanya ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adanya ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
					Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi dan Data Mikro Kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB	Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB	Adanya keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN			
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
					Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Meningkatkan pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Adanya pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	
					Program Pengembangan Model Operasional EKR/Posyandu-PAUD	Meningkatkan Pengembangan Model Operasional EKR/Posyandu-PAUD	Peningkatan Pengembangan Model Operasional EKR/Posyandu-PAUD	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Peningkatan Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Meningkatnya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseiling KRR	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Persentase kelompok PIK-R/M aktif	Peningkatan Persentase kelompok PIK-R/M aktif	Meningkatnya kelompok PIK-R/M aktif	
					Program Pembinaan Peranserta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Persentase Kampung KB aktif	Meningkatnya Kampung KB aktif	Adanya Kampung KB aktif di Kabupaten Nias	
				Angka Kematian Ibu	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Tingkat capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	
								Tingkat capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	
								Tingkat capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	
								Tingkat capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Tercapainya peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	
								Tingkat capaian peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi	Peningkatan capaian peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi	Tercapainya peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi	
								Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Peningkatan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Tercapainya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	
								Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terfasilitasinya Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penyelenggaraan perbaikan gizi buruk / stunting kepada masyarakat	Peningkatan persentase kualitas kader dan Tim Penggerak PKK Desa dalam Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Dalam Upaya Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Peningkatan persentase kualitas kader dan Tim Penggerak PKK Desa dalam Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Terlaksananya Pelatihan Kader dan Tim Penggerak PKK Desa dalam Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	
								Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Peningkatan persentase kualitas kader dan Tim Penggerak PKK Desa dalam Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Terlaksananya penanganan kasus balita gizi buruk	
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Meningkat Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Adanya Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penurunan KDRT	Peningkatan penurunan KDRT	Adanya penurunan KDRT di Kabupaten Nias	
					Program pemberian bantuan sosial	Meningkatkan cakupan pelayanan kepada PMKS	Peningkatan cakupan pelayanan kepada PMKS	Persentase Penanganan Keluarga Miskin dan Penyandang Cacat/ Disabilitas	Penanganan Keluarga Miskin dan Penyandang Cacat/ Disabilitas	Adanya Penanganan Keluarga Miskin dan Penyandang Cacat/ Disabilitas	
				Meningkatnya peran serta pemuda dan pembinaan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pelaksanaan Hari-hari Besar Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Peningkatan organisasi kepemudaan yang aktif	Adanya organisasi kepemudaan yang aktif	
					Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatkan Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase organisasi induk/cabang olah raga yang dibina	Peningkatan organisasi induk/cabang olah raga yang dibina	Adanya organisasi induk/cabang olah raga yang dibina	

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN						
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]				
								persentase kegiatan perlombaan / pekan olah raga yang dilaksanakan	Peningkatan kegiatan perlombaan / pekan olah raga yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan perlombaan / pekan olah raga yang dilaksanakan				
Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Pembinaan dan Pengembangan IKM	Penguatan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Adanya Penguatan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pencapaian IKM yang dibina						
				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah	Program Pemberian dan Pengembangan IKM	Pemberian bantuan peralatan kepada Pengrajin/ Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya Pemberian bantuan peralatan kepada Pengrajin/ Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga	Persentase pencapaian IKM yang dibina	Peningkatan IKM yang dibina	Tercapainya IKM yang dibina				
						Pemberian fasilitas untuk mendapatkan Perizinan, HKI, Sertifikasi Halal dan Promosi	Adanya Pemberian fasilitas untuk mendapatkan Perizinan, HKI, Sertifikasi Halal dan Promosi							
			Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	PDEB Sektor pariwisata (Juta Rupiah) Sebagai Bagian dari Sektor Jasa Lainnya	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatkan destinasi dan daya tarik wisata	Meningkatnya Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan domestik	Meningkatkan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan domestik	Tercapainya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan domestik				
				Jumlah kunjungan wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata	Peningkatan pemasaran dan promosi Pariwisata	Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan dan keikutsertaan pada kegiatan kepariwisataan tingkat Kab. Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional	Meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan dan keikutsertaan pada kegiatan kepariwisataan tingkat Kab. Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional	Adanya partisipasi dalam pelaksanaan dan keikutsertaan pada kegiatan kepariwisataan tingkat Kab. Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional				
					Program Pengelolaan Keayaan Budaya	Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata	Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata	Tingkat fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan cagar budaya	Meningkatkan fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan cagar budaya	Adanya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan cagar budaya				
			Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (sebagai bagian dari Sektor Jasa Lainnya)	Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan perdagangan	Tingkat pencapaian pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar semi modern (tertutup)	Meningkatkan pencapaian pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar semi modern (tertutup)	Tercapainya pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar modern (tertutup)			
						Program Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	MeningkatkanPengen dalian dan Pengawasan Barang Bersubsidi dan Strategis	Meningkatnya Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Barang Bersubsidi dan Strategis	Jumlah kegiatan pengendalian barang/bantuan dalam pengawasan khusus	Meningkatkan pengendalian barang/bantuan dalam pengawasan khusus	Terselenggaranya pengendalian barang/bantuan dalam pengawasan khusus			
						Kontribusi PAD dari BUMD	Peningkatan Cakupan pelayanan PDAM	Jumlah Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Peningkatan Jumlah Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan			
												Adanya Kontribusi PAD dari BUMD	Adanya Cakupan pelayanan PDAM	
												Adanya Kontribusi PAD dari BUMD	Adanya Cakupan pelayanan PDAM	
						Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Produk Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan Nelayan	Meningkatnya Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan Nelayan	Persentase peningkatan produksi perikanan	peningkatan produksi perikanan	Meningkatnya persentase produksi perikanan
									Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatkan budidaya perikanan	MeningkatnyaPeng embangan budidaya perikanan	Persentase Kelompok nelayan yang aktif	Meningkatkan Kelompok nelayan yang aktif	Meningkatnya persentase Kelompok nelayan yang aktif
			Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat	Meningkatkan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Laut	MeningkatnyaKon servasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Laut									

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
					Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	Persentase Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	Meningkatnya Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif
					Program Pengembangan SDM dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan	Meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan	Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan
					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Persentase kelompok masyarakat pesisir yang dibina	Meningkatkan Persentase kelompok masyarakat pesisir yang dibina	Meningkatnya kelompok masyarakat pesisir yang dibina
	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang dibina	Meningkatkan Persentase Koperasi yang dibina	Meningkatnya Koperasi yang dibina
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat
					Program Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM	Meningkatkan dukungan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan dukungan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	Meningkatkan Persentase UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	Meningkatnya UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan luas areal intensifikasi tanaman pangan dan inovasi teknologi dalam rangka ketahanan pangan	Meningkatkan luas areal intensifikasi tanaman pangan dan inovasi teknologi dalam rangka ketahanan pangan	Persentase Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Peningkatan Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Adanya Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan
					Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatkan Pengembangan komoditas unggulan unggulan daerah berskala sentra produksi	Meningkatnya Pengembangan komoditas unggulan unggulan daerah berskala sentra produksi	Tingkat capaian produksi tanaman pangan	Meningkatkan capaian produksi tanaman pangan	Meningkatnya produksi tanaman pangan
						Meningkatkan Rasio produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi Perkebunan			
					Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Rasio Produksi peternakan	Peningkatan Produksi peternakan	Tingkat capaian produksi hasil peternakan	Peningkatan capaian produksi hasil peternakan	Meningkatnya capaian produksi hasil peternakan
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan pengembangan sarana prasarana pendukung pertanian	Meningkatnya sarana prasarana pendukung pertanian	Persentase luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Peningkatan luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Meningkatnya luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan
						Pengembangan alat mesin pertanian pra dan pasca panen	Adanya Pengembangan alat mesin pertanian pra dan pasca panen	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan
					Program Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak	Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Adanya Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Tingkat capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Peningkatan capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Meningkatnya capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak
					Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatkan Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM Pertanian	Meningkatnya Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang aktif	Peningkatan Persentase Kelompok Tani yang aktif	Meningkatnya Kelompok Tani yang aktif
								Persentase PPL yang terampil	Peningkatan Persentase PPL yang terampil	Tersedianya PPL yang terampil
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman pangan	Adanya ketersediaan, kualitas dan keragaman pangan	Persentase Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Peningkatan Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Adanya Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Program Realisasi Investasi	Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias	Meningkatnya promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias	Persentase Investor yang masuk ke Daerah	Peningkatan Investor yang masuk ke Daerah	Adanya Investor yang masuk ke Daerah
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang	Tingkat Pengangguran kerja yang	Program Pengembangan	Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi dan	Adanya kesempatan kerja, kompetensi dan	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			profesional dan kompeten	Terbuka (TP)	Kesempatan Kerja	produktivitas tenaga kerja	produktivitas tenaga kerja	(TPAK)	(TPAK)	Kerja (PAK)
								Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TP)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TP)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TP)
								Presentase Tenaga kerja yang difasilitasi penempatan di luar Daerah	Peningkatan Tenaga kerja yang difasilitasi penempatan di luar Daerah	Adanya Tenaga kerja yang difasilitasi penempatan di luar Daerah
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pencapaian tenaga kerja yang terampil	Peningkatan tenaga kerja yang terampil	Tingkat pencapaian tenaga kerja yang terampil
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Struktur Organisasi yang Efektif dan Proporsional	Tertatanya Struktur Organisasi yang Efektif dan Proporsional	Tingkat capaian penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	Peningkatan penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	Tercapainya penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi
					Program Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Penataan Tata Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Penataan Tata Administrasi Pemerintahan	Persentase penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	Peningkatan penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	Adanya penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan
					Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Presentase keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan	Peningkatan keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan	Adanya keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan
					Program Pendokumentasian Hukum	Penataan Dokumen Produk Hukum Daerah	Tertatanya Dokumen Produk Hukum Daerah dengan baik	Persentase pendokumentasian produk hukum daerah	Peningkatan pendokumentasian produk hukum daerah	Tercapainya pendokumentasian produk hukum daerah
					Program Penyelenggaraan Analisis Jabatan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Berbasis Kinerja	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Berbasis Kinerja	Persentase jabatan yang di Analisis	Peningkatan jabatan yang di Analisis	Adanya jabatan yang di Analisis
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Efisiensi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Efisiensi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah	Peningkatan penyelesaian laporan keuangan daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah
								Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Peningkatan Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD
								Persentase Realisasi APBD yang telah ditetapkan (LKPD)	Peningkatan Realisasi APBD yang telah ditetapkan (LKPD)	Adanya Realisasi APBD yang telah ditetapkan (LKPD)
								Persentase penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah	Peningkatan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah	Adanya penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah
					Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	Peningkatan Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	Adanya Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pembinaan Aparatur	Peningkatan Pembinaan Aparatur	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Manajerial dan Teknis)	Peningkatan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Manajerial dan Teknis)	Adanya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Manajerial dan Teknis)
								Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Peningkatan jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Adanya jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase Kehadiran PNS	Peningkatan Kehadiran PNS	Meningkatnya Kehadiran PNS
								Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti	Peningkatan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti	Adanya Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Tingkat capaian pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	Peningkatan pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	Adanya pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah
					Program Pengembangan Komunikasi Informasi, Media	Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam manajemen	Terselenggaranya penerapan teknologi informasi dalam manajemen	Tingkat capaian Perangkat Daerah yang melakukan ketebukaan publik	Peningkatan Perangkat Daerah yang melakukan ketebukaan publik	Adanya Perangkat Daerah yang melakukan ketebukaan publik

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN				
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
					Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	pemerintahan daerah / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	manajemen pemerintahan daerah / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina	Peningkatan Kelompok Masyarakat yang dibina	Adanya Kelompok Masyarakat yang dibina		
					Program Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi	Meningkatkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi	Meningkatnya Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi					
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penegasan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penegasan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa					
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan fasilitas kegiatan DPRD	Meningkatnya kegiatan DPRD	Tingkat capaian aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Tingkat capaian aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Tercapainya aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD		
										Tingkat capaian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Tingkat capaian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Tercapainya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi
										Tingkat capaian kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	Tingkat capaian kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	Tercapainya kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatkan kerjasama kemitraan strategis dengan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat	terjalinya kerjasama kemitraan strategis dengan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	Peningkatan Kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	Terlaksananya Kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik		
						Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, swasta dan LSM	Terjalinya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, swasta dan LSM					
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat capaian pelayanan kedisiasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan kedisiasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Tercapainya pelayanan kedisiasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		
					Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	Peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	Tercapainya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan		
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Meningkatkan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Persentase Inspektoral bersertifikat Auditor	Peningkatan Inspektoral bersertifikat Auditor	Tersedianya pegawai Inspektoral bersertifikat Auditor		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Tertatanya Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Tingkat partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Peningkatan keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Adanya partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah		
					Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	Peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD		
					Program Penataan Pengurusan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias	Terselenggaranya Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias	Persentase dokumen kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias	Persentase dokumen kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias	Tersedianya dokumen kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias		
										Persentase pengadaan tanah pemerintah	Peningkatan pengadaan tanah pemerintah	Tersedianya pengadaan tanah pemerintah
					Program Pemilihan Kepala Desa	Meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya	Peningkatan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya		
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa/BPD yang dilatih/dibina	Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/BPD yang dilatih/dibina	Persentase Aparatur Pemerintah Desa/BPD yang dilatih/dibina		
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	Peningkatan peningkatan peran perempuan di perdesaan	Tersedianya peningkatan peran perempuan di perdesaan		
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa/ADD	Peningkatan pengelolaan dan penyerapan Dana Desa/ADD	Tersedianya pengelolaan dan penyerapan Dana Desa/ADD		
					Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan yang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang	Persentase keselarasan RKKPD terhadap RPJMD	Peningkatan keselarasan RKKPD terhadap RPJMD	Adanya keselarasan RKKPD terhadap RPJMD		

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
					Daerah	Berkualitas, Partisipatif serta Tepat Waktu	Berkualitas, Partisipatif serta Tepat Waktu	Persentase keselarasan RKKPD terhadap APBD	keselarasan RKKPD terhadap APBD	Adanya keselarasan RKKPD terhadap APBD
								Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKKPD	keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKKPD	Adanya keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKKPD
								Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Adanya keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD
								Persentase ketercapaian Indikator RPJMD	ketercapaian Indikator RPJMD	Adanya ketercapaian Indikator RPJMD
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan kualitas Data Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas Data Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Peningkatan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Adanya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
								Persentase PD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Aplikasi	Peningkatan PD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Aplikasi	Adanya PD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Aplikasi
								Tingkat pelaksanaan koordinasi DBH-CHT di Daerah	Peningkatan pelaksanaan koordinasi DBH-CHT di Daerah	Tingkat pelaksanaan koordinasi DBH-CHT di Daerah
					Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatkan kualitas Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya kualitas Perencanaan Sosial Budaya	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
					Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan Kapasitas dan Fungsi Kelitbangan	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelitbangan	Persentase izin penelitian yang dikeluarkan	Peningkatan izin penelitian yang dikeluarkan	Adanya izin penelitian yang dikeluarkan
								Persentase penelitian yang dilakukan dengan pihak ketiga	Peningkatan penelitian yang dilakukan dengan pihak ketiga	Adanya penelitian yang dilakukan dengan pihak ketiga
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang tepat dan terarah	Terwujudnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang tepat dan terarah	Persentase penyerapan DAK	Peningkatan penyerapan DAK	Adanya penyerapan DAK
					Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Perkuatan fungsi, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatnya fungsi, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian SPM yang ditindaklanjuti	Peningkatan Capaian SPM yang ditindaklanjuti	Tercapainya SPM yang ditindaklanjuti
								Tingkat Capaian e-mail Sanapati yang ditindaklanjuti	Peningkatan e-mail Sanapati yang ditindaklanjuti	Adanya e-mail Sanapati yang ditindaklanjuti
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah	Peningkatan kualitas data pembangunan daerah	Tingkat partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Peningkatan partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Adanya keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah
				Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	Adanya kepemilikan dokumen kependudukan
						Program Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM RSUD Gunungситoli	Akreditasi RSUD Gunungситoli	Akreditasi RSUD Gunungситoli	Akreditasi RSUD Gunungситoli
						Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatkan Penerapan Manajemen BLUD dan Akreditasi RSUD Gunungситoli	Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD	Peningkatan Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD	Meningkatnya Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD
Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, berbudaya, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Persentase penurunan konflik SARA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang demokratis dan religius	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pesta Demokrasi	Program Pemantapan dan Peningkatan Ideologi	Meningkatkan Pemasyarakatan Nilai-nilai Ideologi Bangsa	Adanya Nilai-nilai Ideologi Bangsa			
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya rasio pendidikan politik masyarakat			
					Program Peningkatan dan Pengembangan Demokrasi	Penguatan organisasi masyarakat sipil dan partai politik	Terwujudnya organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang harmonis			

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN		
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
				Peresmian Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	Program Pemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi kegiatan keagamaan secara adil, merata dan tidak diskriminatif	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan secara adil, merata dan tidak diskriminatif	Tingkat capaian fasilitasi kegiatan keagamaan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan capaian fasilitasi kegiatan keagamaan organisasi kemasyarakatan	Tercapainya fasilitasi kegiatan keagamaan organisasi kemasyarakatan
						Fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara adil, merata dan tidak diskriminatif	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara adil, merata dan tidak diskriminatif			
					Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Mengefektifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama	Efektifnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama	Tingkat capaian kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan capaian kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Mengefektifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama	Efektifnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama	Tingkat capaian kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan capaian kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	Persentase Penegakan Perda	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Meningkatkan Penegakan produk-produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas	Terselenggaranya Penegakan produk-produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas			
				Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan Penegakan produk-produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas	Terselenggaranya Penegakan produk-produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas			
					Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Adanya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase petugas/ Personil yang dilatih	Peningkatan Persentase petugas/ Personil yang dilatih	Persentase petugas/ Personil yang dilatih
					Program Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas	Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
					Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatkan Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
					Program Penegakan Hukum	Meningkatkan penegakan Hukum/Perda di Kabupaten Nias	Adanya kesadaran Masyarakat akan Hukum	Persentase kasus yang tertangani dengan baik	Peningkatan kasus yang tertangani dengan baik	Terselenggaranya kasus yang tertangani dengan baik
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan yang berlaku	Persentase produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peningkatan produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Adanya produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				Persentase Pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Terlaksananya Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Fasilitasi kegiatan kesenian dan budaya setiap kecamatan	Peningkatan Fasilitas kegiatan kesenian dan budaya setiap kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya setiap kecamatan
					Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kelayakan Budaya	Pemasyarakatan ornamen dan simbol-simbol budaya Nias	Terselenggaranya pemasyarakatan ornamen dan simbol-simbol budaya Nias	Jumlah Group Kesenian yang dibina	Peningkatan Jumlah Group Kesenian yang dibina	Meningkatnya Group Kesenian yang dibina
								Jumlah Lembaga Budaya yang dibina	Peningkatan Jumlah Lembaga dan Sanggar Seni Budaya yang dibina	Meningkatnya Jumlah Lembaga dan Sanggar Seni Budaya yang dibina
								Jumlah Kegiatan Pagelaran Budaya dan Seni	Peningkatan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Seni	Terlaksananya Kegiatan Pagelaran Budaya dan Seni
								Jumlah Peralatan Seni Budaya Tradisional	Peningkatan Peralatan Seni Budaya Tradisional	Tersedianya Peralatan Seni Budaya Tradisional
								Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Budaya Nias	Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Budaya Nias	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Budaya Nias



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2021**

Akuntabilitas kinerja adalah perrwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Nias selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Nias melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias yang dibuat.

3.1 TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI ATAS EVALUASI SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Beberapa hal yang direkomendasikan oleh menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada hasil evaluasi Sistem Akauntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

REKOMENDASI 1

Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan seperi tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama.

TINDAK LANJUT

Telah menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan pada tahun Anggaran 2021 melalui Perubahan RPJMD, Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias

REKOMENDASI 2

Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternative solusi yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah daerah.

TINDAK LANJUT

Membuat Pohon Kinerja dan Telah menyempurnakan indikator-indikator kinerja pada dokumen perencanaan sehingga indikator kinerja telah berbasis *outcome*.

REKOMENDASI 3

Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya serta memberikan *reward* dan *punishment* bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja

TINDAKLANJUT

Telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dan kepada seluruh Pejabat sampai pada level Individu pada masing-masing perangkat daerah.

REKOMENDASI 4

Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian

TINDAK LANJUT

Evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah telah dilaksanakan dan telah di tindaklanjuti dengan kesepakatan merencanakan rencana aksi di masing-masing Perangkat Daerah dan evaluasi secara periodik serta menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada dokumen laporan kinerja

REKOMENDASI 5

Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional *judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja OPD.

TINDAK LANJUT

1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemkab Nias (Ps1 6 Permenpan 12 Tahun 2015)
2. Diklat dan Bimtek berkelanjutan utk evaluator (dhi. APIP)
3. Melakukan entry meeting dengan tim evaluator sebelum melakukan evaluasi atas SAKIP PD

REKOMENDASI 6

Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

TINDAK LANJUT

Telah melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan selanjutnya diberikan rekomendasi mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing Perangkat Daerah

3.2 PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan program strategis tahun berkenan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil
55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

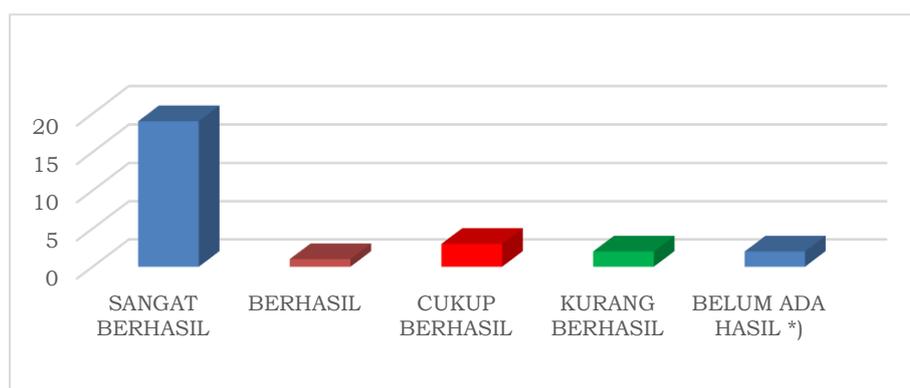
- ✓ Indikator Kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).
- ✓ Indikator Sasaran.
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2021 telah didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021. Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021, seperti pada tabel berikut ini :

JUMLAH IKU	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL	BELUM ADA HASIL *)
27	18	2	2	2	3

Grafik – 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021



Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel – 21
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2021
									TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1	Membangun Infrastruktur Dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata Dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah secara Merata dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson	1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	%	85	85	91,17	85,88	94,20	Sangat Berhasil
						2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	67,43	77,01	2,83	50,62	158,00	Sangat Berhasil
						3	Persentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik	%	67,43	45,73	17,98	16,76	93,21	Sangat Berhasil

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2021						
									TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]						
						4	Persentase Rumah Tangga yang terakses Air Bersih	%	14,25	7,12	20	35,20	176	Sangat Berhasil						
						5	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	%	66,67	55,6	76,67	0	0	Kurang Berhasil						
						2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	6	Persentase Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	0,6	0	2	2	100,00	Sangat Berhasil				
								7	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Berhasil				
						2	Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Daya Saing Masyarakat	Mewujudkan Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat yang Tinggi dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3	Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,84	5,84	5,84	5,37	91,95	Sangat Berhasil
												9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,15	12,57	12,57	100,00	Sangat Berhasil
										4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	10	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,5	69,48*)	70		*)	Sangat Berhasil
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	9	3	5							3	60,00	Sangat Berhasil						
12	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	16	28	12							24	100	Sangat Berhasil						
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90	90,86	90	90,81	100,90	Sangat Berhasil										
3	Membangun Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata Dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7	Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,15	5,15	5,15	5,15	100,00	Sangat Berhasil						
						15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah	%	4,2	4,2	4,2	4,35	103,57	Sangat Berhasil						
				8	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Kebudayaan Daerah	16	PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rupiah) Sebagai Bagian dari Sektor Jasa Lainnya	%	7461,4	0	0	0	0,00	Kurang Berhasil						
						17	Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	%	0,66	0,4	1,82	1,27	69,78	Sangat Berhasil						
				9	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	18	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	3	4,1	3	3,3	110,00	Sangat Berhasil						
				Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Daya Saing Daerah	Angka Kemiskinan	10	Meningkatnya Investasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	19	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	4	0	0	0	0,00	Kurang Berhasil				
								11	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Profesional dan Kompeten	20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,19	0,84	0,8	3,12	100,00	Sangat Berhasil		

NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2021
									TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
4	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/ Predikat	B	CC	CC	CC*)	*)	Berhasil
				13	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP*)	*)	Berhasil
				14	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	23	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,15	89,63	87,15	89,63	102,85	Sangat Berhasil
5	Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Persentase penurunan konflik SARA	16	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	24	Persentase Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Berhasil
						25	Persentase Penegakan Perda	%	90,9	100	100	83,33	83,33	Berhasil
						26	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	%	4,87	100	100	100	100,00	Sangat Berhasil
						27	Persentase Pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Berhasil
PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR UTAMA												83,10	Sangat Berhasil	

Data diolah Tahun 2022

Catatan :

- *) Indikator Kinerja *Predikat Akuntabilitas Kinerja* dan *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* belum dapat ditampilkan hasil capaian berhubung karena belum keluarnya hasil penilaian dari Pemerintah Pusat (Kemenpan & RB RI dan BPK Provsu)
- *) Capaian Angka Harapan Hidup belum ada data dari BPS

3.3 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berikut persentase pencapaian Persentase kinerja masing-masing sasaran dan indikator seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel – 22
Persentase Keberhasilan Tiap Misi
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

MISI KEPALA DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2021
[1]	[2]	[3]
Membangun Infrastruktur Dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata Dan Berwawasan Lingkungan	116,20	Sangat Berhasil

MISI KEPALA DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	PREDIKAT CAPAIAN TAHUN 2021
[1]	[2]	[3]
Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Daya Saing Masyarakat	93,99	Sangat Berhasil
Membangun Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata Dan Berkeadilan	84,30	Berhasil
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	117,40	Sangat Berhasil
Menata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, Dan Taat Hukum	79,25	Berhasil
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020	98,25	SANGAT BERHASIL

Data diolah Tahun 2021

Grafik – 4
Persentase Keberhasilan Tiap Misi
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021



Selanjutnya untuk Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran strategis pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel – 23
Persentase Capaian Kinerja Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Targetis
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	37	162,52
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	4	69,89
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	21	101,45
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	46	82,35
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	9	92,15
			Meningkatnya peran serta pemuda dan pembinaan pemasyarakatan olahraga	3	100,00

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah	9	90,60
			Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	3	144,28
			Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif	4	75,00
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	6	111,61
	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	8	79,26
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	1	0,00
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten	7	90,07
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	23	115,00
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	18	111,82
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	15	125,39
Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Persentase penurunan konflik SARA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang demokratis dan religius	3	80,83
			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	10	77,67
Persentase Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021				227	94,99

Data diolah Tahun 2022

3.4 ANALIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Pemerintah Kabupaten Nias dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Nias selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi pemerintahan sebagai sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Reformasi Birokrasi pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan internal pemerintah Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 dapat dirinci berdasarkan misi, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja seperti pada tabel berikut ini :

Tabel – 24
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nias

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	1	Rasio jalan yang dibangun	%	17,5	19,22	17,5	8,46	47,66
				2	Rasio Jembatan yang dibangun	%	8,61	0	9,09	0	0,00
				3	Persentase desa terisolir (yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4) yang ditangani	%	38,46	75,88	91,17	85,88	94,20
				4	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	50	36,15	52,00	36,39	69,98
				5	Rasio jalan yang ditingkatkan	%	21,88	15,58	15,63	29,80	190,66
				6	Rasio jembatan yang ditingkatkan	%	33,33	0	33,33	0	0,00
				7	Rasio jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	%	16	10,72	16,00	18,33	114,56
				8	Rasio jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	%	8,33	71	8,33	18,58	223,05
				9	Tersedianya system informasi/Data Base jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	100,00
				10	Persentase panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	3,77	59,7	2,83	73,93	2612,37
				11	Persentase panjang turap/talud/ bronjong	%	13,57	6,21	10,44	7,20	69,16
				12	Kapasitas tampungan air	%	2,08	0	2,08	0	0,00
				13	Persentase rumah tangga penerima manfaat air bersih (SR)	%	20	5,9	20	35,20	176
				14	Persentase jalan setapak dalam kondisi baik	%	16,03	17,52	18,32	21,42	116,92
				15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	16,85	46,91	17,98	16,76	93,21
				16	Persentase tembok penahan dalam kondisi baik	%	21,05	19,33	22,37	5,45	23,36

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021		
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
				17	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	Unit	2	0	1	2	200,00	
				18	Rasio bangunan ber LMB per satuan bangunan	%	44,44	31,11	55,56	2,2	3,96	
				19	Ketersediaan dokumen rencana Tata Ruang	Dok	0	0	2	2	100,00	
				20	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	%	66,67	55,6	76,67	0	0,00	
				21	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani	%	80	80	100	100	100,00	
				22	Persentase dokumen sertifikat kepemilikan tanah milik pemerintah Kabupaten Nias	%	11,96	5	11,96	5	41,81	
				23	Persentase sarana dan prasarana keamanan lalu lintas	%	75	0	80	100	125,00	
				24	Persentase ketersediaan terminal	%	0	0	0	0	0,00	
				25	Rasio trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik	%	55	57,1	60	64,3	107,17	
				26	Persentase angkutan umum yang laik operasi di jalan raya	%	75	79,5	80	83	103,75	
				27	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	%	75	0	80	96	120,00	
				28	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	90	90	90	90	100,00	
				29	Persentase penanganan Korban Bencana Alam	%	100	85	100	85	85,00	
				30	Protap Penanggulangan Bencana Daerah	Dok	1	1	1	1	100,00	
				31	Persentase masyarakat yang dapat dibantu	%	75	99	75	75	100	
				32	Persentase petugas/ Personil yang dilatih	%	75	41	75	42	66,67	
				33	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	85	65	85	100	120	
				34	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	75	65	75	65	86,67	
				35	Tingkat pencapaian pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	%	100	100	0	0	0,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 1								162,52

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah	%	76,96	79,96	96,96	47,8	49,30
				2	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	%	100	100	100	100	100,00
				3	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	%	100	70,1	100	100	100,00
				4	Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan	%	64,3	64,3	84,2	25,47	30,25
				Persentase Capaian Sasaran - 2							69,89
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Peningkatan indeks minat baca masyarakat	%	14,88	0,74	14,88	0,984	6,61
				2	Tingkat capaian pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	%	26,48	24,11	26,48	19,64	74,17
				3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	%	5,36	5,84	5,84	5,37	91,95
				4	Harapan lama Sekolah	%	12,15	12,15	12,57	12,57	100,00
				5	APK PAUD	%	23,97	38,27	23,92	37,85	158,24
				6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	99,81	101,62	99,98	97,82	97,84
				7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	%	83,25	87,78	83,60	82,60	98,80
				8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,34	0,1	0,72	0,2	27,78
				9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Paket B	%	73,31	93,26	74,90	92,36	123,31
				10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Paket B	%	52,4	68,51	52,48	70,47	134,28
				11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	%	0,41	0,23	0,41	0,23	56,10
				12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	%	99,32	112,68	99,80	97,56	97,76
				13	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	22,98	46	22,98	40,49	176,20
				14	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	%	10	19,23	12	23,07	192,25
				15	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	97,1	100	96,75	96,75
				16	Angka Kelulusan SMP/MTS	%	100	99,57	100	99,09	99,09
				17	Cakupan sekolah yang melaksanakan KBM berbasis Literasi Sekolah	%	80	80	100	100	100,00
				18	Persentase tenaga pendidik/tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	%	46,75	48,21	46,85	54,41	116,14

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
				19	Rasio guru terhadap murid SD	%	30	28	30	27,26	94,82	
				20	Rasio guru terhadap murid SMP	%	43	39	43	38,03	88,44	
				21	Persentase penyediaan kebutuhan Guru Bantu Daerah (GBD)	%	100	100	100	100	100,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 3								101,83
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Tingkat capaian penurunan angka kematian Ibu	Per 100.000 penduduk	250	80,04	230	75,99	33,04	
				2	Tingkat capaian penurunan angka kematian bayi	Per 1.000 penduduk	22,5	7,4	22,5	7,19	31,96	
				3	Tingkat capaian penurunan angka kematian balita	Per 1.000 penduduk	31,5	0	31,5	0	0,00	
				4	Cakupan imunisasi pada bayi 0 - 11 bulan	%	84	91,83	85	0	0,00	
				5	Cakupan imunisasi Campak pada anak kelas I Sekolah dasar	%	94	99,03	95	0	0,00	
				6	Cakupan imunisasi DT pada kls I dan TT pada kelas II dan III SD	%	94	98,47	95	0	0,00	
				7	Angka kesakitan malaria (API)	Per 1000 penduduk	≤ 1	0,0261	≤ 1	0,00686	0,67	
				8	Prevalensi Tuberkulosis (TB)	Per 100.000 penduduk	120	113,86	120	150,99	125,83	
				9	Cakupan kesembuhan TB Paru	%	95	98,69	95	100	105,26	
				10	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk	Per 100 ribu pddk	25	23,78	25	10,3	41,20	
				11	Cakupan Penderita DBD Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100,00	
				12	Prevalensi Kasus Diare per 1000 penduduk	Per 1000 pddk	10	6,1	10	1,17	11,70	
				13	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular	Pos	10	10	10	30	300,00	
				14	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar	%	75	12,46	80	41,83	52,29	
				15	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	50	9,85	70	76,06	108,66	
				16	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	20	20,15	40	44,10	110,25	
				17	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40	43,49	60	76,32	127,20	

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021	
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
				18	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	20	100	30	16,41	54,70
				19	Persentase orang bere-siko terinfeksi HIV menda-patkan peme-riksaan HIV sesuai standar	%	20	37,88	25	13,66	54,64
				20	Tingkat pengawasan makanan dan minuman	%	65	65	75	0	0,00
				21	Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	%	65	65	75	35	46,67
				22	Persentase Posyandu aktif (%)	%	94	100	95	100	105,26
				23	Persentase depot air minum yang diperiksa	%	80	100	80	100	125,00
				24	Prevalensi balita dengan gizi buruk	%	0,35	0,25	0,35	0,12	34,29
				25	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100,00
				26	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin	%	75	81,6	75	90,28	120,37
				27	Persentase ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	%	44	69,83	42	20,77	49,45
				28	Tingkat capaian peningkatan angka kelangsungan hidup bayi	Rasio	970	972	970	976	100,62
				29	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	76,5	76,72	76,50	79,35	103,73
				30	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	75	74,05	80	90,67	113,34
				31	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	76	74,05	80	71,48	89,35
				32	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75	76,89	80	86,64	108,30
				33	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	83	67,61	85	84,07	98,91
				34	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90	90	92	1,28	1,39
				35	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70	77	80	37,71	47,14

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021		
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
				36	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	
				37	Rasio dokter	Per 100.000 penduduk	19,8	20,18	20	30,89	154,45	
				38	Rasio perawat	Per 100.000 penduduk	169,5	261,69	170	274,53	161,49	
				39	Rasio bidan	Per 100.000 penduduk	169,5	287,73	170	262,18	154,22	
				40	Rasio analis kesehatan	Per 100.000 penduduk	15	15,62	16	16,47	102,94	
				41	Rasio asisten apoteker	Per 100.000 penduduk	16,8	18,88	17	15,10	88,82	
				42	Rasio ahli gizi	Per 100.000 penduduk	10,95	11,72	11	15,79	143,55	
				43	Persentase Puskesmas Yang Ter-akreditasi	%	80	83,33	100	83,33	83,33	
				44	Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	%	75	75	75	75	100,00	
				45	Persentase masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	%	18	18,26	18	16,65	92,50	
				46	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	85	85,76	90	94,99	105,54	
				Persentase Capaian Sasaran - 4								84,61
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1	Persentase Penanganan Keluarga Miskin dan Penyandang Cacat/ Disabilitas	%	28,065	17,393	28,065	17,393	61,97	
				2	Persentase peserta KB aktif terhadap Program KB	%	66	67,08	66	69,63	105,50	
				3	Persentase Kampung KB aktif	Desa	10	10	10	10	100,00	
				4	Persentase Kelompok PIK-R/M aktif	Kelompok	12	12	12	12	100,00	
				5	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Kelompok	10	10	10	10	100,00	
				6	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana penyuluh dan pelayanan KB	%	79	80	83	85	102,41	
				7	Persentase SKPD yang telah melakukan analisis perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.	%	50	50	50	29,72	59,44	
				8	Persentase Penurunan KDRT	%	0,035	0,01	0,034	0,001	100,00	
				9	Persentase Pencapaian pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 5								92,15

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			Meningkatnya peran serta pemuda dan pembinaan pemasyarakatan olahraga	1	Tingkat capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	100	100	100	100	100,00
				2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	100	100	100	100	100,00
				3	Persentase organisasi induk/cabang olahraga yang dibina	%	100	100	100	100	100,00
Persentase Capaian Sasaran - 6											100,00
Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah	1	Persentase Kelompok Tani yang aktif	%	100	17,12	100	77,35	77,35
				2	Persentase Penyuluh yang terampil	%	100	100	100	100	100,00
				3	Tingkat capaian produksi tanaman pangan	%	100	100,5	100	81,37	81,37
				4	Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	%	100	83,33	100	69,04	69,04
				5	Tingkat capaian produksi perkebunan	%	100	100	100	63,51	63,51
				6	Tingkat capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	%	100	94,57	100	30,16	30,16
				7	Tingkat produksi hasil peternakan	%	100	61,65	100	194	194
				8	Tingkat capaian pemasaran hasil peternakan	%	100	100	100	100	100,00
				9	Persentase desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	%	100	17,65	100	100	100,00
Persentase Capaian Sasaran - 7											76,30
			Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	1	Tingkat fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan cagar budaya	%	23,1	23,1	23,10	83,87	363,07
				2	Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan dan keikutsertaan pada kegiatan kepariwisataan ditingkat Kab. Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional	%	5,04	2,31	5,04	0	0,00
				3	Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan domestik	%	0,66	0,4	1,82	1,27	69,78
Persentase Capaian Sasaran - 8											99,47
			Meningkatnya pembangunan ekonomi kreatif	1	Persentase pencapaian UKM yang dibina	%	100	100	100	100	100,00
				2	Tingkat pengawasan, pengendalian dan monitoring peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu	%	100	100	100	100	100,00
				3	Tingkat pencapaian pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar semi modern (tertutup)	%	100	100	0	0	0,00

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
				4	Tingkat pengawasan terhadap barang kedaluwarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya	%	100	100	100	100	100,00
				Persentase Capaian Sasaran - 9							75,00
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	3	3,2	3	3,3	110,00
				2	Persentase Kelompok nelayan yang aktif	%	67	93	67	89,6	133,73
				3	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang aktif	%	38	44	38	43	113,16
				4	Persentase Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	%	90	100	90	100	111,11
				5	Persentase pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan	%	2	0	2	2,7	135,00
				6	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki kelengkapan administrasi/dokumen (Kartu Nelayan/Kusuka)	%	15	19	15	10	66,67
				Persentase Capaian Sasaran - 10							111,61
	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Dok	1	1	1	1	100,00
				2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	86,47	84,69	81,69	81,79	100,12
				3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,19	1,09	0,8	3,12	2,86
				4	Persentase Tenaga kerja yang difasilitasi penempatan di luar Daerah	%	76	75,56	90	100	111,11
				5	Persentase Koperasi yang dibina	%	36,36	36,36	36,35	36,35	100,00
				6	Persentase koperasi aktif dan sehat	%	17	18	18	18	100,00
				7	Persentase peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	%	18	18	25	30	60,00
				8	Persentase UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	%	13	15	50	30	60,00
				Persentase Capaian Sasaran - 11							79,26
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	1	Persentase Investor yang masuk ke Daerah	%	100	0	100	0	0,00
				Persentase Capaian Sasaran - 12							0,00

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten	1	Tingkat pencapaian tenaga kerja yang terampil	%	87	40	85	100	117,65
				2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis)	%	55	55	57,5	55	95,65
				3	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	86	89	90	83	92,22
				4	Tingkat Partisipasi Keikutsertaan dalam Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	0	0,00
				5	Persentase Kehadiran PNS	%	92	91,75	93	96,2	103,44
				6	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100,00
				7	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	74	95	79	96	121,52
Persentase Capaian Sasaran - 13											90,07
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	85	93,7	85	100	117,65
				2	Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan	%	80	100	95	100	105,26
				3	Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	90	100	83	100	120,48
				4	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	%	85	100	85	100	117,65
				5	Rata-rata capaian kinerja Kepala Daerah	%	80	88,2	90	35,29	39,21
				6	Tingkat capaian pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100,00
				7	Tingkat capaian penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	%	100	100	100	100	100,00
				8	Persentase jabatan yang dianalisis	%	100	100	100	100	100,00
				9	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	%	100	100	100	30	30,00
				10	Persentase penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100,00
				11	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang dibina	%	60	100	26,5	100	377,36
				12	Persentase Peningkatan Desa yang memiliki	%	40	31	22,4	15,7	70,09

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021		
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
				BUMDes								
				13 Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	%	40	100	45	100	222,22		
				14 Presentase Aparatur Pemerintahan Desa/ BPD yang dilatih/dibina	%	100	100	40	0	0,00		
				15 Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100,00		
				16 Persentase pelaksanaan kegiatan wajib nasional di Kecamatan	%	100	100	100	100	100,00		
				17 Tersedianya dokumen Perencanaan hasil musyawarah desa	%	100	100	100	100	100,00		
				18 Persentase peran serta pemuda dalam membangun kecamatan	%	100	100	100	100	100,00		
				19 Persentase pelaksanaan wajib kegiatan nasional di Kecamatan	%	100	100	100	100	100,00		
				20 Persentase keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pembangunan	%	100	100	100	100	100,00		
				21 Tingkat capaian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	%	80	60	80	60	75,00		
				22 Persentase pegawai Inspektorat bersertifikat Auditor	%	22,22	46,15	22,22	66,66	300,00		
				23 Tingkat capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	%	100	100	100	100	100,00		
				Persentase Capaian Sasaran - 14								115
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/ Predikat	CC	CC	CC*)	*)	100,00	
				2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP / WDP	WTP	0	WTP*)	*)	90,00	
				3	Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD	Dokumen	WTP	WTP	WTP	*)	100,00	
				4	Tingkat capaian pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	100,00	
				5	Waktu Penetapan Perda APBD dan P APBD	TW / TTW	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	
				6	Persentase Realisasi APBD yang telah ditetapkan	%	88	88	90	90	100,00	
				7	Persentase Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	90	90	100	100	100,00	
				8	Persentase Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100,00	

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021		
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
				9	Tingkat partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
				10	Persetanse pemenuhan tahapan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100,00	
				11	Rasio Peningkatan PAD Kecamatan	%	100	100	100	100	100,00	
				12	Presentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa/ADD	%	100	99	100	99,14	99,14	
				13	Akreditasi RSUD Gunungsitoli	Dokumen	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	
				14	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	%	100	100	100	100	100,00	
				15	Tingkat partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	
				16	Tingkat capaian aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	%	100	100	100	100	100,00	
				17	Tingkat capaian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100,00	
				18	Tingkat capaian kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 15								111,82
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Tingkat capaian Perangkat Daerah yang melakukan ketebukaan publik	%	13,5	100	100	100	100,00	
				2	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina	%	0	0	0	0	0,00	
				3	Tingkat Capaian SPM yang ditindaklanjuti	%	0	0	100	0	0	
				4	Tingkat Capaian e-mail Sanapati yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100,00	
				5	Tingkat Capaian Aplikasi untuk penerapan e-government	%	1	1	100	100	100	
				6	Ketersediaan Data Base Kependudukan.	%	83	100	83	100	120,48	
				7	Persentase wajib KTP yang memiliki e-KTP	%	77,5	77,5	80	96,08	120,10	
				8	Persentase KK yang memiliki Kartu Keluarga	%	81,6	81,6	82	85,56	104,34	
				9	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	38,75	38,75	39,50	85,46	216,35	
				10	Persentase pasangan yang memiliki akta nikah	%	22	22	22,20	68,14	306,94	
				11	Persentase anak usia 0-17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	12	12	15	37,74	251,60	

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		TOTAL CAPAIAN TAHUN 2021	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
				12	Persentase penerbitan akta kematian	%	45	45	50	79,27	158,54	
				13	Rasio Penerapan Teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100,00	
				14	Rasio penyusunan dokumen standar biaya	%	100	100	100	100	100,00	
				15	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	%	90	92,31	90	92,31	102,57	
				Persentase Capaian Sasaran - 16								125,39
Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.	Persentase penurunan konflik SARA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang demokratis dan religius	1	Tingkat capaian kegiatan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan	%	10,65	68	84	100	119,05	
				2	Tingkat capaian fasilitasi kemitraan organisasi kemasyarakatan	%	12,66	11,67	81	100	123,46	
				3	Tingkat Capaian partisipasi politik masyarakat pada Pemilu	%	68,02	71,33	0	0	0,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 17								80,83
			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Taat Hukum dan Kelestarian Budaya Tradisional	1	Persentase produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100,00	
				2	Persentase kasus yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100,00	
				3	Persentase pendokumentasian produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100,00	
				4	Persentase Penegakkan Perda.	%	100	100	100	83,33	83,33	
				5	Tingkat capaian penertiban kawasan rawan PKL	%	100	100	100	100	100,00	
				6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100,00	
				7	Persentase petugas/personil yang dilatih	%	12,07	0	12,7	0	0,00	
				8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ kota	%	100	13,63	100	100	100	
				9	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	0	0	
				10	Persentase pengendalian lingkungan	%	100	100	100	100	100,00	
				Persentase Capaian Sasaran - 18								77,67

3.4.1. ANALISIS CAPAIAN MISI-1 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA FISIK WILAYAH SECARA MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Nias tahun anggaran 2021 melaksanakan program dan kegiatan, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD I) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD II) atau Refocussing Anggaran Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias juga berupaya untuk menuntaskan pembangunan jalan menuju desa-desa tertinggal atau berupa desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 (empat). Pada kondisi awal pada tahun 2015, jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 berjumlah 52 Desa. Capaian kinerja hingga Tahun 2016, tersisa jumlah desa yang belum dilalui kendaraan roda 4 menjadi 44 Desa. Hasil capaian kinerja pada tahun 2017 tersisa sebanyak 30 desa, capaian hingga Tahun 2018 tersisa jumlah desa yang belum terjangkau roda 4 menjadi 28 desa, capaian hingga tahun 2019 tersisa jumlah desa yang belum terjangkau roda 4 menjadi 25 desa, capaian hingga tahun 2020 yang belum terjangkau roda 4 menjadi 25 desa dan capaian hingga tahun 2021 yang belum terjangkau roda 4 menjadi 24 desa.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Nias tidak terlepas dari beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan pembebasan lahan, keterbatasan personil pengelola kegiatan, dan juga dikarenakan adanya Refocussing anggaran Tahun Anggaran 2021 serta hal-hal lain sebagaimana diuraikan pada Bab VI. Meski dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Nias tetap berupaya semaksimal mungkin mensukseskan semua program kegiatan yang telah direncanakan.

Salah satu isu strategis yang menjadi skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias yakni peningkatan struktur beberapa ruas jalan strategis kabupaten, dari konstruksi lapen menjadi hotmix. Hingga tahun 2021 ibukota kecamatan seluruh wilayah kabupaten nias telah dapat diakses dengan baik oleh kendaraan roda-4. Infrastruktur jalan di Kabupaten Nias terdapat sepanjang 765,909 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 42,733 km, jalan provinsi 14,502 km, jalan kabupaten 708,674 km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan tanah masih mendominasi yakni sepanjang 329,737 km atau 43,05% dari total panjang jalan di kabupaten Nias, selanjutnya disusul jenis jalan berpermukaan aspal/ hotmix sepanjang 293,470 km atau 45,79%. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa; serta memperkuat daya saing antar bangsa. Oleh sebab itu,

pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus Bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias di atas umumnya karena Lokasi pembangunan yang bermasalah (lahan), kekurangan Tenaga Teknis yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sementara untuk peningkatan rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di daerah perkotaan belum memenuhi target disebabkan antara lain:

1. Ada masyarakat yang melakukan aktifitas pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Nias tapi tidak melaporkan kepada pemerintah;
2. Masih ada keraguan dalam penerapan aturan dalam memproses permohonan IMB;
3. Regulasi untuk permohonan IMB bagi bangunan yang telah berdiri masih belum jelas

Sedangkan solusi dalam mengatasi permasalahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Solusi untuk peningkatan rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di daerah perkotaan, perlu tindakan tegas bagi pelanggar izin pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Nias. Upaya yang telah dilakukan selama ini yakni mensosialisasikan peraturan yang ada terkait izin pemanfaatan ruang termasuk Perda IMB
2. Sosialisasi langsung kepada pemilik lahan sebaiknya dilakukan sehingga hasilnya menentukan layak atau tidaknya usulan pembangunan yang direncanakan

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nias.

Urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan penting dalam menentukan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik yang merupakan upaya strategis dalam mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah di ibukota kabupaten. Pembangunan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun fondasi perekonomian dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga ukuran keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah dimaksud seperti analisis berikut ini:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2021 tidak tercapai karena pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias tidak mengerjakan Pembangunan Gedung Baru tetapi hanya melanjutkan pembangunan gedung/kantor yang belum selesai pada Tahun sebelumnya yaitu:
 - Lanjutan Pembangunan dan Penataan Halaman Kantor Bupati Nias di Hilizoi Kecamatan Gido,
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kamtibmas di Desa Hilizoi Kecamatan Gido.
2. Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan pada Tahun Anggaran 2021 Tidak Tercapai. Target persentase rumah tidak layak huni selama 5 tahun adalah 3.290 Unit RTLH, untuk capaian realisasi selama 5 tahun telah diselesaikan 838 Unit RTLH.
3. Untuk target tahun 2021 adalah sebanyak 144 Unit RTLH dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias telah menangani 49 Unit RTLH sesuai dengan target tahun 2021.
4. Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah pada Tahun Anggaran 2021 tidak tercapai karena ada *refocusing* anggaran pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yaitu Kegiatan Pengadaan Tong Sampah di Kabupaten Nias sebesar Rp 551.408.000,- (826 unit tong sampah).
5. Pembangunan Kantor SKPD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 dan Pembangunan kantor DPRD Kabupaten Nias tahun anggaran 2021 tidak mencapai target karena tidak adanya ketersediaan lahan dan kekurangan anggaran.
6. Masih rendahnya kualitas permukiman masyarakat.

Untuk sasaran strategis Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana, salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Nias dalam Penanggulangan bencana yakni

dengan menyiapkan masyarakat agar tanggap bencana dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana merupakan strategi BPBD agar merubah paradigma penanganan bencana dari penanganan yang rekatif/responsiv menjadi penanganan yang preventif yaitu membuka ruang luas terhadap kegiatan pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat dalam hal ini BPBD melakukan perubahan yang berasal dari inisiatif masyarakat yaitu melakukan pencegahan dengan pengurangan/menghilangkan resiko bencana baik pengurangan ancaman maupun kerentanan. Kemudian BPBD melakukan kesiapsiagaan yaitu kemampuan kemandirian untuk meningkatkan dan memahami setiap tindakan yang diambil, sehingga akan menjadi kebiasaan yang tertanam untuk masyarakat dalam melakukan pembangunan yang ada di lingkungannya.

Partisipasi masyarakat tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk membantu pemerintah menjalankan kebijakan dan program kerja. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlunya partisipasi dan informasi dari masyarakat merupakan penunjang dari kinerja BPBD Kabupaten Nias dalam menghadapi masalah kebutuhan pembangunan khususnya dalam menghadapi bencana. perlu adanya cara atau usaha untuk mengembangkan masyarakat agar berdaya dalam menghadapi permasalahan di lingkungannya guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tanggap bencana dan mandiri dalam menghadapi bencana.

3.4.2 ANALISIS CAPAIAN MISI-2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN DAYA SAING MASYARAKAT

Untuk peningkaan kualitas hidup dan daya saing masyarakat di Kabupaten Nias diperoleh program pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pandemi *COVID-19* berdampak langsung terhadap kehidupan anak di berbagai aspek khususnya pendidikan, perlindungan anak, akses layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan bergizi. *COVID-19* berdampak nyata terhadap pendidikan anak, yang diakibatkan penutupan sekolah selama masa pandemi sehingga memaksa anak untuk belajar dari rumah. Metode belajar tersebut memiliki tantangan masing-masing, misalnya koneksi internet dan kuota/data seluler di wilayah yang terakses jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak, minimnya fasilitas belajar mengajar seperti papan tulis, buku teks menjadi tantangan untuk metode kunjungan, dan sebagainya. Selain itu, sekolah dan guru memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk menjalankan program daring ditambah minimnya dukungan teknis dari pemerintah dan dinas terkait.

Untuk mengantisipasi hal-hal di atas beberapa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut:

1. Memastikan keberlanjutan pendidikan anak melalui peningkatan kapasitas guru dan sekolah untuk mendukung mekanisme belajar dari rumah. Serta mendorong kerjasama multi-pihak untuk mendukung pemerintah mengembangkan dan mensosialisasikan protokol pembukaan sekolah kembali.
2. Melindungi anak dari risiko peningkatan kekerasan akibat tekanan sosial ekonomi selama pandemi dengan memastikan layanan perlindungan anak tetap berfungsi selama masa pandemi. Orang tua juga perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama dalam pola pengasuhan yang positif.
3. Memastikan anak, khususnya balita untuk mendapat kecukupan gizi melalui program-program yang inovatif seperti Pos Gizi Khusus, program Pemberian Makanan Bayi dan Balita yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, serta memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dengan membangun protokol dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader sehingga Puskesmas dan Posyandu dapat tetap berjalan.

Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, terdapat 3 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten, yang tercapai ada 1 indikator (33,33%), yaitu Angka Kematian Ibu, dan ada 2 indikator (66,67%) yang tidak tercapai, yaitu Angka Harapan Hidup (namun data yang digunakan adalah data tahun 2020, belum ada data tahun 2021 dari BPS) dan Angka Kematian Bayi. Sementara dari 48 indikator kinerja daerah yang merupakan indikator kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, ada 1 indikator yang tidak ada target pada tahun 2021, yaitu Tingkat Capaian Peningkatan status Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap. Dari 47 target kinerja tahun 2021, ada sebanyak 31 indikator (65,96%) yang tercapai dan 16 indikator (34,04%) yang tidak tercapai. Sedangkan Berdasarkan target kinerja UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias berdasarkan target indikator kinerja pada Perubahan RPJMD TA 2016 – 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2021 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias mencapai 81,58% (kategori baik). Hal menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat.
- 2) Audit laporan keuangan BLUD RSUD dr. M. Thomsen Nias tahun anggaran 2021 oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah belum terlaksana, disebabkan keterbatasan waktu dan anggaran dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, untuk mengaudit masing-

masing BLUD, sehingga indikator Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD Tahun 2020 dan 2021 belum dapat diberikan penilaian.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp.110.512.676.832,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.78.012.879.627 atau sebesar 70,59% dengan realisasi fisik total sebesar 96,40%.

Pendidikan memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti:

- Untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri
- Membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum
- Membantu melestarikan kebudayaan masyarakat
- Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi
- Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Ketersediaan mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasi anggarannya di bawah 60% pada T.A. 2021 antara lain:

- a. Kegiatan **Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Nias** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dari pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi NIHIL (0%). Kegiatan tidak dapat terlaksana seiring dengan perubahan regulasi yang mengamanatkan penyusunan beberapa dokumen sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- b. Kegiatan **Pengadaan Prasarana Listrik untuk UPTD Puskesmas Ma'u** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dari pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi NIHIL (0%). Kegiatan tidak dapat terlaksana seiring karena terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan pada saat pengadaan sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- c. Kegiatan **Rehabilitasi Total Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling UPTD. Puskesmas Ulugawo** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dari pagu anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi NIHIL (0%). Kegiatan yang dianggarkan pada P-APBD T.A. 2021 tidak sempat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi.
- d. Beberapa kegiatan sumber dana BOK Non Fisik pada Program Pemenuhan

- Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang tidak sempat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi dan pembatasan kegiatan akibat pandemic Covid-19.
- e. Kegiatan **Operasional PSC-119** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.431.024.000,- realisasi sebesar Rp.16.000.000,- (3,71%). Kegiatan ini untuk mendukung operasionalisasi kegiatan pelayanan ambulance 24 jam, yang tidak dapat terlaksana karena keterbatasan personil khususnya supir ambulance dan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
 - f. Kegiatan **Penanganan Dampak Covid-19** pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.875.655.000,- realisasi sebesar Rp.17.061.883.068,- (55,26%). Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah kasus Covid-19.

Dari tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Dians Pendidikan, terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan analisis sebagai berikut:

- a. **Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 Tahun.** Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 5,37. Target rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas tercapat, namun tidak mengalami perkembangna yang signifikan. Dari capaian ini dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Nias usia di atas 15 tahun hampir menamatkan jenjang sekolah dasar. Meningkatkan RLS ini tentunya menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Nias.
- b. **Harapan Lama Sekolah,** Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Nias pada tahun 2021 adalah 12,57, yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Nias diharapkan menamatkan Sekolah Menengah Atas (12 tahun) dan kuliah 5 bulan.
- c. **APK PAUD,** target indikator Angka Partisipasi Kasar pada PAUD pada Tahun 2021 adalah 38,50 dengan capaian 37,85 (tidak tercapai). Terjadi penurunan minat pada sekolah sebesar 1,69% dari tahun sebelumnya.
- d. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A.** Realisasi APK SD tahun 2021 tidak mencapai target yakni 97,82% dari target 100%. Tidak tercapainya target APK ini terjadi karena punurunan jumlah siswa yang mendaftar di kelas 1 pada tahun ajaran 2021/2022.
- e. **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.** Realisasi indikator kinerja utama APM SD/Paket A mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu tingginya jumlah lulusan SD usia di bawah 13 tahun (17,96%) serta capaian jumlah siswa SD dibawah 7 tahun (9,7%).
- f. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B.** Target APK SMP/M.Ts/Pakte B tahun 2021 adalah 93,30 dengan realisasi capaian 92,36. Dari data ini dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang terdaftar sebagai siswa SMP lebih sedikit dari jumlah penduduk berusia SMP. Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyaknya siswa usia SMP (13-15 tahun) yang telah bersekolah di jenjang yang lebih tinggi (SMA dan SMK), serta penduduk Kabupaten Nias yang bersekolah di kabupaten lain.

- g. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.** Target APM SMP/M.Ts/Paket B tahun 2021 adalah 68,50 dengan capaian 70,47 (melebihi target sebesar 2,88%).
- h. **Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.** Target 2021 adalah 46% dengan capaian 46%.
- i. **Persentase MP/M.Ts berakreditasi minimal B.** Target 2021 adalah 19,20% dengan capaian 23,07%.
- j. **Angka Lulusan (AL) SD.** Realisasi indikator ini pada Tahun Tahun 2021, yakni 96,75%, yang berarti tidak semua siswa jenjang SD lulus pada TP. 2020/2021. Hal ini dikarenakan ada sebagian siswa yang tidak mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh sekolah sejak penerapan new normal akibat pandemi Covid-19.
- k. **Angka Lulusan (AL) SMP/M.Ts.** Realisasi indikator ini pada Tahun Tahun 2021, yakni 99,09%. Dengan demikian masih terdapat siswa kelas IX yang tidak menamatkan sekolahny di jenjang SMP.

Permasalahan d Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik (guru) di setiap jenjang pendidikan.
- b. Keterbatasan kualitas SDM (guru) karena kurangnya pelatihan dan pembinaan kompetensi guru.
- c. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1).
- d. Kurangnya kuantitas guru yang memiliki kualifikasi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3).
- e. Kurangnya fasilitas sarana prasarana sekolah terutama Perpustakaan, Laboratorium, Peralatan Teknologi Informasi dan Tambahan Ruang Kelas.
- f. Akses jalan menuju sekolah di Kabupaten Nias sebagian besar belum memadai.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, solusinya adalah :

- a. Membuka formasi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Nias khusus formasi guru sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
- b. Perlu adanya penganggaran sosialisasi dan pelatihan kompetensi guru dalam dokumen perencanaan.
- c. Penegakan regulasi guru minimal memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1) Kependidikan.
- d. Dibukanya peluang bagi guru untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 baik melalui dana pemerintah maupun dana mandiri.
- e. Pembangunan perpustakaan, laboratorium, ruang belajar serta pengadaan alat-alat penunjang mutu pendidikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- f. Pengusulan pemeliharaan sarana jalan (infrastruktur) secara merata di Kabupaten Nias, terutama di daerah-daerah terisolir.

Selanjutnya, dalam bidang Pendidikan, secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Masa depan mencakup kehidupan di Dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Namun saat ini, dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena ini ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sekitar lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Lembaga pendidikan dituntut untuk bisa melahirkan keluaran pendidikan yang berkualitas karena perlombaan antar bangsa berlangsung sangat sengit dan intensif. Sehingga mempunyai keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global. Di era teknologi seperti sekarang, guru tidak satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Tapi peran guru sudah berubah menjadi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Bahkan ada internet yang didalamnya membuat banyak web yang menyediakan materi belajar. Dalam keadaan seperti inilah diharapkan guru memberikan peran lebih besar karena peran pendidik tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun di era apapun. Sehingga untuk melakukan peran tersebut secara efektif maka diperlukan peningkatan langkah dan usaha yang jelas dan tepat. Beberapa usaha peningkatan kualitas pendidikan merupakan tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dari Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah berkategori sangat baik karena diperoleh rata-rata 100%. Tingkat capaian kinerja yang sangat baik tersebut mencerminkan adanya upaya sungguh sungguh dari masing masing bidang dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang didukung oleh partisipasi masyarakat Kabupaten Nias. Secara umum ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2021 adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksananya sepenuhnya karena disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan *refocussing* anggaran karena pandemi COVID 19.
2. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang Penganggaran Responsif gender.

3. Kurangnya dukungan anggaran untuk urusan perempuan dan perlindungan anak dan juga dalam penanganan pencegahan Stunting.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dan keluarga bahagia sejahtera.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan baik kualitas maupun kuantitas sehingga menyebabkan hasil beberapa pelaksana kegiatan belum maksimal
6. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Stunting .

Untuk mengatasi permasalahan diatas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

1. Dalam mengatasi Pandemi yang melanda masyarakat agar tidak dibebankan pembiayaannya pada anggaran SKPD yang sudah direncanakan.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang KDRT perempuan dan Perlindungan Anak
3. Peningkatan perencanaan dan penganggaran dimasing-masing Perangkat Daerah yang responsif gender dan peningkatan alokasi anggaran urusan perempuan dan perlindungan anak.
4. Penambahan jumlah tenaga PLKB/PKB di kabupaten Nias dan meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan baik melalui sosialisasi, bimtek maupun diklat, pembekalan tentang peraturan yang selalu berkembang termasuk didalamnya pembekalan terkait dengan penguasaan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh SDM pelaksana kegiatan.
5. Meningkatkan Program KIE bagi masyarakat (PUS) dengan melibatkan para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
6. Meningkatkan jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam mendukung Program KKBPK terutama dalam pencegahan Stunting dan kegiatan lainnya

3.4.3 ANALISIS CAPAIAN MISI-3 MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Berdasarkan hasil Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias dengan Bupati Nias pada Tahun 2021, maka dapat digambarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias berdasarkan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias untuk Tahun 2021.





Untuk menjalankan urusan pemerintahan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias terdiri dari satu Sekretariat dan lima Bidang Teknis. Bidang Teknis yang menangani Urusan Wajib tidak pelayanan dasar, yakni urusan bidang Pangan ada satu bidang yaitu : Bidang Konsumsi Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan. Sedangkan untuk urusan pilihan bidang pertanian dijalankan oleh empat bidang yaitu:

- 1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- 2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Bidang Perkebunan
- 4) Bidang Peternakan

Pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan :

- 1) Potensi dan kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, tersedia cukup besar baik berupa komoditas ternak, lahan, air dan iklim.
- 2) Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian (sebagian besar masyarakat Nias hidup dari berusaha tani baik beternak, berkebun tanaman keras, tanaman pangan dan sayuran serta buah-buahan).
- 3) Dampak pembangunan pertanian terhadap PDRB dalam pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan cukup besar.
- 4) Hasil capai pembangunan pertanian belum optimal baik dari aspek peningkatan produktivitas maupun produksi serta aspek peningkatan pendapatan petani.
- 5) Tantangan berat adalah swasembada pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Hasil pertanian lainnya seperti sayuran, telur, daging juga masih didatangkan dari luar daerah Kabupaten Nias.

Selanjutnya, indikator Tingkat capaian produksi perkebunan status pencapaian tercapai sebanyak 100%, dikarenakan jumlah produksi untuk karet dan kakao masih unggulan di Kabupaten Nias. Tingkat capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak status pencapaian tidak tercapai hanya 94,57% dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengadaan vaksin hewan. Tingkat produksi hasil peternakan status pencapaian tidak tercapai dikarenakan wilayah Kabupaten nias pada tahun 2021 mengalami pandemic virus flu Babi (ASF) sehingga menyebabkan kematian massal. Sedangkan untuk ternak ayam produksinya masih tertinggi dikarenakan hamper semua masyarakat memiliki ternak ayam.

Indikator Tingkat capaian pemasaran hasil peternakan status pencapaian tercapai dikarenakan hamper seluruh masyarakat diwilayah Kabupaten nias melakukan jual beli ternak meskipun belum memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) dan indikator Persentase desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan status pencapaian tidak tercapai dikarenakan intervensi anggaran terhadap desa diseluruh wilayah Kabupaten Nias belum seluruhnya ter-intervensi untuk membuat suatu usaha pertanian yang bersifat komersil ataupun unggulan di Kabupaten Nias.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masalah Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu SDM dan Sarana
 - Permasalahan :
 - a. Lembaga Cabang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) belum ditetapkan sebagai UPT, sehingga belum maksimal dalam melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan.
 - b. Cakupan tugas Dinas pertanian dan ketahanan pangan yang saat ini membidangi empat Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan penyuluhan) dan satu sektor pangan yaitu Ketahanan Pangan.
 - c. Sarana kerja mobilitas kerja aparat terbatas (Perangkat Internet, Kendaraan Dinas roda dua, fasilitasi Balai Benih Pembantu, laboratorium tanaman dan ternak)
 - Solusi :
 - a. Perlu dorongan dari lembaga pemerintah dan legislatif dalam pembentukan UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disetiap Kecamatan sebagai basis pembangunan pertanian di Kecamatan.
 - b. Perlu penambahan SDM di bidang pertanian bagi di struktural maupun fungsional. Penambahan tenaga penyuluh pertanian masih sangat dibutuhkan, apabila mengacu pada aturan yang berlaku maka dibutuhkan 170 orang tenaga penyuluh sementara tenaga penyuluh yang ada saat ini hanya 45 orang (PNS 26 orang, Non PNS 19 orang)
 - c. Perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melengkapi secara bertahap sarana kerja dan mobilitasi kerja untuk mendukung kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias.
2. Masalah Keterampilan Petani
 - Permasalahan
 - a. Kurang menguasai teknologi Budidaya Komoditas Pertanian
 - b. Petani (Pelaku Utama) berusaha tani secara Sub System tidak orientasi agribisnis/pasar.
 - Solusi
 - a. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian bagi pelaku utama yang diselenggarakan oleh Penyuluh Pertanian

- Lapangan (PPL) secara berkelanjutan sesuai dengan Komoditas yang sedang diusahakan oleh pelaku.
- b. Penumbuhan Inkubator setiap Komoditas ditingkat Balai Penyuluhan Pertanian melalui Kaji Terap Paket Teknologi Spesifik Lokalita.
 - c. Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Study banding dan magang usaha tani bagi petani
 - d. Perlu Penumbuhan Inkubator Agribisnis dengan penerapan teknologi disetiap Balai Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Demplot Den Farm dan Dem Farm dan Pendampingan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh PPL, Kontak Tani, dan KTNA.
3. Masalah Mentalitas Petani
- Permasalahan
 - a. Kurangnya etos kerja
 - b. Kurangnya Inovatif
 - c. Ketergantungan pada Bantuan
 - Solusi
 - a. Penumbuhan Kesadaran akan arti hidup dan kehidupan serta menumbuhkan rasa, harapan dan cita-cita, hidup masa depan melalui pembinaan yang berkelanjutan dengan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terencana, terukur dan berkelanjutan.
 - b. Perlu peningkatan pengetahuan (Inteligansi), peningkatan keterampilan (Psikomotorik) dan penggeseran sikap (attitude). Melalui kursus-kursus dan Diklat management.
 - c. Penumbuhan dan pengembangan sikap rasa memiliki dan tanggung jawab serta kemandirian melalui pemberdayaan dan study banding pada kelompok-kelompok tani yang sudah maju di luar daerah.
4. Masalah Organisasi Petani
- Permasalahan
 - a. Kesadaran Petani untuk berkelompok masih kurang.
 - b. Kelompok Tani Kurang berfungsi/tidak Dinamis.
 - c. Motivasi berlompok hanya sekedar untuk mendapat Bantuan
 - d. Organisasi P3A tidak berfungsi
 - Solusi
 - a. Perlu dilakukan Revitalisasi kelompok melalui pendataan ulang kelompok tani yang aktif, pembinaan serta pengembangan dan perjabaran kegunaan dari pada kelompok tani.
 - b. Perlu Pendataan Kelompok Tani yang berbasisi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, untuk menfokuskan materi pembinaan baik masyarakat akan tugas dan fungsi Pengurus Kelompok Tani serta Peran Anggota, tanggungjawab, Hak dan Pengembangan Kelompok.
 - c. Perlu Pendataan Kelompok Tani yang berbasisi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, untuk menfokuskan

- materi pembinaan baik masyarakat akan tugas dan fungsi Pengurus Kelompok Tani serta Peran Anggota, tanggungjawab, Hak dan Pengembangan Kelompok.
- d. Perlu Pemberdayaan kelompok tani untuk lebih mandiri yang dimulai dari
 1. Identifikasi kelompok tani
 2. Penetapan kelompok bina'an
 3. Peningkatan Kapasitas Pengurus & Anggota
 4. Peningkatan Penguatan Modal usaha tani
 5. Evaluasi capaian pembinaan
 6. Groduasi menjadi kelompok yang mandiri dengan usaha tani yang orientasi pasar.
 - e. Perlu Pembinaan dan Pemberdayaan P3A disetiap daerah irigasi.
5. Masih kurangnya infrastruktur dasar pertanian berupa bangunan sumber-sumber air untuk irigasi, jaringan irigasi, jalan usaha tani/jalan produksi.
 - Permasalahan
 - a. Sumber-sumber air untuk irigasi terbatas berupa embung dan dam parit
 - b. Jaringan irigasi yang masih terbatas, sehingga petani masih bergantung kepada musim penghujan untuk bercocok tanam
 - c. Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang masih terbatas
 - Solusi
 - a. Perlu Komitmen untuk alokasi dana pembangunan sumber-sumber air untuk irigasi (embung, bendung, dam parit dan sumber-sumber air lainnya)
 - b. Pembangunan jaringan irigasi di daerah sentra produksi padi sawah yang memiliki potensi sumber daya air yang memadai
 - c. pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani/jalan produksi
 6. Tingkat Produktifitas Usaha Tani masih sangat rendah yang disebabkan oleh :
 - a. Pola Usaha Tani yang masih Tradisional, Individual, menyebar dalam skala kecil dan areal pertanaman tidak terpelihara.
 - b. Penerapan teknologi sangat rendah hanya mencapai sekitar 30 % yang meliputi pengolahan tanah, jarak tanam, pemakaian benih unggul, pengendalian gulma dan pemakaian pupuk.
 - c. Khusus komoditi padi pola tanam dan tertib tanam belum terlaksana dengan baik.
 - d. Sebagian besar komoditi karet dan kelapa merupakan tanaman tua yang kurang produktif.
 7. Ancaman Hama dan Penyakit Relatif Tinggi, meliputi :
 - a. Padi : Hama Wereng, Penggerek batang, Keong mas, tikus dan blast.
 - b. Kelapa : Broontispa SP (80% areal pertanaman kelapa terserang Broontispa SP).

- c. Kakao : Penggerek buah kakao (75% areal pertanaman kakao terserang PBK).
 - d. Babi : Kolera, PRRS
 - e. Ayam : ND dan Flu Burung
 - f. Anjing : Rabies
8. Kualitas SDM Petani sangat rendah, meliputi Pengetahuan, Keterampilan dan etos kerja.
 9. Industri pengolahan hasil pertanian belum tumbuh dan berkembang

Indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias yakni Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah juga tercapai dengan presentase keberhasilan adalah sangat berhasil. Namun untuk Indikator Kinerja Meningkatnya Rasio Elektrifikasi dengan persentase kurang berhasil disebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik dan Indikator Kinerja Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diadakan. Hal ini disebabkan karena urusan Energi Listrik bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi ini tidak bisa dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai Instansi teknis yang diberi kewenangan melaksanakan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan



Urusan Pemerintahan untuk Urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nias. Kabupaten Nias memiliki garis pantai sepanjang 54,54 km dan luas laut ± 58.522 Ha atau 46,68% dari total luas wilayah Kabupaten Nias. Kabupaten Nias memiliki banyak potensi sumber daya alam yang besar, baik yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun di bagian daratan. Di wilayah pesisir, laut merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Urusan perikanan menjadi pilihan mata pencaharian sebagian besar masyarakat karena sumber daya yang ada sangat menjanjikan meskipun dikelola secara tradisional dan tidak secara optimal.

Wilayah Perikanan Tangkap yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Nias terdapat di 3 Kecamatan (Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato) pada 16 Desa pesisir yang di dalamnya terdapat 5 pulau kecil yang terletak di wilayah Timur Pulau Nias, sedangkan Perikanan Budidaya tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai Instansi teknis yang diberi kewenangan melaksanakan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 54

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, memiliki Tugas Pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nias” dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Nias terkait dengan tugas dan fungsinya

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Nias merupakan kebijakan yang berkaitan dengan visi, misi pembangunan daerah yang dijabarkan pada visi, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pendekatan dalam perumusan arah kebijakan ini mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2016-2021, yaitu antara lain :

- 1) Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan
- 2) Pengembangan budidaya perikanan
- 3) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
- 4) Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan

Untuk menyelenggarakan Urusan Pilihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.029.875.768,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.311.941.636,- atau 82,18 %.

Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias dalam ketentuan undang-undang Pemerintahan Daerah dimaksud telah terurai pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan amanat undang-undang Pemerintahan Daerah dimaksud telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan dan penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai implikasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka terdapat beberapa urusan Pemerintahan yang berasilimasi/bergabung maupun urusan Pemerintahan yang sebelumnya bergabung menjadi terpisah/terbagi. Secara khusus urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terjadi pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana sesuai dengan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya mengurus Usaha Mikro, sementara Usaha Kecil menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan urusan Usaha Menengah langsung menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias dihadapkan pada permasalahan dan hambatan yang merupakan isu-isu penting yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kualitas dan daya saing tenaga kerja yang ada/terdaftar belum sesuai dengan kebutuhan pasar;

- b. Terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan dalam daerah untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang semakin bertambah setiap Tahun dan juga banyak penduduk usia kerja yang sedang sekolah/kuliah, mengurus rumah tangga sehingga tidak aktif pada kegiatan ekonomi;
- c. Kemampuan SDM dalam pengelolaan UMKM dan Koperasi masih rendah;
- d. Akses terhadap pasar, informasi , teknologi, dan pembiayaan masih terbatas;
- e. Kesadaran masyarakat untuk ber Koperasi sangat rendah serta terkesan hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah;
- f. Sarana dan prasarana pendukung usaha dan promosi masih kurang;
- g. Inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk masih kurang;

Dengan terdapatnya permasalahan dan hambatan tersebut di atas, solusi telah ditempuh antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi pelatihan peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja/angkatan kerja;
- b. Melakukan kegiatan bursa kerja online (BKOL)
- c. Peningkatan kualitas sumber daya melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan penyusunan laporan keuangan perkoperasian yang dilaksanakan dalam Daerah;
- d. Fasilitasi permohonan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian terkait melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada gerakan Koperasi yang layak dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- e. Diselenggarakannya sosialisasi gerakan sadar Koperasidi kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah menengah atas;
- f. Penyediaan sarana dan prasana pendukung pengelolaan Usaha dan mengikutsertakan dalam Pekan Inovasi Daerah Kabupaten Nias;
- g. Menugaskan/mengutus pengurus Koperasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diluar Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan perkoperasian.

3.4.4 ANALISIS CAPAIAN MISI-4 MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN BIROKRASI YANG MELAYANI DAN PROFESIONAL

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan aksi nyata dari program revolusi mental. Hal ini dikarenakan peningkatan akuntabilitas tersebut menjadi cerminan pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah. Untuk mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, harus melibatkan seluruh unit organisasi, untuk bersama-sama melakukan perubahan menuju perbaikan kualitas kinerja. Adapun keempat, perubahan orientasi terhadap penggunaan anggaran. Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, dapat dipastikan

bahwa setiap instansi akan memberikan *outcome* yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Nias yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias memperoleh predikat "CC". Hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Nias masih belum berjalan dengan baik.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Nias belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi :

- a. Ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti tujuan dan sasaran indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
- b. Ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap satuan kerja ke dalam penetapan kinerja disertai dengan target-targetnya serta sistem pengukurannya;
- d. Monitoring terhadap pencapaian target-target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja;
- e. Penyajian Laporan Kinerja dan sistem evaluasi yang mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Nias, melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, melalui langkah-langkah antara lain.
 - a. Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti: tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, serta target-target jangka pendek dan jangka panjang;
 - b. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan, penetapan perjanjian kinerja, dan penyusunan rencana aksi.

2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah antara lain:
 - a. Upaya perbaikan terhadap ketepatan dan keselarasan pengukuran kinerja ke dalam setiap dokumen perencanaan kinerja di masing-masing satuan Kerja;
 - b. Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja, unit kerja dan individu, dan alat untuk pengendalian kinerja;
 - c. Memastikan penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV dan Pelaksana.
3. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah antara lain:
 - a. Memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik
 - b. Memastikan bahwa laporan kinerja telah direviu oleh APIP dan diserahkan secara tepat waktu.
4. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, melalui langkah-langkah:
 - a. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - b. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi dengan upaya-upaya: peningkatan kapasitas SDM evaluator, pembahasan-pembahasan secara reguler, dan peningkatan kualitas rekomendasi hasil evaluasi;
 - c. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
5. Memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam rangka mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya cukup sampai pada capaian output tetapi juga berorientasi pada *outcome* (hasil).

Berdasarkan analisa dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis) tidak tercapainya indikator tersebut karena beberapa hal, antara lain :

1. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti tugas belajar baik S-1, S-2, S-3 maupun Dokter spesialis;
2. Kouta yang dialokasikan oleh Badan Diklat penyelenggara Diklat Kepemimpinan untuk Kabupaten Nias masih sangat minim, sehingga untuk mengirimkan peserta Diklat perlu waktu yang lama karena antri dengan peserta dari daerah lain.

Untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, memperhatikan *output* yang diperoleh selama pelaksanaan pelayanan keliling serta apresiasi positif yang sering disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias menjadi pertimbangan tersendiri untuk tetap mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dimaksud dikarenakan dapat memberikan pendekatan *edukatif* kepada

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

Terlayannya penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan menghadirkan *outcomes* yang begitu banyak serta dirasakan nyata oleh penduduk. Manfaat dari pelayanan keliling langsung di lapangan di wilayah Kabupaten Nias yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat (penduduk) diantaranya sebagai berikut :

1. Kepemilikan dokumen kependudukan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas warganya;
2. Rujukan penetapan identitas dalam dokumen lainnya, seperti penulisan identitas siswa dalam ijazah.

Selama pelaksanaan pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditemukan beberapa kendala terutama yakni :

1. Bagi pasangan suami istri yang menikah dibawah tahun 1970-an banyak yang tidak mempunyai akta nikah sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan dalam permohonan akta lahir;
2. Keterbatasan Informasi yang didapatkan warga dari aparat desa saat pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
3. Masih terdapat dari beberapa warga ketika bermohon untuk pengurusan dokumen kependudukannya masih ada yang belum memiliki dokumen akta kelahiran putra dan putri dari pasangan dalam satu rumah tangga.

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias pada target direncanakan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun hasil akhir hanya mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemerintah Kabupaten Nias, penataan aset yang masih belum tertib serta pengelolaan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Nias melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah melakukan strategi dalam penataan aset antara lain melakukan penilaian dan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang BMD, Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai atau opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun mendatang.

3.4.5 ANALISIS CAPAIAN MISI-5 MENATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, DAN TAAT HUKUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Nias nomor 44 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.

Konsekuensi beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi dan sosial budaya, kerukunan hidup beragama serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian polemik pada tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias namun tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mempunyai visi : “Terwujudnya Pelayanan di Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Sejahtera.”

Untuk mewujudkan visi dimaksud maka dirumuskan beberapa misi yaitu :

- 1) Meningkatkan SDM aparat Satpol PP dalam rangka melaksanakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, keamanan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
- 2) Memberdayakan PPNS dalam rangka penanganan masalah pelanggaran perda dan perkara.
- 3) Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
- 4) Meningkatkan kualitas pengamanan dan pengawalan terhadap para pejabat negara dan daerah serta objek vital.
- 5) Membina hubungan kerjasama dan kemitraan kerja dengan aparat.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Nias yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Nias tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Pengamanan Upacara/kunjungan kerja pejabat/temu pisah/ ramah tamah/unjuk rasa/demo dan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan Pemerintahan lainnya.
 - ✓ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - ✓ Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- b. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
 - ✓ Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - a. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - ✓ Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

Adapun anggaran Belanja Operasi yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias berdasarkan DPPA pada tahun 2021 sebesar Rp 2.078.980.249,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.056.073.354,- atau 99%.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Perda dan Perkada serta penanggulangan kebakaran di Kabupaten Nias oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan semaksimal mungkin namun harus diakui banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Dampak pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah, terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di tengah-tengah masyarakat sehingga semakin minimnya masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.

Untuk Penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Nias masih menjadi pekerjaan yang harus segera di tindaklanjuti kesiapsiagaan dan penyediaan sarana serta prasarananya, karena selain keadaan geografis wilayah Kabupaten Nias yang sulit di jangkau mobil pemadam kebakaran, keterbatasan sarana prasarana mobil damkar dan pos damkar, tidak adanya personil petugas pemadam kebakaran yang terlatih menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan pemadaman kebakaran pemukiman dan perumahan penduduk di wilayah Kabupaten Nias.

3.5 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

REALISASI PENDAPATAN

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (*governance*) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel – 25
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rupiah)		%
		Anggaran	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83.505.748.976,00	103.914.322.434,26	125,50
a.	Pendapatan Pajak Daerah	3.880.735.058,00	6.886.166.406,26	177,00
b.	Hasil Retribusi Daerah	640.000.000,00	705.212.950,00	110,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.602.804.361,00	10.531.786.799,00	122,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70.382.209.557,00	85.791.156.279,00	122,00
2.	Pendapatan Transfer	740.353.829.466,00	744.068.439.978,00	119,00
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	724.912.186.334,00	722.691.345.316,00	100,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	138,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.377.710.000,00	35.817.327.000,00	96,00
a.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	38.377.710.000,00	35.817.327.000,00	96,00
	TOTAL PENDAPATAN	862.237.288.442,00	884.712.164.554,26	103,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias

Ket: *) Data sementara realisasi keuangan per 31 Desember 2021

Realisasi Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah suatu Rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Table – 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rupiah)		%
		Anggaran	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Belanja Daerah	923.868.502.759,00	838.704.123.852,85	91,00
a.	Belanja Operasi	584.785.884.632,00	514.558.786.360,99	88,00
b.	Belanja Modal	110.418.872.559,00	103.493.800.623,86	94,00
c.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0	0,00
d.	Belanja Transfer	226.663.745.568,00	220.642.756.868,00	97,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias

Ket: *) Data sementara realisasi keuangan per 31 Desember 2021

Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan, anggaran dan realisasi pembiayaan baik Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel – 27
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		%
		Anggaran	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pembiayaan Daerah	72.828.087.669,00	72.134.158.503,23	99,93
1.	Penerimaan Pembiayaan	67.229.650.993,00	67.035.721.827,23	100,00
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.029.650.993,00	67.029.650.993,92	100,00
b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000,00	6.070.833,31	3,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.598.436.676,00	5.098.436.676,00	100,00
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.598.436.676,00	5.098.436.676,00	100,00
	Pembiayaan Netto	61.631.214.317,00	61.937.285.151,23	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias

Ket: *) Data sementara realisasi keuangan per 31 Desember 2021

Selanjutnya, dalam menunjang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2021, maka dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Secara teknis target dan realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 dalam menunjang kegiatan teknis diluar pelaksanaan kegiatan rutin dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel – 28
Target dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.249.346.500	2.070.924.939	92,07
		2 Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.512.000	1.612.836.741	90,68
		3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.003.100	761.104.371	86,78
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Nias	4 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.736.609.000	6.491.290.510	66,67
		5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan			93,40

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		Daerah Kabupaten/Kota	19.182.487.187	17.916.732.421		
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.481.406.250	1.284.354.873	86,70
		7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	20.460.000	20.060.000	98,04
		8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Procedure (SOP) Pengawasan	20.000.000	18.650.000	93,25
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias	9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.140.407.031	45.462.586.759	64,82
		10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	472.678.750	453.319.025	95,90
		11	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	202.657.000	199.171.500	98,28
		12	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.577.000	197.002.000	98,22
5	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	13	Program Pengelolaan Pendidikan	69.570.176.084	62.601.171.929	89,98
		14	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65.458.000	65.458.000	100,00
		15	Program Pengembangan Kapasitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	320.000.000	305.786.000	95,56
		16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	250.000.000	222.298.600	88,92
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias	17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	9.690.600.000	8.984.126.520	92,71
		18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.024.237.000	6.670.875.855	94,97
		19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.901.180.000	1.870.193.395	98,37
		20	Program Pengembangan Permukiman	2.856.750.000	2.787.575.400	97,58
		21	Program Penyelenggaraan Jalan	39.222.960.408	38.670.110.213	98,59
		22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.298.871.300	1.177.839.067	90,68
		23	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	1.937.966.000	1.969.936.450	101,65
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias	24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	950.000.000	939.137.300	98,86
		25	Program Pengembangan Permukiman	2.600.000.000	2.574.637.620	99,02
		26	Program Penataan Bangunan Gedung	11.428.000.000	9.971.736.803	87,26

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		27	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	470.000.000	231.934.000	49,35
		28	Program Penyelenggaraan Jalan	350.000.000	342.903.486	97,97
		29	Program Pengembangan Perumahan	399.592.000	346.625.245	86,74
		30	Program Kawasan Permukiman	1.022.410.000	1.016.905.000	99,46
		31	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000.000	489.681.500	97,94
		32	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	131.075.000	98.677.998	75,28
		33	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000	195.500.046	97,75
		34	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	251.000.000	215.742.025	85,95
		35	Program Pengelolaan Persampahan	952.390.000	857.990.802	90,09
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias	36	Program Pembinaan Perpustakaan	365.697.681	251.240.406	68,70
		37	Program Pengelolaan Arsip	25.000.000	24.035.000	96,14
		38	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	#DIV/0!
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	39	Program Pengendalian Penduduk	35.000.000	35.000.000	100,00
		40	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.485.010.010	3.819.378.600	85,16
		41	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	674.074.750	342.194.500	50,77
		42	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	115.000.000	84.351.800	73,35
		43	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	75.143.510	74.046.075	98,54
		44	Program Perlindungan Khusus Anak	15.000.000	15.000.000	100,00
		45	Program Pemenuhan Hak Anak	16.302.000	14.665.400	89,96
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Nias	46	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.382.309.285	1.338.552.600	96,83
		47	Program Penyelenggaraan Jalan	5.866.195.000	5.752.409.700	98,06
11	Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias	48	Program Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	905.402.975	902.547.400	99,68

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		49	Program Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	411.069.425	411.069.425	100,00
		50	Program Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	59.393.750	59.390.550	99,99
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias	51	Program Promosi Penanaman Modal	67.000.000	48.602.400	72,54
		52	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.999.900	119.999.900	100,00
		53	Program Penganadalian Pelaksanaan Penanaman Modal	326.122.000	239.908.200	73,56
		54	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	10.000.000	10.000.000	100,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias	55	Program Penatagunaan Tanah	332.875.000	220.268.840	66,17
		56	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	231.184.606.568	222.867.788.307	96,40
		57	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	290.000.000	279.958.700	96,54
		58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	377.483.000	365.309.750	96,78
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias	59	Program Perencanaan Tenaga Kerja	57.954.000	55.974.000	96,58
		60	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	138.100.000	131.776.942	95,42
		61	Program Penempatan Tenaga Kerja	32.548.000	32.548.000	100,00
		62	Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.000.000	9.900.000	99,00
		63	Program Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
		64	Program Hubungan Industrial	39.700.000	34.025.000	85,71
		65	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	16.400.000	82,00
		66	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	9.000.000	9.000.000	100,00
		67	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	426.345.000	386.221.200	90,59
		68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	10.000.000	10.000.000	100,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	69	Program Pendaftaran Penduduk	507.775.500	491.725.200	96,84
		70	Program Pencatatan Sipil	18.956.300	18.956.300	100,00

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54.101.900	48.678.100	89,97
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias	72	Program Peningkatan Disertifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	221.049.825	216.889.575	98,12
		73	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.062.600	53.380.325	88,87
		74	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	503.158.725	360.735.650	71,69
		75	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.024.883.375	3.319.037.372	82,46
		76	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	61.249.699	60.236.000	98,34
		77	Program Penyuluhan Pertanian	432.580.375	286.180.625	66,16
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias	78	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	784.986.150	766.352.943	97,63
		79	Program Administrasi Pemerintahan Desa	759.719.325	667.947.794	87,92
		80	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.291.000	50.291.000	100,00
		81	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.249.750	28.549.750	97,61
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias	82	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	50.000.000	42.113.000	84,23
		83	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60.000.000	59.070.000	98,45
		84	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	42.172.521	84,35
		85	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	245.000.000	159.317.729	65,03
19	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	86	Program Informasi dan Komunikasi Publik	304.250.000	255.391.400	83,94
		87	Program Aplikasi Informatika	98.000.000	89.626.800	91,46
		88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	71.000.000	48.498.200	68,31
		89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	11.079.750	4.861.000	43,87
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	90	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	944.745.965	654.548.700	69,28

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	%
	Kabupaten Nias	91	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	142.733.500	139.642.500	97,83
		92	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.000.000	19.775.000	98,88
21	Dinas Sosial Kabupaten Nias	93	Program Pemberdayaan Sosial	358.000.000	192.348.000	53,73
		94	Program Rehabilitasi Sosial	442.102.500	431.702.500	97,65
		95	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.131.800.500	2.094.625.500	98,26
		96	Program Penanganan Bencana	355.282.500	349.792.519	98,45
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Nias	97	Program Pengembangan Kebudayaan	470.000.000	466.441.800	99,24
		98	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	225.000.000	207.623.356	92,28
		99	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	100,00
		100	Program Pemasaran Pariwisata	119.791.500	118.818.959	99,19
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	101	Program Penanggulangan Bencana	307.790.800	127.690.618	41,49
		102	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	48.000.000	48.000.000	100,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias	103	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	861.536.440	612.293.865	71,07
		104	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	403.751.000	195.592.504	48,44
25	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias	105	Program Kepegawaian Daerah	2.438.339.300	1.833.957.565	75,21
		106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.095.650	17.686.300	76,58
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias	107	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	165.000.000	15.000.000	9,09
		108	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.317.195.500	1.317.195.500	100,00
		109	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000	19.999.500	100,00

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
		110	Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosual dan Budaya	138.211.500	135.136.500	97,78
		111	Program Peningkatan Kewspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	25.940.000	24.815.000	95,66
27	Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias	112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.780.000	28.780.000	100,00
		113	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.950.000	39.950.000	100,00
28	Kecamatan Gido Kabupaten Nias	114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.000.000	6.000.000	100,00
		115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	33.000.000	32.976.500	99,93
		116	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.000.000	21.985.000	99,93
		117	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.000.000	43.980.000	99,95
29	Kecamatan Somolomolo Kabupaten Nias	118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.340.134.603	988.229.836	73,74
		119	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.000.000	4.000.000	100,00
		120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.500.000	14.500.000	100,00
		121	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.920.000	31.920.000	100,00
		122	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.000.000	23.600.000	69,41
30	Kec. Hiliserangkai Kabupaten Nias	123	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.900.000	42.360.000	96,49
		124	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.385.000	48.333.000	99,89
31	Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias	125	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.000.000	3.995.500	99,89
		126	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.500.000	41.587.550	97,85
		127	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.039.000	51.030.400	99,98
32	Kecamatan Hiliduhu Kabupaten Nias	128	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	21.400.000	20.875.000	97,55

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		Kelurahan			
		129 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.300.000	35.228.000	99,80
		130 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	39.152.000	97,88
33	Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias	131 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.000.000	95.998.700	100,00
34	Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias	132 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.690.000	41.270.000	86,54
		133 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.600.000	78.300.000	99,62
35	Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias	134 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.850.000	5.850.000	100,00
37	Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias	135 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public	4.950.000	4.950.000	100,00
		136 Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.494.000	10.404.000	99,14
		137 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.377.000	33.377.000	100,00
		138 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.499.500	52.499.500	100,00

3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nias pada Tahun 2021 antara lain:

- Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nias Tahun 2021 tidak terlepas dari munculnya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) khususnya pada pencapaian target-target kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja dan indikator yang termuat dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sehingga terjadinya *refocusing* anggaran dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang berakibat pada beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
- Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur masih sangat terbatas;
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kecil bila dibandingkan dengan penerimaan Dana Perimbangan;

- d. Penegakan Peraturan Daerah dalam memberhasilkan PAD masih terbatas;
- e. Belum seluruhnya objek pajak dan retribusi terdata dengan akurat;

SOLUSI

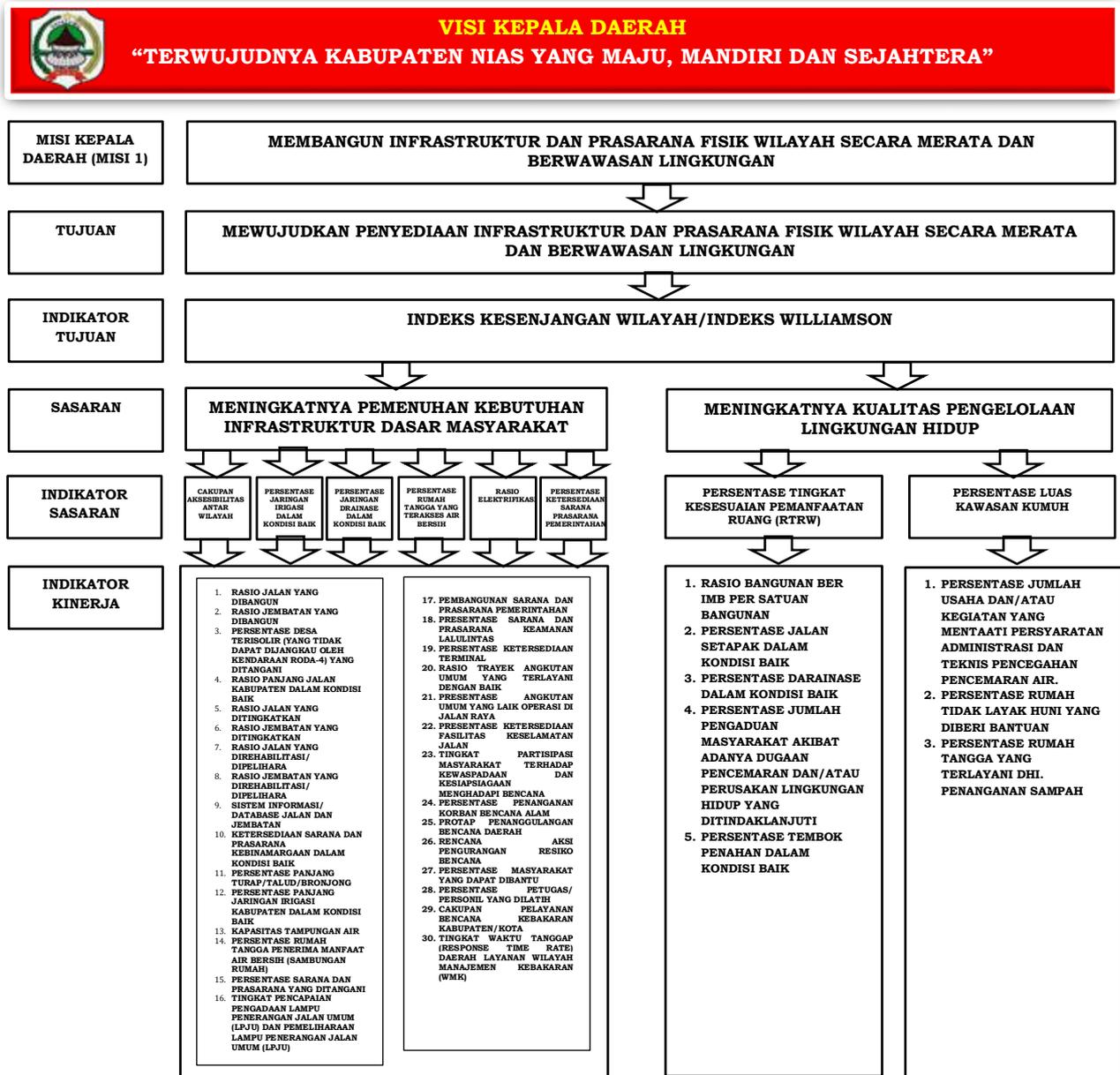
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Nias melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan komitmen seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dengan mengedepankan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, hal serupa juga diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (Upacara, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan kegiatan sejenis);
- c. Meningkatkan koordinasi secara intens antara kepala perangkat daerah dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dengan mengedepankan komitmen pimpinan dalam melakukan reviu atas realisasi target kinerja dan anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target, dan melakukan antisipasi jika terdapat kendala dalam mencapai sasaran strategisnya;
- d. Penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
- e. Pentingnya upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi daerah dengan dukungan sarana serta pembiayaan yang memadai.
- f. Pendataan objek/subjek pajak dan retribusi daerah yang berkesinambungan dan Penggalan sumber sumber potensi PAD secara lebih intensif.
- g. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah pengelola PAD dan Instansi terkait lainnya.
- h. Penempatan sumber daya manusia yang memahami tentang perpajakan daerah.
- i. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan yang potensial mendatangkan PAD.

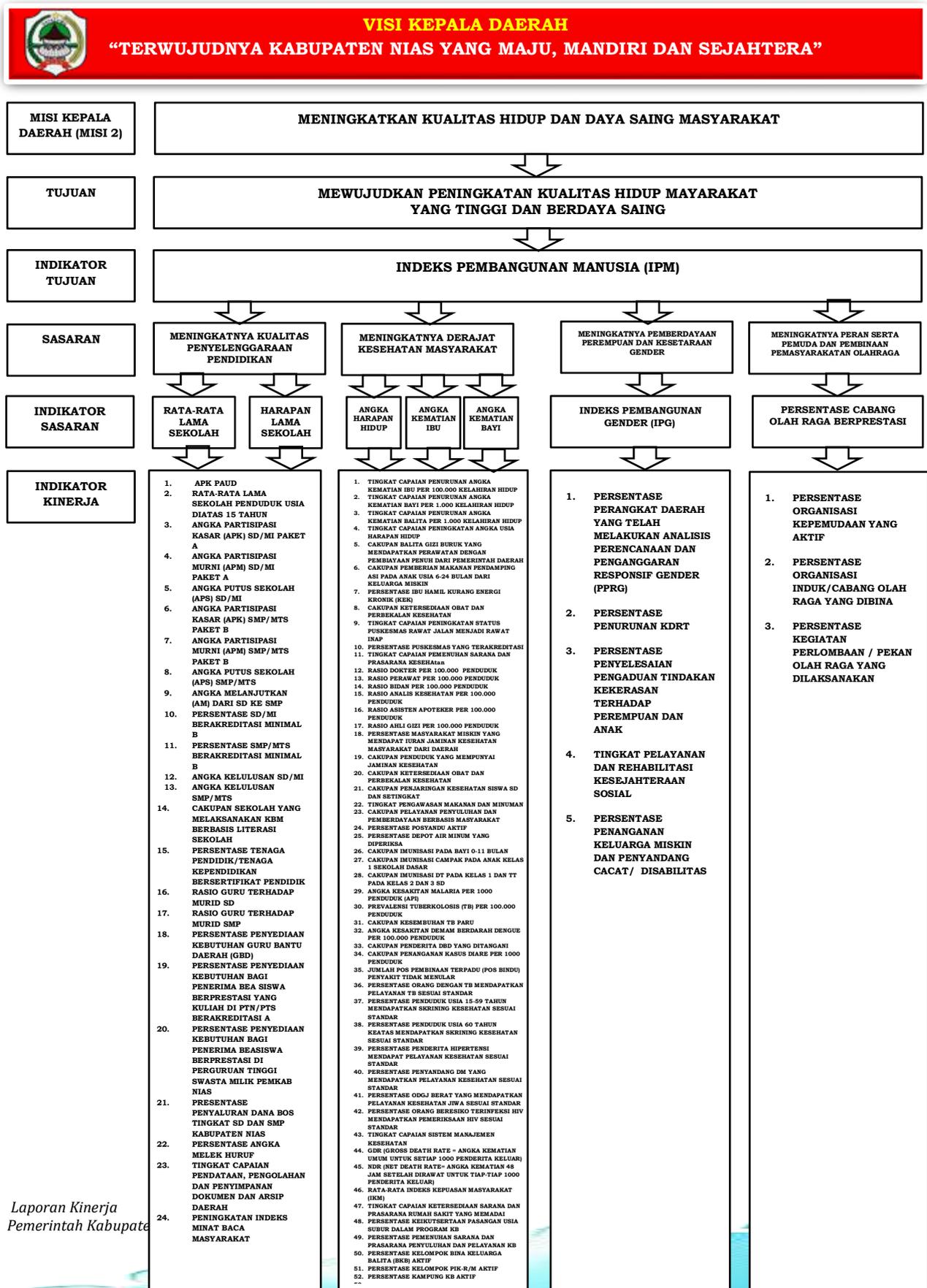
3.7 CASCADING PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

Cascading adalah proses penyusunan *scorecard* di setiap jenjang organisasi yang merupakan alat untuk pengomunikasian sasaran dan inisiatif stategik jenjang organisasi tertinggi ke setiap jenjang organisasi yang lebih rendah. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias telah membuat *cascading* sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam menunjang Visi, Misi, Tujuan Kepala Daerah sebagai salah satu bahan dalam evaluasi kinerja. Berikut *cascading* Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021.

A. CASCADING MISI – 1 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA FISIK WILAYAH SECARA MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

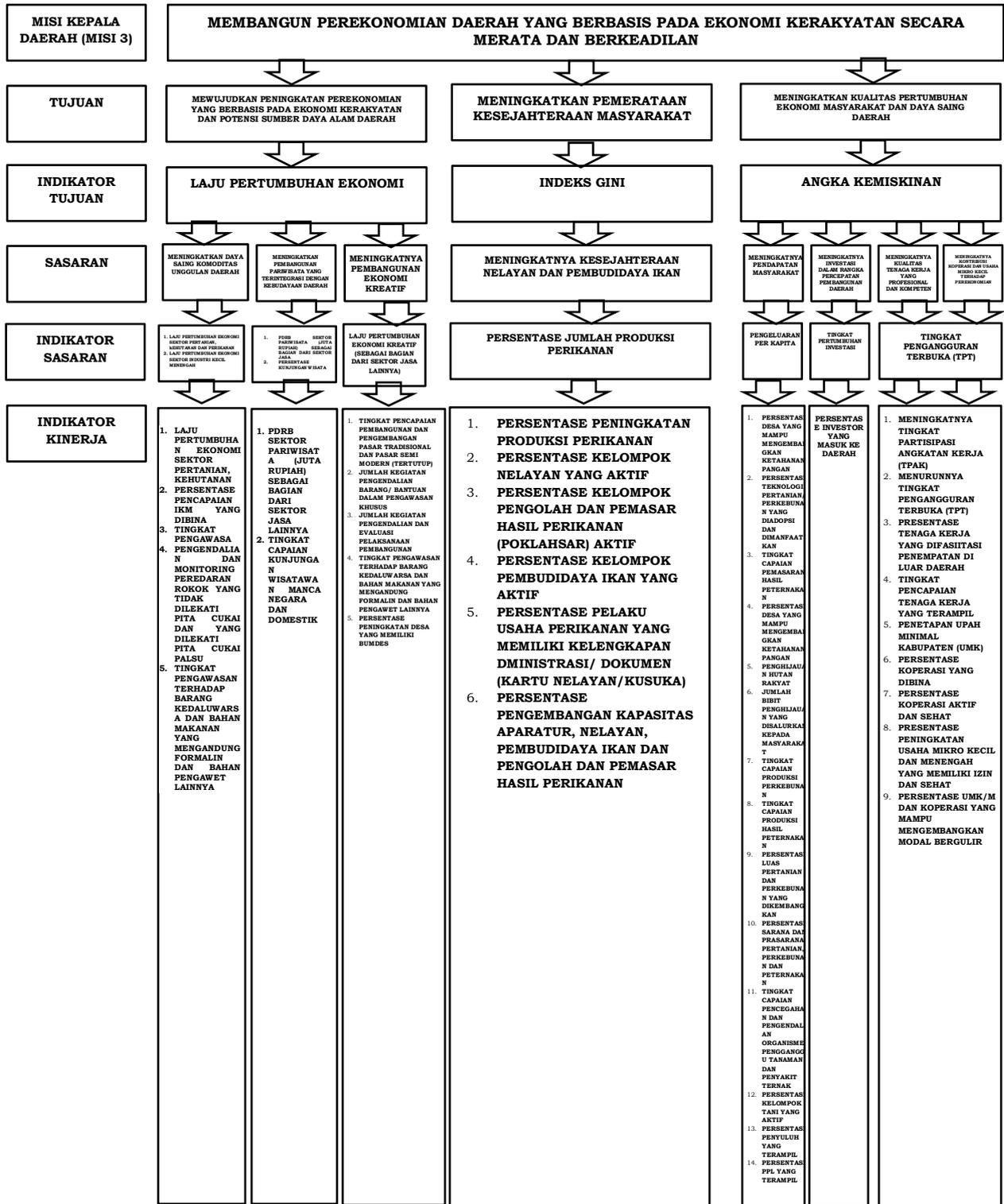


B. CASCADING MISI - 2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN DAYA SAING MASYARAKAT



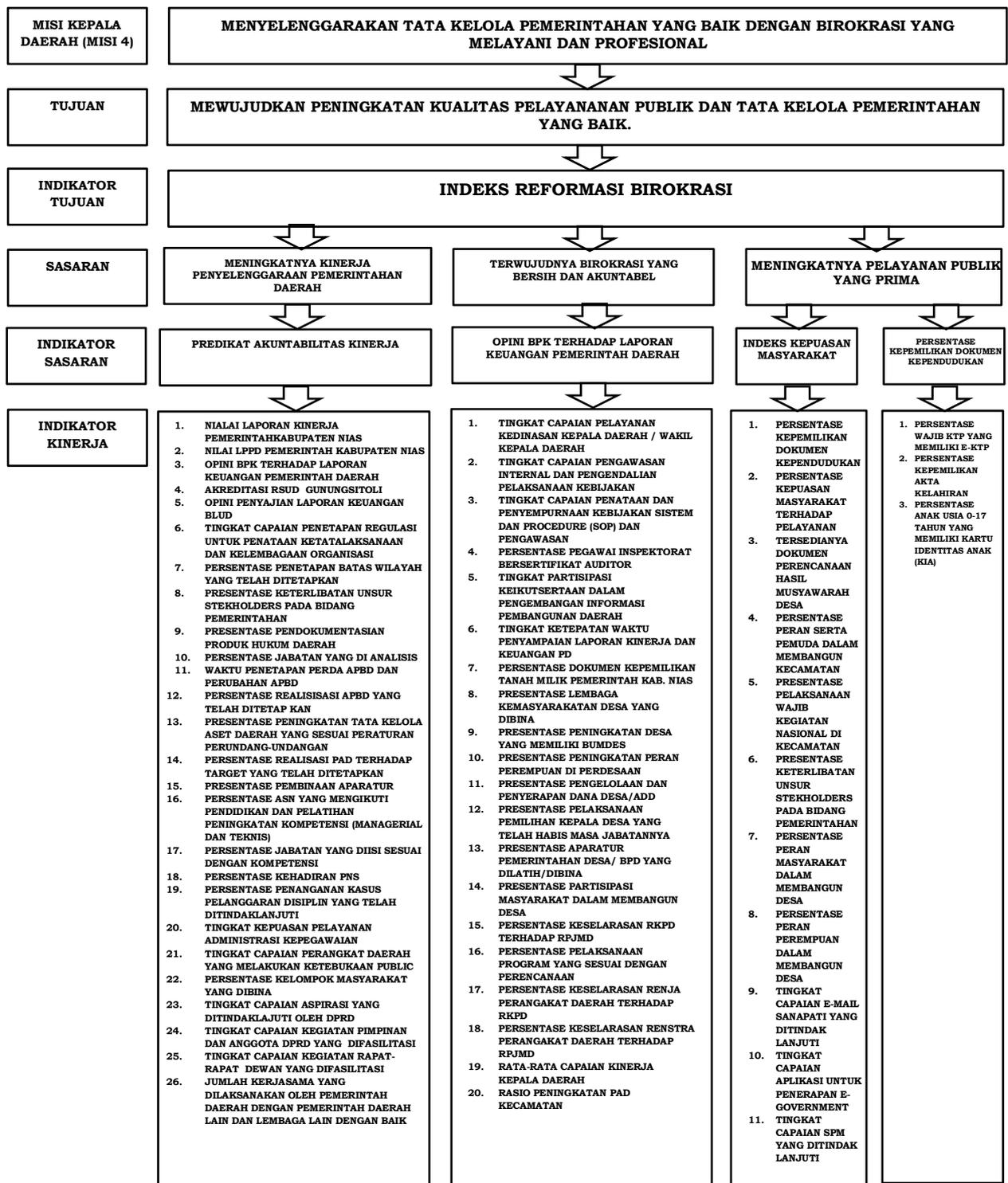
C. CASCADING MISI – 3

MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA EKONOMI KERAKYATAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

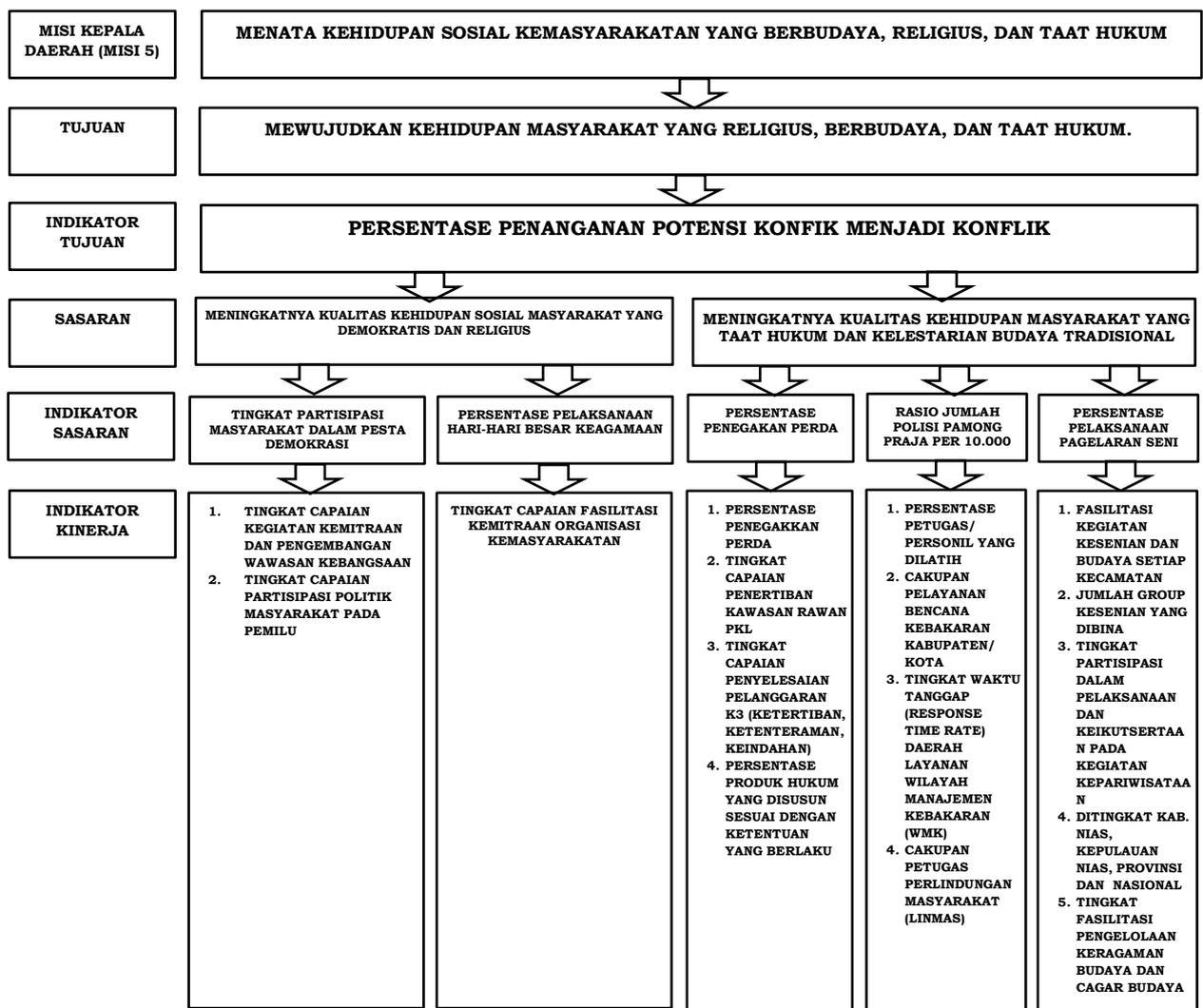


D. CASCADING MISI – 4 MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN BIROKRASI YANG MELAYANI DAN PROFESIONAL

VISI KEPALA DAERAH
“TERWUJUDNYA KABUPATEN NIAS YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”



E. CASCADING MISI – 5 MENATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, DAN TAAT HUKUM



3.8 RENCANA AKSI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN							
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]								
Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Kesejahteraan Wilayah/ Indeks Williamson	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Rasio Jalan yang dibangun	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias	√	√	√	√				
					Rasio Jembatan yang dibangun	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias	√	√	√	√							
					Persentase desa terisolir (yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4) yang ditangani	Peningkatan Persentase Desa yang dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Desa terisolir pada Kabupaten Nias	√	√	√	√							
					Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Peningkatan Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias	√	√	√	√							
					Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir dengan kondisi baik	Rasio jalan yang ditingkatkan	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias	√	√	√	√				
					Rasio Jembatan yang ditingkatkan	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias	√	√	√	√							
					Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Nias	√	√	√	√				
					Rasio Jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Persentase Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Nias	√	√	√	√							
					Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Sistem informasi/ database jalan dan jembatan	Peningkatan Sistem informasi/ database jalan dan jembatan	Tersedianya Sistem informasi/ database jalan dan jembatan	√	√	√	√				
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik	Peningkatan persediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik	Tersedianya sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik	√	√	√	√				
					Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Peningkatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan Baik di Kabupaten Nias	Meningkatnya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan Baik di Kabupaten Nias	Persentase panjang turap/ talud/ bronjong	Peningkatan pembangunan turap/ talud/ bronjong	Terlaksananya Pembangunan turap/ talud/ bronjong Jalan di Kabupaten Nias	√	√	√	√				
					Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi	Meningkatnya Persentase jaringan irigasi	Peningkatan jaringan irigasi kabupaten/ pemeliharaan jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Nias	√	√	√	√				
					Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan SDA	Meningkatkan pembangunan drainase di wilayah pemukiman padat penduduk dan pengamanan infrastruktur publik	Meningkatnya Persentase Drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Nias	Peningkatan Kapasitas Tampungan Air	Tersedianya Tampungan Air	√	√	√	√				
					Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)	Meningkatkan persentase Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)	Tersedianya Rumah Tangga penerima manfaat air bersih (Sambungan Rumah)	√	√	√	√			
					Rasio Elektrifikasi	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase sarana dan prasarana yang ditangani	Peningkatan Persentase sarana dan prasarana yang ditangani	Tersedianya sarana dan prasarana yang ditangani	√	√	√	√			
						Program Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatkan Penyediaan infrastruktur listrik di rumah tangga yang belum dialiri listrik	Meningkatnya jumlah rumah tangga teraliri listrik	Tingkat pencapaian pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Peningkatan Capaian pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Adanya pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	√	√	√	√			
					Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Penuntasan pembangunan kantor pemerintah dan pendukung pemerintahan	Terselenggaranya pembangunan kantor pemerintah dan pendukung pemerintahan	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	√	√	√	√			
						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Persentase sarana dan prasarana keamanan lalu lintas	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana keamanan lalu lintas	Tersedianya sarana dan prasarana keamanan lalu lintas	√	√	√	√			
												Persentase ketersediaan terminal	Peningkatan ketersediaan terminal	Tersedianya terminal	√	√	√	√

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN				
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV	
											[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
					Program Peningkatan Kelainan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Kelainan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelainan pengoperasian Kendaraan Bermotor					√	√	√	√
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Rasio trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik	Peningkatan Rasio trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik	Terseleenggaranya trayek angkutan umum yang terlayani dengan baik		√	√	√	√
					Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Meningkatnya sarana dan prasarana serta keselamatan transportasi darat	Persentase angkutan umum yang laik operasi di jalan raya	Peningkatan angkutan umum yang laik operasi di jalan raya	Tersedianya angkutan umum yang laik operasi di jalan raya		√	√	√	√
								Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Adanya fasilitas keselamatan jalan		√	√	√	√
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatkan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Adanya partisipasi masyarakat terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		√	√	√	√
								Persentase penanganan Korban Bencana Alam	Meningkatkan penanganan Korban Bencana Alam	Adanya penanganan Korban Bencana Alam		√	√	√	√
								Protap Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan Protap Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya Protap Penanggulangan Bencana Daerah		√	√	√	√
								Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	Adanya Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana		√	√	√	√
					Program Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya Kedaruratan dan Logistik Pasca Bencana	Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Peningkatan Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Terlaksananya Bantuan kepada Masyarakat		√	√	√	√
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Peningkatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya tempat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Peningkatan Persentase masyarakat yang dapat dibantu	Terlaksananya Bantuan kepada Masyarakat		√	√	√	√
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Meningkatnya fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Peningkatan Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Terlaksananya bangunan ber IMB per satuan bangunan		√	√	√	√
					Program Perencanaan Tata Ruang	Percepatan penyusunan dokumen rencana rinci pemanfaatan ruang	Adanya Percepatan penyusunan dokumen rencana rinci pemanfaatan ruang					√	√	√	√
					Program Pengembangan Perumahan	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Tersedianya rumah layak huni untuk rakyat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan	Peningkatan Persentase rumah layak huni yang diberi bantuan	Adanya bantuan rumah tidak layak huni yang diberikan		√	√	√	√
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah	Peningkatan Persentase rumah tangga yang terlayani dhi. penanganan sampah	Terlayannya Rumah Tangga dalam penanganan sampah		√	√	√	√
					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman	Meningkatnya Lingkungan Sehat Permukiman di Kabupaten Nias	Persentase jalan setapak dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase jalan setapak dalam kondisi baik	Tersedianya jalan setapak dalam kondisi baik		√	√	√	√
								Persentase drainase dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase drainase dalam kondisi baik	Tersedianya drainase dalam kondisi baik		√	√	√	√
								Persentase tembok penahan dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase tembok penahan dalam kondisi baik	Tersedianya tembok penahan dalam kondisi baik		√	√	√	√
				Persentase Luas Kawasan Kumuh	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Tersedianya usaha dan/atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.		√	√	√	√
								Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Peningkatan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Adanya penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.		√	√	√	√
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD di Wilayah Kab.n Nias	Peningkatan jumlah anak yang mengikuti Pendidikan PAUD	APK PAUD	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Gaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK		√	√	√	√
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata lama penduduk usia diatas 15 tahun	Peningkatan Muru Masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Muru Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias		√	√	√	√
				Harapan Lama Sekolah	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP)	Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Peningkatan Muru Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Muru Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias		√	√	√	√
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI Paket A	Peningkatan Muru Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias	Meningkatnya Muru Pendidikan masyarakat di Kabupaten Nias		√	√	√	√

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN			
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]				
								Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	Peningkatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	√	√	√	√
								Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Peningkatan Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	√	√	√	√
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes	Meningkatkan kapasitas dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan kapasitas dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Tingkat capaian peningkatan status puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap	Peningkatan peningkatan status puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap	Tingkat capaian peningkatan status puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap	√	√	√	√
								Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Adanya Puskesmas yang terakreditasi	√	√	√	√
								Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	√	√	√	√
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio dokter per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio perawat per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio bidan per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk	Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk	Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	√	√	√	√
					Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Menguatkan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	Persentase masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	Adanya masyarakat miskin yang mendapat iuran jaminan kesehatan masyarakat dari daerah	√	√	√	√
								Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	√	√	√	√
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√
					Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Sehat	Meningkatkan pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	√	√	√	√
								Tingkat pengawasan makanan dan minuman	Peningkatan pengawasan makanan dan minuman	Tingkat pengawasan makanan dan minuman	√	√	√	√
								Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	Peningkatan Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	Cakupan pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan berbasis masyarakat	√	√	√	√
								Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	√	√	√	√
								Persentase depot air minum yang diperiksa	Persentase depot air minum yang diperiksa	Persentase depot air minum yang diperiksa	√	√	√	√
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan	Cakupan imunisasi pada bayi 0-11 bulan	√	√	√	√
								Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar	Peningkatan Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar	Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 Sekolah Dasar	√	√	√	√
								Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD	Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD	Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada kelas 2 dan 3 SD	√	√	√	√
								Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API)	√	√	√	√
								Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk	Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk	Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Cakupan kesembuhan TB paru	Cakupan kesembuhan TB paru	Cakupan kesembuhan TB paru	√	√	√	√
								Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	√	√	√	√
								Cakupan penderita DBD yang ditangani	Peningkatan Cakupan penderita DBD yang ditangani	Cakupan penderita DBD yang ditangani	√	√	√	√
								Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk	Peningkatan Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk	Cakupan penanganan kasus diare per 1000 penduduk	√	√	√	√

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN						
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]							
								Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Bindu) Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Bindu) Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Pos Bindu) Penyakit Tidak Menular	√	√	√	√			
								Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Peningkatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Peningkatan penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Peningkatan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Menurunnya penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menurunnya Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Peningkatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√	√	√	√			
								Persentase orang bereisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang bereisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang bereisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	√	√	√	√			
								Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Bidang Kesehatan	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Bidang Kesehatan	Tingkat capaian Sistem Manajemen Kesehatan	Tingkat capaian Sistem Manajemen Kesehatan	√	√	√		
								Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	GDR (Gross Death Rate = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	√	√	√	
											NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	NDR (Net Death Rate= angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	√	√	√	
								Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatkan dan Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Adanya Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√	√	√	
											Tingkat capaian ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai	Peningkatan capaian ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai	Adanya ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai	√	√	√	
								Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi dan Data Mikro Kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB	Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB	Adanya keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB	√	√	√	
								Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Meningkatkan pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Adanya pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	√	√	√	
								Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD	Meningkatkan Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD	Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Meningkatkan Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Meningkatnya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	√	√	√	
								Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Persentase kelompok PIK-R/M aktif	Peningkatan Persentase kelompok PIK-R/M aktif	Meningkatnya kelompok PIK-R/M aktif	√	√	√	
								Program Pembinaan Peranserta Institusi Masyarakat dalam Pedesaan dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR	Persentase Kampung KB aktif	Meningkatnya Kampung KB aktif	Adanya Kampung KB aktif di Kabupaten Nias	√	√	√	
								Angka Kematian Ibu	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Tingkat capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	√	√	√
											Tingkat capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	√	√	√	
											Tingkat capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Peningkatan capaian penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Tercapainya penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	√	√	√	
											Tingkat capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	Tercapainya peningkatan Angka Usia Harapan Hidup	√	√	√	

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN			
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]				
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Barang Bersubsidi dan Strategis	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Barang Bersubsidi dan Strategis	Jumlah kegiatan pengendalian barang/bantuan dalam pengawasan khusus	Meningkatkan Jumlah kegiatan barang/bantuan dalam pengawasan khusus	Terselenggaranya kegiatan pengendalian barang/bantuan dalam pengawasan khusus	√	√	√	√
								Kontribusi PAD dari BUMD	Peningkatan Kontribusi PAD dari BUMD	Adanya Kontribusi PAD dari BUMD	√	√	√	√
								Cakupan pelayanan PDAM	Peningkatan Cakupan pelayanan PDAM	Adanya Cakupan pelayanan PDAM	√	√	√	√
								Jumlah kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Peningkatan Jumlah kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tingkat pengawasan terhadap barang kedaluwarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya	Peningkatan Tingkat pengawasan terhadap barang kedaluwarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya	Meningkatnya pengawasan terhadap barang kedaluwarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya	√	√	√	√
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Penguatan Lembaga Ekonomi Desa	Adanya Penguatan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase peningkatan desa yang memiliki BUMdes	peningkatan desa yang memiliki BUMdes	Adanya desa yang memiliki BUMdes	√	√	√	√
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peingkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	√	√	√	√
								Persentase peningkatan desa mandiri	peningkatan desa mandiri	Persentase peningkatan desa mandiri	√	√	√	√
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan Nelayan	Meningkatnya Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan Nelayan	Persentase peningkatan produksi perikanan	peningkatan produksi perikanan	Meningkatnya persentase produksi perikanan	√	√	√	√
					Program Pengembangan Budaya Perikanan	Meningkatkan budidaya perikanan	Meningkatnya budidaya perikanan	Persentase kelompok nelayan yang aktif	Meningkatkan Kelompok nelayan yang aktif	Meningkatnya persentase kelompok nelayan yang aktif	√	√	√	√
					Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat	Meningkatkan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Laut	Meningkatnya Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Laut	Persentase kelompok konservasi dan rehabilitasi			√	√	√	√
					Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	Persentase Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	Meningkatnya Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) aktif	√	√	√	√
					Program Pengembangan SDM dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan	Meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan	Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur dan nelayan	√	√	√	√
								Persentase sumber daya kelautan dan perikanan yang dikembangkan	Meningkatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang dikembangkan	Meningkatnya sumber daya kelautan dan perikanan yang dikembangkan	√	√	√	√
					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Persentase kelompok masyarakat pesisir yang dibina	Meningkatkan kelompok masyarakat pesisir yang dibina	Meningkatnya kelompok masyarakat pesisir yang dibina	√	√	√	√
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang dibina	Meningkatkan Koperasi yang dibina	Meningkatnya Koperasi yang dibina	√	√	√	√
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki izin dan sehat	√	√	√	√
					Program Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM	Meningkatkan dukungan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan dukungan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	Meningkatkan Persentase UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	Meningkatnya UMK/M dan Koperasi yang mampu mengembangkan Modal Bergulir	√	√	√	√
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan luas areal intensifikasi tanaman pangan dan inovasi teknologi dalam rangka ketahanan pangan	Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman pangan dan inovasi teknologi dalam rangka ketahanan pangan	Persentase Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Peningkatan Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Adanya Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	√	√	√	√
					Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatkan Pengembangan komoditas unggulan daerah berskala sentra produksi	Meningkatnya Pengembangan komoditas unggulan daerah berskala sentra produksi	Tingkat capaian produksi tanaman pangan	Meningkatkan capaian produksi tanaman pangan	Meningkatnya produksi tanaman pangan	√	√	√	√
								Meningkatkan Rasio produksi Perkebunan	Meningkatnya Rasio produksi Perkebunan	Meningkatnya Rasio produksi Perkebunan	√	√	√	√
					Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Meningkatkan Produksi peternakan	Peningkatan Produksi peternakan	Tingkat capaian produksi hasil peternakan	Peningkatan capaian produksi hasil peternakan	Meningkatnya capaian produksi hasil peternakan	√	√	√	√
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pertanian	Meningkatnya sarana prasarana pendukung pertanian	Persentase luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Peningkatan luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Meningkatnya luas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	√	√	√	√
								Persentase sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	√	√	√	√

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIVULAN			
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]				
					Program Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak	Mencegah dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Adanya Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Tingkat capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Peningkatan capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	Meningkatnya capaian pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak	√	√	√	√
					Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatkan Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM Pertanian	Meningkatnya Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang aktif	Peningkatan Persentase Kelompok Tani yang aktif	Meningkatnya Kelompok Tani yang aktif	√	√	√	√
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman pangan	Adanya ketersediaan, kualitas dan keragaman pangan	Persentase Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Peningkatan Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	Adanya Desa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan	√	√	√	√
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias	Meningkatnya promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias	Persentase Investor yang masuk ke Daerah	Peningkatan Investor yang masuk ke Daerah	Adanya Investor yang masuk ke Daerah	√	√	√	√
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pengembangan Kesempatan Kerja	Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Adanya kesempatan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	√	√	√	√
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pencapaian tenaga kerja yang terampil	Peningkatan tenaga kerja yang terampil	Tingkat tenaga kerja yang terampil	√	√	√	√
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	√	√	√	√
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Struktur Organisasi yang Efektif dan Proporsional	Tertatanya Struktur Organisasi yang Efektif dan Proporsional	Tingkat capaian penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	Peningkatan penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	Tercapainya penetapan regulasi untuk penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi	√	√	√	√
					Program Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Penataan Tata Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Penataan Tata Administrasi Pemerintahan	Persentase penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	Peningkatan penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	Adanya penetapan batas wilayah yang telah ditetapkan	√	√	√	√
					Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan	Peningkatan keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan	Adanya keterlibatan unsur stakeholders pada bidang pemerintahan	√	√	√	√
					Program Pendokumentasian Hukum	Penataan Dokumen Produk Hukum Daerah	Tertatanya Dokumen Produk Hukum Daerah dengan baik	Persentase pendokumentasian produk hukum daerah	Peningkatan pendokumentasian produk hukum daerah	Tercapainya pendokumentasian produk hukum daerah	√	√	√	√
					Program Penyelenggaraan Analisis Jabatan	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Berbasis Kinerja	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Berbasis Kinerja	Persentase jabatan yang di Analisis	Peningkatan jabatan yang di Analisis	Adanya jabatan yang di Analisis	√	√	√	√
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah	Peningkatan ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah	√	√	√	√
					Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	Peningkatan Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	Adanya Realisasi PAD terhadap Target yang telah ditetapkan	√	√	√	√
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pembinaan Aparatur	Peningkatan Pembinaan Aparatur	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur	√	√	√	√
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis)	Peningkatan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis)	Adanya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis)	√	√	√	√
								Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Peningkatan jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Adanya jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	√	√	√	√

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			PELAKSANAAN TRIWULAN				
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	I	II	III	IV	
															[1]
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase Kehadiran PNS	Peningkatan Kehadiran PNS	Meningkatnya Kehadiran PNS	√	√	√	√	
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Tingkat capaian pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	Peningkatan pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	Adanya pendataan, pengolahan dan penyimpanan dokumen dan arsip daerah	√	√	√	√	
					Program Pengembangan Komunikasi Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan daerah / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terselenggaranya penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan daerah / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tingkat capaian Daerah yang melakukan ketubukaan publik	Peningkatan Perangkat Daerah yang melakukan ketubukaan publik	Adanya Perangkat Daerah yang melakukan ketubukaan publik	√	√	√	√	
					Program Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi	Meningkatkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi	Meningkatnya Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi				√	√	√	√	
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penegasan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penegasan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa				√	√	√	√	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD	Meningkatnya kegiatan DPRD	Tingkat capaian aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Tingkat capaian aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Tercapainya aspirasi yang ditindaklanjuti oleh DPRD	√	√	√	√	
							Tingkat capaian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Tingkat capaian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Tercapainya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	√	√	√	√		
							Tingkat capaian kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	Tingkat capaian kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	Tercapainya kegiatan rapat-rapat dewan yang difasilitasi	√	√	√	√		
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatkan kerjasama strategis dengan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat	terjalinya kerjasama strategis dengan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	Peningkatan pelayanan dilaksanakan oleh pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	Terlaksananya kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	√	√	√	√	
						Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/ BUMD, swasta dan LSM	terjalinya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/ BUMD, swasta dan LSM				√	√	√	√	
				Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat capaian pelayanan Kedisiplinan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan kedisiplinan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Tercapainya pelayanan kedisiplinan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√
					Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	Peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	Tercapainya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan procedure (SOP) dan pengawasan	√	√	√	√	
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Meningkatkan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan	Persentase pegawai Inspektoral bersertifikat Auditor	Peningkatan pegawai Inspektoral bersertifikat Auditor	Tersedianya pegawai Inspektoral bersertifikat Auditor	√	√	√	√	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan	Tertatanya Sistem Informasi Pembangunan	Tingkat partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Peningkatan partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	Adanya partisipasi keikutsertaan dalam pengembangan informasi pembangunan Daerah	√	√	√	√	
					Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	Peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan PD	√	√	√	√	
					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Fensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias	Terselenggaranya Fensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias	Persentase kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias	Persentase kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias	Tersedianya kepemilikan tanah milik Pemerintah Kab. Nias	√	√	√	√	
							Persentase pengadaan tanah pemerintah	Persentase pengadaan tanah pemerintah	Tersedianya pengadaan tanah pemerintah	√	√	√	√		
					Program Pemilihan Kepala Desa	Meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya	Peningkatan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah habis masa jabatannya	√	√	√	√	
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa/ BPD yang dilatih/dibina	Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa/ BPD yang dilatih/dibina	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa/ BPD yang dilatih/dibina	√	√	√	√	
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	Peningkatan peningkatan peran perempuan di perdesaan	Tersedianya peningkatan peran perempuan di perdesaan	√	√	√	√	



BAB IV P E N U T U P

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2021**



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si
BUPATI NIAS PERIODE 2021-2024

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2021 telah didasari Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 mencakup penilaian tingkat capaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Nias akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Gunungsitoli Selatan, 29 Maret 2022

BUPATI NIAS,

YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si.

